PENGANTAR SOSIOLOGI KEHUTANAN

FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga tugas dan amanah untuk melaksanakan penyusunan Buku Pembukaan Wilayah Hutan dan Keteknikan Kehutanan dapat tersusun.

Tugas dan amanah tersebut tidak mungkin terlaksana dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Dekan Fakultas Kehutanan, pembantu Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, serta Pembantu Dekan Bidang keuangan dan administrasi yang telah memfasilitasi pembiayaan pembuata buku ini.
2. Staf Dosen Kehutanan yang telah memberikan sumbangan perbaikan dalam proses pembuata buku ajar ini

Makassar, September 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

I. RUANG LINGKUP SOSIOLOGI KEHUTANAN DAN KAITANNYA DENGAN ILMU KEHUTANAN LAINNYA 1

A. Apa itu Sosiologi 1

B. Peran Sosiologi 3

II. INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT PADA PENGELOLAAN HUTAN (KONTAK SOSIAL DAN KOMUNIKASI 4

A. Interaksi Sosial dan Simbol 4

B. Jenis Tindakan Sosial 6

C. “Pengambilan Peranan” dalam Interaksi Sosial 7

III. KELOMPOK – KELOMPOK SOSIAL MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN 9

A. Kelompok Primer dan Kelompok Sekunder 10

B. Kelompok Formal dan Kelompok Informal 14

C. Membership Group dan Reference Group 15

D. Gemeinschsft dan Gesellschsft 16

E. In group dan Out Group 18

F. Kelompok – Kelompok Sosial Tidak Teratur 18

a. Kerumunan 18

b. Publik 22

c. Massa 23

IV. NORMA SOSIAL PADA PENGELOLAAN HUTAN 25

Klasifikasi Norma – Norma Sosial 26

a. Folkways 26

b. Mores 28

c. Hukum 29

d. Nilai 29

V. PRANATA SOSIAL PENGELOLAAN HUTAN 31

A. Pengertian Pranata Sosial..... 31

B. Tujuan dan Fungsi Pranata Sosial 32

C. Tipe – Tipe Pranata Sosial..... 33

1. Tingkat Kompleksitas Penyebarannya 33

2. Orientasi Nilainya 34

D. PRANATA EKONOMI 35

1. Elemen Dasar Proses dan Struktur Ekonomi 36

2. Perkembangan Masyarakat dan Tipe Pranata Ekonomi 38

1. Masyarakat Pencari Makanan dan Pemburu 38

2. Masyarakat Hortkultura 39

3. Masyarakat Kapitalis 40

VI. STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT LOKAL DALAM PENGELOLAAN HUTAN 41

- Patron – Klien..... 45

1. Pola Hubungan Patron – Klien..... 45

2. Kekuasaan dan tron Klien : Patrimonialisme 46

A. Stratifikasi Sosial : Unsur, Sifat, dan Perspektif 47

1. Pengertian Stratifikasi Sosial..... 47

2. Karakteristik Stratifikasi Sosial 48

3. Unsur – Unsur Stratifikasi Sosial..... 50

a. Kedudukan (status)..... 50

b. Peran (Role) 52

B. Mobilitas Sosial 54

1. Jenis Mobilitas Sosial 55

2. Saluran – Saluran Mobilitas Sosial Vertikal..... 56

3. Determinan Mobilitas..... 56

4. Konsekuensi Mobilitas Sosial..... 57

C. Struktur Masyarakat Desa Cibodas pada Tahun 1950-an 57

1. Buruh Tani..... 58

2. Buruh Tani dalam Arti Sebenarnya 59
3. Petani Tidak Tetap 60
4. Petani Bebas 61
5. Petani Bebas Kecil 61
6. Tuan Tanah Besar 63
D. Desa Cibodas Saat Ini 66
E. Struktur Sosial Masyarakat 68
Penutup 71

VII. PROSES SOSIAL DALAM PENGELOLAAN HUTAN 72

A. Proses Sosial yang Asosiatif 72
1. Kooperasi 72
2. Akomodasi 73
3. Asimilasi 75
4. Amalgasi 77
B. Proses – Proses Sosial yang Disosiatif 77
1. Kompetisi 77
2. Konflik 79
3. Kontravensi 80

VIII. PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT SEKITAR HUTAN 81

1. Pengertian Perubahan Sosial 81
2. Bentuk – Bentuk Perubahan Sosial 83
a. Kecepatan Perubahan Sosial 83
b. Tingkat Pengaruh Perubahan 85
c. Perubahan yang Direncanakan dan Tidak Direncanakan 86
3. Faktor – Faktor yang Menyebabkan Perubahan Sosial 87
A. Sebab – Sebab Terjadinya Perubahan Sosial 87
B. Faktor – Faktor Internal 88
- Penemuan Baru (Inovation dan Invention) 88
- Gerakan Sosial (Social Movement) 89
b. Faktor Eksternal 95

1. Perubahan Lingkungan Alam 95
2. Penjajahan atau Bentuk Kekuatan Kelompok dari Luar Masyarakat 95
3. Kekuatan Asing 95
4. Modernisasi dan Pembangunan 96
D. Teori Modernisasi yang Dipakai dalam Pembangunan Pertanian Indonesia 96

IX. BENTUK- BENTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 104

A. Pendampingan Sosial 104
B. Bidang Tugas 104
C. Pemungkinan atau Fasilitasi 104
D. Penguatan 105
E. Perlindungan 105
F. Pendukung 105

X. BENTUK – BENTUK PERAN SOSIAL AGEN PEMBANGUNAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 106

A. Fasilitator 106
B. Broker 107
C. Mediator 08
D. Pembela 109
E. Pelindung 110
- Mobilitas Sosial 110
A. Jenis Mobilitas Sosial 110
B. Saluran – Saluran Mobilitas Sosial Vertikal 112
C. Konsekuensi Mobilitas Sosial 112

DAFTAR PUSTAKA 113

BAB I. RUANG LINGKUP SOSIOLOGI KEHUTANAN DAN KAITANNYA DENGAN ILMU KEHUTANAN LAINNYA

A. Apa itu Sosiologi

Sosiologi pada hakikatnya bukanlah semata-mata ilmu murni (pure science) yang hanya mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak demi usaha peningkatan kualitas ilmu itu sendiri, namun sosiologi bisa juga menjadi ilmu terapan (applied science) yang menyajikan cara-cara untuk mempergunakan pengetahuan ilmiahnya guna memecahkan masalah praktis atau masalah sosoial yang perlu ditanggulangi (Horton dan Hunt, 1987:41), seorang ahli sosiologi yang melakukan penelitian tenteng tekanan ekonomi atau masalah kemiskinan yang dialami buruh tani, misalnya, maka dia adalah seorang ilmuwan murni. Tetapi, kalau peneliti tersebut kemudian meneruskannya dengan melakukan studi mengenai bagaimana cara meningkatkan taraf kehidupan keluarga buruh tani, maka dalam hal ini sosiologi menjadi ilmu terapan. Seorang sosiolog yang bekerja di tataran praksis, ia tidak sekedar meneliti masalah sosial untuk membangun proposisi dan mengembangkan teori, tetapi sosiologi bukanlah seperangkat doktrin yang kaku dan selalu menekan apa yang “seharusnya’’ terjadi, melainkan ia adalah semacam sudut pandang baru atau ilmu yang selalu mencoba “menelanjangi” realitas: mengungkap fakta-fakta yang tersembunyi di balik realitas yang tampak. Beberapa ciri sosialisasi yang inheren adalah pengakuannya yang rendah hati terhadap realitas dan sifatnya yang subversive. Sosiologi selalu tidak percaya pada apa yang tampak sekilas dan selalu mencoba menguak serta membongkar apa yang tersembunyi (latent) di balik realitas nyata (manifes) karena sosiologi berkeyakinan bahwa “dunia bukanlah sebagaimana nampaknya”, tetapi dunia yang sebenarnya baru bisa dipahami jika dikaji secara mendalam dan diinterprestasikan (Berger dan Kellner, 1985:5). Kekhususan sosiologi adalah bahwa perilaku manusia selalu dilihat dalam kaitannya dengan struktur – struktur kemasyarakatan dan kebudayaan yang dimiliki, dibagi dan ditunjang bersama (Veeger, 1985:3). Sosiologi mempelajari dan peilaku sosial manusia dengan meneliti kelompok yang dibangunnya. Kelompok tersebut mencakup keluarga, suku bangsa, komunitas,pemerintahan dan berbagai organisasi sosial, agama, politik, bisnis

serta organisasi lainnya. Sosiologi mempelajari perilaku dan interaksi kelompok, menelusuri asal-usul pertumbuhannya serta menganalisis pengaruh kegiatan kelompok terhadap anggotanya (Occupational Outlook Handbook, 1980-1981, US Department of Labor 1980:431). Masyarakat, komunitas, keluarga, perubahan gaya hidup, struktur, mobilitas sosial, gender, interaksi sosial, perubahan sosial, perlawanan sosial, konflik, integrasi sosial dan sebagainya adalah sejumlah contoh yang memperlihatkan betapa luasnya ruang kajian sosiologi. Sosiologi, dengan demikian bias dikatakan sebagai ilmu tersendiri, karena “ia” adalah disiplin intelektual yang secara khusus, sistematis dan terandalkan mengembangkan pengetahuan tentang hubungan sosial manusia pada umumnya dan tentang produk dari hubungan tersebut (Hoult, 1969). Dengan kata lain, sosiologi mempelajari tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat, tidak sebagai individu yang terlepas dari kehidupan masyarakat. Fokus bahasan sosiologi adalah interaksi manusia, yaitu pada pengaruh timbal balik di antara dua orang atau lebih dalam perasaan, sikap dan tindakan. Sosiologi tidak begitu menitikberatkan pada apa yang terjadi di dalam diri manusia (merupakan bidang studi psikologi), melainkan pada apa yang berlangsung di antara manusia. Saat ini, ada banyak definisi resmi mengenai sosiologi. Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi, misalnya, mendefinisikan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses social-termasuk perubahan sosial. Struktur social adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah social, lembaga-lembaga social, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan social. Sedangkan proses social adalah pengaruh timbal balik antara pelbagai segi kehidupan bersama (Soemardjan dan soemardi, 1964:14). Singkat kata, dapat dikatakan bahwa sosiologi tidak hanya merupakan suatu kumpulan subdisiplin segala bidang kehidupan, melainkan merupakan suatu studi tentang masyarakat. Walaupun sebagian objek sosiologi sama dengan ilmu pengetahuan lainnya, namun sosiologi memandang kehidupan bermasyarakat dengan caranya sendiri.

B. Peran Sosiolog

Menurut Horton dan Hunt (1987), dewasa ini beberapa profesi yang umumnya diisi oleh para sosiolog adalah:

1. Sebagai ahli riset, baik itu riset ilmiah untuk kepentingan pengembangan keilmuwan atau riset yang diperlukan sektor industri;
2. Sebagai konsultan kebijaksanaan, khususnya ikut membantu untuk memperkirakan pengaruh dari kebijaksanaan social tertentu;
3. Sebagai teknisi atau yang popular disebut sosiolog klinis, yakni ikut terlibat di dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan masyarakat;
4. Sebagai guru atau pendidik yang terlibat dalam kegiatan belajar-mengajar;
5. Sebagai pekerja sosial (social worker)

BAB II. INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT PADA PENGELOLAAN HUTAN (KONTAK SOCIAL DAN KOMUNIKASI)

Sosiologi sesungguhnya bukanlah praktek, tetapi suatu upaya untuk memahami realitas dan masalah sosial. Masalah-masalah yang menarik perhatian ahli sosiologi tidak perlu sama dengan apa yang oleh orang lain disebut “masalah sosial”. Berbeda dengan pengertian “masalah sosial” yang lebih banyak dipahami orang awam atau kaum birokrat sebagai sesuatu yang tidak beres dalam masyarakat, ahli sosiologi mengartikan “masalah sosial” sebagai masalah sosiologi yang terjadi dalam hubungannya dengan interaksi dan tindakan sosial warga masyarakat.

A. Interaksi Sosial dan Simbol

Secara teoritis, sekurang-kurangnnya ada dua syarat bagi terjadinya suatu interaksi sosial, yaitu terjadinya kontak sosial dan komunikasi. Terjadinya suatu kontak sosial tidaklah semata-mata tergantung dari tindakan, tetapi juga tergantung kepada adanya tanggapan terhadap tindakan tersebut. Sedangkan aspek terpenting dari komunikasi adalah bila seseorang memberikan tafsiran pada sesuatu atau perilaku orang lain. Komunikasi melalui isyarat-isyarat sederhana adalah bentuk paling elementer dan yang paling pokok dalam komunikasi . Tetapi, pada masyarakat manusia “syariat” komunikasi yang dipakai tidaklah terbatas pada bentuk komunikasi ini. Hal ini disebabkan karena manusia mampu menjadi objek untuk dirinya sendiri (dan juga sebagai subjek yang bertindak) dan melihat tindakan-tindakannya seperti orang lain dapat melihatnya Dengan kata lain, manusia dapat membayangkan dirinya secara sadar dalam perilakunya dari sudut pandangan orang lain. Sebagai akibatnya, mereka dapat mengonsentrasikan perilakunya dengan sengaja untuk membangkitkan tipe respons tertentu dan orang lain (Johnson, 1986:11). Karakteristik khusus dari komunikasi manusia adalah mereka tidak terbatas hanya menggunakan isyarat-isyarat fisik sebagaimana halnya dilakukan binatang. Di dalam berkomunikasi manusia menggunakan kata-kata, yakni simbol-simbol suara yang mengandung arti bersama dan bersifat standar. Dalam hal ini, tidak perlu selalu ada hubungan yang intristik antara satu bunyi tertentu dengan respons yang disimbolkannya. Simbol disini berbeda

dengan tanda. Makna sebuah tanda biasanya identik dengan bentuk fisiknya dan dapat ditangkap dengan panca indra, sedangkan simbol bisa abstrak. Menurut Karp dan Yoels, simbol mengarahkan tanggapan-tanggapan kita, membantu mempersatukan atau mengonsepkanaspek-aspek dunia (Sunarto,1985:100-101). Bahwa simbol adalah sesuatu yang “lepas” dari apa yang disimbolkan, karena komunikasi manusia itu tidak terbatas pada ruang, penampilan atau sosok fisik, dan waktu dimana pengalaman inderawi itu berlangsung, sebaliknya manusia dapat berkomunikasi tentang objek dan tindakan jauh di luar batas waktu dan ruang. Bila kita menyebut kata anjing, misalnya, semua orang segera bisa membayangkan bagaimana bentuk anjing itu tanpa harus didukung oleh kehadiran anjing itu secara fisik karena manusia memiliki daya khayal dan memiliki kesepakatan bersama akan pengertian kata anjing. Bahkan, untuk hal-hal yang mungkin belum pernah kita lihat wujud fisiknya, asal kita telah sepakat akan pengertian kata yang diucapkan, niscaya komunikasi akan tetap bisa dilangsukan. Bila seseorang menyebutkan kata setan atau jin, tentu segera di benak kita akan bias membayangkan apa yang dimaksud oleh orang itu-kendati kita sama sekali belum pernah menjumpai secara langsung setan atau jin itu sendiri. Namun, perlu diingat makna dari suatu symbol tertentu tidak selalu bersifat universal: berlaku sama di setiap situasi dan daerah. Nilai atau makna sebuah simbol tergantungkepada kesepakatan orang-orang atau kelompok yang mempergunakan simbol itu. Menurut Leslie while (1968), makna simbol hanya dapat ditangkap melalui cara-cara nonsensoris, yakni melalui proses penafsiran (interpretative process). Makna dari suatu simbol tertentu dalam proses interaksi sosial tidak begitu saja bias langsung diterima dan dimengerti oleh semua orang, melainkan harus terlebih dahulu ditafsirkan. Seseorang yang menengadahkan tangan, tidak selalu harus diartikan sebagai simbol meminta sedekah, tetapi bias pula berarti suatu bentuk penghormatan yang diberikanoleh seseorang karena ia mempersilakan orang lain untuk berjalan terlebih dahulu. Menggelengkan kepala bagi orang Indonesia umumnya berarti tidak setuju, tetapi bagi orang India menggelengkan kepala untuk sebagian bias berarti setuju atau ya. Dengan demikian, maka dari itu suatu simbol tergantung konteks situasi dan daerah di mana simbol dipergunakan.

B. Jenis Tindakan Sosial

Tidak selalu semua perilakudapat dimengerti sebagai suatu manifestasi rasionalitas. Sebagian dari kita mungkin heran dan tidak habis piker kenapa ada orang yang bersedia membeli lukisan abstrak-seperti lukisan Affandi dan Picasso yang tidak karuan bentuknya itu-atau prangko kuno dengan harga jutaan atau bahkan miliaran rupiah. Kita mungkin akan mengatakan bahwa tindakan orang yang membeli lukisan itu adalah tidak rasional. Kesimpulan kita seperti itu boleh-boleh saja, tetapi kalau kita mau berpikir lebih mendalam dan tahu alas an subjektif mereka hingga bersedia mengeluarkan uang begitu banyak untuk sebuah lukisan, mungkin kita akan dapat mengerti. Menurut Max Weber, metode yang bias dipergunakan untuk memahami arti-arti subjektif tindakan sosial seseorang adalah dengan *verstehen.* Istilah ini tidak hanya sekadar merupakan introspeksi-yang cuma bias digunakan untuk memehami arti subjektif tindakan diri sendiri, bukan tindakan subjektif orang lain. Sebaliknya, apa yang dimaksud Weber dengan *verstehen* adalah kemampuan untuk berempati atau kemampuan untuk menempatkan diri dalam kerangka berpikir orang lain yang perilakunya mau dijelaskan dan situasi serta tujuan-tujuannya mau dilihat menurut perspektif itu (Johnson, 1986:216). Max Weber mengklasifikasikan ada empat jenis tindakan sosial yang memengaruhi sistem dan struktur sosial masyarakat. Keempat jenis tindakan sosial itu:

1. Rasionalitas instrumental. Di sini tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Seorang anak pensiunan pegawai negeri golongan III yang memutuskan kuliah di Perguruan Tinggi Negeri atau memilih kuliah di program Diploma karena menyadari tidak memiliki biaya yang cukup adalah contoh yang bisa disebut dari tindakan jenis rasional instrumental.
2. Rasionalitas yang berorientasi nilai. Sifat rasional tindakan jenis ini adalah bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Artinya, nilai itu merupakan nilai akhir bagi individu

yang bersangkutan dan bersifat nonrasional, sehingga tidak memperhitungkan alternatif. Contoh tindakan jenis ini adalah perilsku ibadah.

3. Tindakan Tradisional. Dalam tindakan jenis ini, seseorang memeperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan. Sebuah keluarga di kota yang melaksanakan acara syukuran karena pindah rumah, tanpa tahu dengan pasti apa mamfaatnya, adalah salah satu contoh tindakan tradisional. Keluarga tersebut ketika ditanya, biasanya akan menjawab bahwa hal itu hanya sekadar menuruti anjuran dan kebiasaan orang tua mereka.
4. Tindakan afektif. Tipe tindakan ini didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan alektif sifatnya spontan, tidak rasional dan merupakan ekspresi emosional dari individu. Seseorang yang menangis tersedu-sedu karena sedih atau seseorang yang gemetar dan wajahnya pucat pasi karena ketakutan adalah beberapa contoh yang bisa disebut.

Max Weber mengakui bahwa empat jenis tndakan social yang diutarakan adalah merupakan tipe ideal dan jarang bisa ditemukan dalam kenyataan. Tetapi, lepas dari soal itu, apa yang hendak disampaikan Weber adalah tindakan social-apa pun wujudnya-hanya dapat dimengerti menurut arti subjektif dan pola-pola motivasional yang berkaitan dengan itu. untuk mengetahui arti subjektif dan motivasi individu yang bertndak,yang diperlukan adalah kemampuan untuk berempati pada peranan orang lain.

C. “Pengambilan Peranan” Dalam Interaksi Sosial

Secara teoritis, tindakan social dan interaksi social adalah dua konsep yang berbeda arti. Tindakan sosial adalah hal-halyang dilakukan individu atau kelompok di dalam interaksi dan situasi sosial tertentu. Sedang yang dimaksud dengan interaksi social adalah proses dimana antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok berhubungan satu dengan yang lain. Banyak ahli sosiologi sepakat bahwa interaksi sosial adalah syarat utama bagi terjadinya aktivitas sosial dan hadirnya kenyataan sosial. Max Weber melihat kenyataan sosial sebadai sesuatu yang didasarkan paa motivasi individu dan tindakan-tindakan sosial (Johnson, 1986:214,215). Ketika berinteraksi, seseorang atau kelompok sebenarnya tengah

berusaha atau belajar bagaimana memahami tindakan sosial orang atau kelompok lain. Sebuah interaksi sosial akan kacau bilamana antara pihak-pihak yang berinteraksi tidak saling memahami motivasi dan makna tindakan sosial yang mereka lakukan. Menurut George Herbert Mead, agar interaksi sosial bisa berjalan dengan tertib dan teratur dan agar anggota masyarakat bias berfungsi secara “normal”, maka yang diperlukan bukan hanya kemampuan untuk bertindak sesuai dengan konteks sosialnya, tetapi juga memerlukan kemampuan untuk menilai secara objektif perilaku kita sendiri dari sudut pandang orang lain. Pertanyaan umum yang lazim muncul adalah: apakah perilaku atau tindakan kita sudah cukup pantas di hadapan si X atau si Y? kalau kita biasa berbicara *ngoko* terhadap teman sendiri, misalnya, apakah hal itu juga pantas bila kita lakukan terhadap orang tua?

BAB III. KELOMPOK-KELOMPOK SOSIAL MASYARAKAT LOKAL DALAM PENGELOLAAN HUTAN

Mengenai pembagian kelompok sosial dapat diklasifikasikan kedalam beberapa tipe yang dapat ditinjau dari beberapa sudut atau berdasarkan atas berbagai kriteria atau ukuran. Kelompok social pada dasarnya dapat dibedakan atas:

1) Kelompok-kelompok sosial yang teratur
2) Kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur

Dari kedua kelompok tersebut di atas masih dibedakan lagi enjadi beberapa jenis. Untuk kelompok-kelompok sosial yang teratur dikenal beberapa bentuk antara lain:

1. Yang berdasarkan atas besar kecilnya jumlah anggota kelompok dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:
   a. Kelompok primer (primary group)
   b. Kelompok sekunder (secondary group)
2. Yang berdasarkan atas derajat organisasinya dibedakan menjadi:
   a. Kelompok formal (formal group)
   b. Kelompok informal (informal group)
3. Yang berdasarkan atas interaksinya dibedakan menjadi:
   a. Kelompok referensi (reference group)
   b. Kelompok memvership (membership group)

Sedangkan untuk kelompok primer ini masih ada beberapa bentuk lagi, misalnya: *in group, out group, gemeinschaft*, dan sebagainya. Sedangkan untuk kelompok-kelompok sosialyang tidak teratur dibedakan menjadi dua golongan, yaitu:

a. Kerumunan (crowd) dengan berbagai bentuknya
b. Publik

Perlu diketahui, bahwa bentuk-bentuk kelompok sosial yang telah disebutkan di atas merupakan bentuk kehidupan yang nyata dalam masyarakat.

A. Kelompok Primer Dan Kelompok Sekunder

Atas dasar besar kecilnya jumlah anggota kelompok, maka Charles Horton membedakan antara kelompok primer dengan kelompok sekunder. Menurut Cooley, kelompok ditandai dengan adanya hubungan yang erat di mana anggota-anggotanya saling mengenal dan sering kali berkomunikasi secara langsung berhadapan muka (face to face) serta terdapat kerja sama yang bersifat pribadi atau adanya ikatan *psychologis* yang erat. Dari ikatan-ikatan *psychologis* dan hubungan yang bersifat pribadi inilah, maka akan terjadi peleburan-peleburan daripada individu-individu dalam satu kelompok, sehingga tujuan-tujuan individu menjadi juga tujuan kelompoknya. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, maka selanjutnya Cooley menerangkan kelompok primer berdasarkan atas 3 tinjauan sebagai berikut:

1. Kondisi-kondisi fisik kelompok primer

a. Tidak cukup hanya hubungan saling mengenal saja, akan tetapi yang terpenting adalah bahwa anggota-anggotanya secara fisik harus saling berdekatan.
b. Jumlah anggotanya harus kecil, agar supaya mereka dapat saling kenal dan saling bertemu muka.
c. Hubungan antara anggota-anggotanya agak permanen.

2. Sifat-sifat hubungan primer

a. Sifat utama hubungan primer, yaitu adanya kesamaan tujuan di antara para anggotanya yang berarti bahwa masing-masing individu mempunyai keinginan dan sikap yang sama dalam usahanya untuk mencapai tujuan, serta salah satu pihak harus rela berkorban demi untuk kepentingan pihak lainnya.
b. Hubungan primer ini harus secara sukarela, sehingga pihak-pihak yang bersangkutan tidak merasakan adanya penekanan-penekanan, melainkan semua anggota akan merasakan adanya kebebasan.
c. Hubungan primer bersifat dan juga inklusif, artinya hubungan yang diadakan itu harus melekat pada kepribadian seseorang dan tidak dapat digantikan oleh orang lain, dan bagi mereka yang mengadakan hubungan harus menyangkut segala kepribadiannya, misalnya perasaannya, sifat-sifatnya, dan sebagainya.

3. **Kelompok-kelompok yang kongkret dan hubungan primer**

   Kelompok primer seperti yang digambarkan di atas kenyataan tidak terdapat pada masyarakat, artinya tidak terdapat kelompok primer yang sempurna sesuai dengan syarat-syarat yang telah disebutkan di atas.

   Bahkan dewasa ini, kelompok primer di dalam masyarakat makin berkurang, akan tetapi apabila organisasinya makin besar, maka makin besar pula keperluan dan dorongan untuk mencari kelompok primer, agar supaya terdapat ikatan *psychologis* di antara para anggotanya. biasanya ikatan *psychologis* ini hanya pada orang-orang tertentu saja, misalnya antara atasan dan bawahan sesuai dengan paham paternalistis dalam masyarakat.

Selain hal-hal yang dikemukakan di atas, perlu pula ditambahkan bahwa kelompok primer ini dapat menguntungkan terhadap individu dan juga membantu perkembangan individu. Adapun hal-hal yang menguntungkan terhadap individu dapatlah disebutkan sebagai berikut:

a. Dapat menunjang sifat-sifat baik manusia serta memberikan kekuatan dan dorongan kepada individu, sehingga dapat mengurangi sifat-sifat individu yang lemah.
b. Dapat mempertebal ketergantungan individu terhadap kelompoknya.
c. Semua hal didasarkan pada perasaan, artinya reaksi-reaksi yang diperlihatkan oleh masing-masing individu dalam kelompok didasarkan atas perasaan.

Sedangkan hal-hal yang dapat membantu kelompok sosial ini terdapat individu antara lain:

a. Dapat memperbesar rasa loyalitas.
b. Dapat memberikan pegangan pada individu, agar supaya tidak mengalami kebingungan dan frustasi.

Jadi, kelompok primer ini sangat berguna sekali bagi individu, baik dalam hal kepentingan maupun keamanan individu sehubungan dengan adanya hubungan yang erat di antara para anggotanya. Contohnya: keluarga, kelompok bermain, kelmpok kerja, dan sebagainya.

Berbeda dengan kelompok primer, untuk kelompok sekunder Coley tidak menyebutkan ciri-cirinya yang khas. Hanya saja dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang telah dikatakan pada kelompok primer, pada kelompok sekunder merupakan kebalikannya baik mengenai kondisi maupun sifat-sifatnya. sehingga dapat dikatakan bahwa kelompok primer ini mempunyai kondisi dan sifat-sifat sebagai berikut:

a. Jumlah anggotanya banyak, sehinga anggotanya tidak saling mengenal.
b. Hubungan renggang di mana anggotanya tidak perlu saling mengenali secara pribadi.
c. Sifatnya tidak permanen.
d. Hubungan cenderung pada hubungan formil, karena sedikit sekali terdapat kontak di antara anggotanya dan baru terdapat kontak apabila ada kepentingan dan tujuan tertentu saja.

Dengan melihat ciri-ciri tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa di antara para anggotanya tidak terdapat loyalitas terhadap kelompoknya sehingga tidak tercapai kesejahteraan bersama seperti dalam kelompok primer. Begitu juga halnya dengan kelompok sekunder ini di samping ada factor keuntungan (positif), juga ada factor yang merugikan (negative). Karena hubungan renggang di antara para anggota, maka semuanya terutama keputusan-keputusan dapat bersifat objektif dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor pribadi, sedangkan faktor negatifnya, yaitu karena tidak adanya rasa loyalitas dan dedikasi terhadap kelompok maka tidak ada landasan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Untuk lebih jelas agar mendapatkan gambaran perbedaan antara kelompok primer dan kelompok sekunder, maka Kingsley Davis dalam bukunya *Human Society* menggambarkan sebagai berikut:

	KONDISI-KONDISI FISIK	SIFAT-SIFAT SOSIAL	CONTOH HUBUNGAN	CONTOH KELOMPOK
Kelompok Primer	➢ ukuran kepastian ➢ kelompok kecil ➢ jangka panjang	➢ adanya tujuan-tujuan yang sama ➢ terdapat penilaian hubungan yang murni ➢ terdapat penilaian yang murni dari orang lain ➢ termasuk pengetahuan-pengetahuan orang lain ➢ terdapat kebebasan dan spontinitas ➢ pengawasan bersifat informal	➢ teman-teman ➢ suami istri ➢ orang tua anak ➢ guru murid	➢ kelompok bermain ➢ keluarga ➢ desa atau rukun tetangga ➢ kelompk kerja
Kelompok Sekunder	➢ ukuran jarak ➢ kelompok besar ➢ jangka pendek	➢ adanya keseimbangan tujuan ➢ penilaian hubungan antar anggota tidak penting ➢ tidak dipentingkan penilaian dari orang lain ➢ adanya spesialisasi dan pembatasan pengetahuan ➢ adanya pembatasan yang bersifat eksternal ➢ pengawas bersifat formal	➢ juru tulis langganan ➢ penyiar pendengar ➢ pemain penonton ➢ perwira bawahan ➢ pengarang pembaca	➢ bangsa ➢ hierarki pendeta ➢ organisasi professional ➢ korporasi

B. Kelompok Formal Dan Kelompok Informal

Kelompok formal merupakan organisasi kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja dibuatoleh anggota-anggotanya untuk ditaati serta untuk mengatur hubungan antar anggotanya. Karena merupakan organisasi yang resmi, maka dengan sendirinya dikenal adanya struktur organisasinya yang resmi, maka dengan sendirinya dikenal adanya struktur organisasinya, sehingga terdapat hierarki di antara anggota-anggota kelompok oleh karena terdapat pembatasan tugas dan wewenang. Dengan adanya peraturan yang tertulis, maka loyalitas anggota bukan pada kelompok melainkan pada peraturan. Adapun ciri-ciri dan interaksi daripada kelompok formal ini seperti pada kelompok sekunder. Contoh: PERSARI, ISWI, KORPRI. Sedangkan kelompok informal merupakan organisasi kelompok yang tidak resmi serta tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti, jadi kelompok ini tidak didukung oleh peraturan-peraturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga secara tertulis. Biasanya kelompok ini dibentuk atas dasar pengalaman-pengalaman dan kepentingan-kepentingan yang sama dari para anggotanya. Sifat interaksinya (hubungan timbal balik) berdasarkan salng mengerti yang lebih mendalam karena pengalaman-pengalaman dan pandangan-pandangan yang sama. Karena tidak mengenal peraturan tertulis, maka loyalitas anggota pada kelompok yang lain besar sekali, di samping itu juga karena jumlah anggotanya sedikit, maka di antara para anggotanya dapat mengenal secara pribadi dan sering bertemu muka, Jadi, pada kelompok informal dapat dikatakan bahwa sifat-sifat dan cirri-cirinya hampir sama dengan kelompok primer. Contohnya: klien,kelompok arisan. Untuk lebih jelas mengetahui perbedaan antara kelompok formal dengan kelompok informal dapat digambarkan seperti di bawah ini.

	KELOMPOK FORMAL	**KELOMPOK INFORMAL**
➢ Jumlah anggota ➢ Bentuk peraturan ➢ Organisasi ➢ Sifat hubugannya	➢ Besar/banyak ➢ Tertulis ➢ Resmi ➢ Renggang, sehingga tidak saling mengenal di antara para anggotanya	➢ Kecil/sedikit ➢ Tidak tertulis ➢ Tidak resmi ➢ Rapat, sehingga saling mengenal secara pribadi

C. Membership Group Dan Reference Group

Pembedaan kelompok sosial lainnya didasarkan pada derajat interaksinya ialah *membership group dan reference group*, dan yang mengemukakan ialah Robert K. Merton. Batas-batas yang dipakai untuk menentukan keanggotaan seseorang pada kelompok tidak dapat dilakukan secara mutlak, karena perubahan-perubahan keadaan akan memengaruhi derajat interaksi di dalam kelompok, sehingga adakalanya seorang anggota tidak begitu sering berkumpul dengan kelompoknya, walaupun secara resmi dia belum keluar dari kelompok bersangkutan. *Membership group* merupakan kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut, Ukuran utama bagi keanggotaan seseorang adalah interaksinya dengan kelompok sosial yang bersangkutan. Untuk membedakan secara tegas keanggotaan atas dasar derajat interaksi, maka *membership group* dibedakan lagi menjadi:

1. Nominal group member : Anggotanya masih berinteraksi dengan kelompok sosial yang bersangkutan, akan tetapi interaksinya dengan anggota lainnya berkurang.
2. Perihal group member : Seseorang anggota seolah – olah sudah tidak berhubungan dengan kelompok yang bersangkutan sehingga kelompok tidak mempunyai kekuasaan terhadap anggota tersebut.

Perbedaan derajat interaksi, dapat menimbulkan subgroup, karena orang-orang yang sering berinteraksi kemudian membentuk kelompok-kelompok sendiri, karena adanya factor-faktor kepentingan yang sama, keanggotaan, serta nilai-nilai yang sama. *Reference group*: merupakan kelompok sosial yang menjadi ukuran bagi seseorang (bukan anggota kelompok) untu membentuk pribadi dan perilakunya. Jadi,seseorang itu telah menyetujui norma-normanya, sikap-sikapnya dan tujuan dari kelompok tersebut, artinya bahwa dia senang kepada kerangka norma-norma, sikap-sikap dan tujuan yang dimiliki oleh kelompok.

Contohnya:

Seseorang dari desa, di mana desa itu merupakan *reference group*nya karena dia telah menyetujui kerangka norma-norma dan pedoman-pedoman hidup dari keluarganya yang ada di desa. Kemudian ia ingin melanjutkan sekolahnya di kota besar, dimana

kota ini telah mempunyai kerangka pedoman-pedoman hidup yang berlainan, maka di sini ia masuk dalam kelompok *membership group.*

Jadi, norma-norma yang terdapat dalam *membership group*-nya berlainan norma-norma dalam *reference group*-nya, dan ia harus menyesuaikan diri dengan norma-norma kehidupan kota; dengan kata lain ia harus melepaskan *reference group*-nya yang lama dan pindah ke *reference group*-nya yang baru.

Seperti telah diterangkan sebelumnya, bahwa untuk kelompok sosial yang teratur selain yang telah disebutkan bentuk-bentuk kelompok sosial di atas, masih dikenal beberapa bentuk lainnya, dua diantaranya ialah:

1. Yang berdasarkan kepentingandan wilayah dibedakan antara *gemeinschaft* dengan *gesellschaft*.
2. Yang berdasarkan berlangsungnya suatu kepentingan, dibedakan antara *in group* dengan *out group.*

D. Gemeinschsft Dan Gesellschsft

Bentuk-bentuk kelompok sosial ini merupakan pendapat dari Ferdinand Tonnios, dalam bukunya *Gemeinschsft* dan *Gesellschsft.* Pekan ini merupakan semua hubungan amnesia yang didasarkan atas *Wesonwillo* atau *Kurwillo* manusia. *Wesonwillo* menurut Tonnios merupakan bentu-bentuk kehendak, baik dalam arti positif maupun negative, yang berakar pada manusia dan diperkuat oleh pemakaian serta disempurnakan oleh agama dan kepercayaan. Jadi, Wesonwillo itu sudah merupakan kodrat manusia yang timbul dari keseluruhan kehidupan alami. sedangkan merupakan bentuk-bentuk kehendak yang mendasarkan pada akal manusia yang ditujukan pada tujuan-tujuan tertentu dan sifatnya rasional dengan menggunakan alat-alat dari unsur-unsur kehidupan lainnya.

Dengan kata lain, pada satu pihak kehendak dan perbuatan yang irasional berdasarkan perasaan, sedangkan di pihak lain kehendak dan perbuatan yang rasional yang ditujukan kepada alat atau alat-alat yang sering kali bertentangan dengan perasaan.

Dalam wujudnya yang elementer, Wesonwillo artinya tidak lain daripada suatu kehendak dan perbuatan yang langsung, jadi di samping perbutan yang bernafsu termasuk juga perbuatan dan kehendak yang naif. Sebaiknya, *Kurwillo* dapat diketahui

terutama karena adanya kesadaran. Maka, dari segala macam ikatan sosial yang kuat dipengaruhi oleh *Wesonwillo* disebut *Gemeinschaft, dan* sebaliknya yang dibentuk oleh atau sebagian besar ditentukan oleh *Kurwillo* disebut *Gesellschaft.* Oleh karena itulah, hubungan-hubungan positif antara manusia yang satu dengan yang lainnya selalu bersifat *Gemeinschaftlich* dan *Gesellschaftlich*.

Dari utama di atas, maka dapatlah diterangkan bahwa *Gemeinschaft* merupakan bentuk kehidupan bersama, di mana antar anggotanya mempunyai hubungan batin murni yang sifatnya alamiah dan kekal. Dasar hubungannya, yaitu rasa cinta dan persatuan batin yang nyata dan organis. Bentuk ini dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat desa, keluarga, kerabat, dan sebagainya, *Gesellschaft* merupakan bentuk kehidupan barsama di mana para anggotanya mempunyai hubungan yang bersifat pamrih dan dalam jangka waktu yang pendek, serta bersifat mekanis.

Pada masyarakat desa yang bersifat *Gemeinschaftlich,*pada umumnya spesialisasi individu tidak begitu penting. Sehingga apabila salah seorang anggota dikeluarkan, maka tidak begitu terasakan oleh anggota lainnya, berarti bahwa kedudukan masyarakat lebih penting daripada kedudukan individu, sehingga strukturnya disebut mekanis.

Sebaliknya, pada masyarakat yang bersifat kompleks (Gesellschaftlich) di mana sudah ada spesialisasi di antara para anggotannya, sehingga tidak dapat hidup secara tersendiri atau dapat dipisah-pisahkan, sehingga merupakan suatu kesatuan organisme, oleh karenanya strukturnya merupakan struktur yang organis.

Begitu juga halnya dengan Cooley terhadap kelompok primernya, maka Tonnies memandang *Gemeinschaft* adalah sangat ideal kalau diterapkan pada masyarakat yang mempunyai sifat-sifat seperti yang dikemukakan oleh Tonnies pada masyarakat yang masih sangat sederhana.

SelanjutnyaTonnies membedakan *Gemeinschaft* menjadi 3 jenis, yaitu:

1. *Gemeinschaft by blood*, yaitu *Gemeinschaft* yang mendasarkan diri pada ikatan darah atau keturunan. Di dalam pertumbuhannya masyarakat yang semacam ini makin lama makin menipis.

2. *Gemeinschaft of placo(locality),* yaitu *Gemeinschaft* yang mendasarkan diri pada tempat tinggal yang saling berdekatan sehingga dimungkinkan Contoh: RT dan RW.
3. *Gemeinschaft of mind,* yaitu *Gemeinschaft* yang mendasarkan diri pada ideologiatau pikiran yang sama .

   Dari ketiga bentuk ini dapat ditemui pada masyarakat, baik di kota maupun di desa.

E. In Group dan Out Group

Bentuk kelompok sosial mendasarkan pada kepentingan, dan seseorang mengidentifikasikan dirinya apakah termasuk *in group* maupun *out group* tergantung juga pada situasi-situasi sosial tertentu serta sikap perasaanya.

Sikap *in group* biasanya menunjukkan adanya faktor simpati dan perasaan terhadap orang dalam, sedangkan sikap perasaan *out group* adalah sikap perasaan terhadap semua orang termasuk orang luaran.

Perasaan *in group* terhadap orang dapat bervariasi dari sikap ramah dan *good will* sampai menjadi solidaritas mati-matian. Begitu juga halnya sikap “outgroup”dapat berubah dari sikap menyisihkan orang lain sampai sikap bermusuhan.

F. Kelompok-kelompok Sosial Tidak Teratur

Pada dasarnya kelompok-kelompok sosial ini sering kali terjadi pada kehidupan sosial di dalam masyarakat dalam bentuk-bentuk: kerumunan-kerumunan publik, rakyat jabatan, dan massa. Dari bentuk-bentuk tersebut pada dasarnya dapat dimasukkan ke dalam dua kategori umum yang secara ekstrem berlawanan, yaitu: kerumunan(crowd) dan publik.

a. Kerumunan(Crowd)

Sangatlah sukar untuk mengatakan bahwa, pengelompokan dari manusia hanyalah merupakan koleksi-koleksi dari manusia secara fisiknya, melainkan setiap manusia berkelompok selalu menunjukkan adanya ikatan-ikatan sosial. Mungkin mereka secara kebetulan berkumpul di suatu tempat tertentu dengan sendirinya masing-masing akan menyadari kehadiran orang lain dan akan memerhatikan orang lain, misalnya tentang bajunya, wajahnya dan sebagainya, sehingga akan menimbulkan

interaksi-interaksi di antara mereka. Jadi, kelompok-kelompok itu tidak hanya terjadi karena adanya interaksi saja melainkan juga karena adanya perhatian yang sama.

Karakteritistik Kerumunan

Seperti halnya pada kelompok sosial yang teratur, pada kerumunan pun mempunyai karakteritis yang tersendiri, antara lain :

1. Adanya kehadiran individu-individusecara fisik dan ukurannya, yaitu sejauh mata memandang dan telinga mendengarkan. Tanpa kehadiran individu secara fisik, maka tidak akan terjadi kerumunan, artinya kerumunanitu akan bubar apabila individu-individunya yang berkerumunan itu membubarkan dirinya. Jadi, kerumunan itu tidak akan terjadi lama, oleh karenanya kerumunan itu merupakan suatu kelompok yang bersifat sementara.
2. Merupakan kelompok yang tidak terorganisir, oleh karena itu tidak mempunyai pimpinan dan tidak mengenalpembagian kerja maupun sistempelapisan dalam masyarakat.

   Artinya:

   - Interaksinya tidak terkontrol, spontan, kabur tidak terduga sama sekali.
   - Setiap individu yang hadir mempunyai kedudukan yang sama di dalam kerumunan.

Jadi, identitas individu tidak tampak apabila seseorang (individu) yang bersangkutan ikut serta dalam kerumunan, artinya tiap individu tidak akan berbeda kedudukannya sebab kerumunan tidak mempunyai organisasi.

Timbulnya kerumunan menurut Mayor Polak adalah karena adanya minat, hasrat atau kepentingan bersama dan di antara para anggotanya berkembang pengaruh dan seperti timbale balik yang kadang-kadang kuat tetapi tidak kekal seta tidak rasional.

Selanjutnya, Mayor Polak membedakan antara dua jenis kerumunan:

1. Kerumunan yang menjadi aktif
2. Kerumunan yang tinggal ekspresif

Pada umumnya yang aktif timbulnya secara spontan bersifat emosional dan impulsive. Karena tidak adanya oganisasi, maka tidak ada pembagian kerja serta aturan-aturan, maka kerumunan ini biasanya bersifat dekstruktif yang bertujuan merusak, sebab perbuatan merusak ini dapat melepaskan perasaan tidak puas,

kemarahan, maupun kejengkelan yang pada masyarakat teratur perasaan-perasaan ini ditekan. Sehingga pada kerumunan ini memberikan kesempatan untuk melepaskan perasaan-perasaan tersebut. Kerumunan aktif ini pun dapat bersifat revolusioner ataupun reaksioner. Misalnya: Pemberontakan Bastille dan Pembunuhan Massal. Dan kerumunan ini dapat menjalar luas karena adanya penularan-penularan sosial.

Perbedaan dengan kerumunan aktif, maka pada kerumunan ekspresif tidak mengenal pusat perhatian maupun tujuan yang sama, melainkan hanya mengenal emosi saja tanpa tujuan tertentu. Sehingga kerumunan ekspresif ini sifatnya tidak merusak, tapi hanya sekadar melepaskan ketegangan (emosi) saja. Misalnya: menangis, menyanyi, dan sebagainya yang dapat memberikan perasaan puas serta kebebasan dari rasa yang tegang.

Kerumunan ekspresif kadang-kadang dapat berubah menjadi kerumunan aktif, misalnya: penonton sepak bola, di mana penonton dapat mengeroyok wasit apabila wasit menjatuhkan keputusan yang tidak adil.

Pada umumnya kerumunan itu bersifat merusak dan hanya sedikit sekali yang dapat diarahkan pada tujuan-tujuan yang baik. Dan kerumunan itu biasanya timbul dari celah-celah organisasi sosial suatu masyarakat. Individu-individu yang tergabung dalam kerumunan, berkumpulnya secara kebetulan pada suatu tempat dan waktu yang bersamaan karena ingin menggunakan fasilitas-fasilitas yang sama dalam memenuhi kepentingan pribadinya.

Khusus untuk kerumunan yang bersifat merusak untuk membubarkannya, yaitu dengan jalan mengalihkan pusat perhatian, serta menyadarkan kembali akakn kedudukan dan peranan individu yang sesungguhnya. Bila hal ini tidak berhasil, maka diadakan tindakan kekerasan atau memecah belah pendapat umum dalam kerumunan, sehingga terjadi pertentangan di antara mereka yang tergabung dalam kerumunan.

Dari sifat-sifat kerumunan yan telah disebutkan di atas, maka kerumunan dapat dibedakan atas beberapa bentuk.

Bentuk-bentuk Kerumunan

Pada umumnya *crowd* merupakan gejala di sepanjang zaman dan bukan merupakan gejala spesifik zaman modern saja. Bahkan ada bentuk-bentuk kerumunan tertentu yang dianggap merupakan kebiasaan, sehingga tidak mendapat kecaman-

kecaman atau dianggap merupakan penyimpangan suatu syarat norma dalam masyarakat. Misalnya: teriakan-teriakan pada pertandingan sepak bola, festival, music, dan sebagainya.

Adapun bentuk-bentuk daripada kerumunan antara lain:

I. Kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial:
   a. *Formal audiences*: penonton-penonton bioskop, penonton-penonton olah raga, para pendengar khotbah keagamaan. Bentuk kerumunan ini mempunyai pusat perhatian yang sama serta tujuan-tujuan yang sama, akan tetapi sifatnay pasif.
   b. *Planned expressive group*: kerumunan-kerumunan dansa, perjamuan, pesta para keagamaan. Dalam kerumunan ini pusat perhatian tak begitu dipentingkan, akan tetapi mempunyai persamaan tujuan yang tersimpul dalam aktivitasnya. Fungsinya untuk menyalurkan ketegangan-ketegangan yang dialami orang karena pekerjaan sehari-hari.

II. Casual *Crowds* atau kerumunan yang bersifat sementara:
   a. *Inconvenient aggregation* atau kumpulan yang kurang menyenangkan merupakan kerumunan-kerumunan dari orang-orang yang ingin berusaha menggunakan fasilitas-fasilitas yang sama. Misalnya: orang-orang yang antri karcis, kelompok yang menunggu bus umum, atau sejumlah orang-orang yang terperangkap dalam kesibukan lalu lintas. Dalam kerumunan ini kehadiran orang-orang yang lain dianggap sebagai suatu kalangan terhadap tercapainya tujuan seseorang dan akan berakibat terjadinya saling bermusuhan.
   b. *Panic crowds* atau kerumunan orang-orang yang sedang dalam kedaan panic. Misalnya: orang-orang yang berusaha menyelamatkan diri dari gedung yang sedang terbakar, dari bahaya banjir, dari bahaya perang atau dari beberapa bencana yang lainnya. Dorongan individu-individu dalam kerumunan ini cenderung untuk mempertinggi rasa panic, menunjukkan suatu tanggapan yang bersifat irasional dan menyebabkan suatu rintangan yang positif dari bahaya yang umum.
   c. *Spectator crowds* atau kerumunan penonton, merupakan kerumunan dari orang-orang yang ingin melihat suatu kejadian tertentu. Kerumunan ini sebenarnya hampir sama dengan formal audience hanya saja terjadinya tidak

direncanakan dan pada umumnya kegiatan-kegiatannya tidak terkendalikan. Pusat perhatiannya adalah kejadian-kejadian yang bersifat eksidental.

III. Law *less crowds* atau kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hokum:

a. *Acting mobs,* yaitu kerumunan yang bertindak secara emosional. Misalnya: pembunuhan yang dilakukan beramai-ramai, kelompok perampok, kerumunan-kerumunan pemberonyak. Kerumunan ini bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuannya dengan jalan menunjukkan kekuatan-kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Pada umumnya, orang-orang bertindak secara emosional karena merasa tidak adanya keadilan.

b. *Immoral crowds* atau kerumunan-kerumunan yang bersifat imoral. Misalnya: perhimpunan-perhimpunan yang mengadakan pesta yang melampaui batas, orang-orang yang masuk, pesta-pesta yang menggemparkan dan merusak. Tipe ini hamper sama dengan kelompok-kelompok yang eksporesif, akan tetapi bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalm masyarakat.

b. Publik

Berbeda dengan kerumunan, publik merupakan kelompok yang bukan kesatuan, karena individu-individu tidak pernah saling bertemu. Interaksinya bersifat tidak langsung melalui alat-alat media, misalnya melalui pembicaraan-pembicaraan pribadi yang berantai, melalui kabar angin, gossip, berita-berita, surat kabar, radio, film warta berita, dan televise. dengan adanya alat-alat media yang tersebut di atas, memungkinkan pengikutnya lebih luas dan banyak daripada kerumunan. Karena banyaknya pengikut, maka tidak terdapat pusat perhatian yang tajam dan karenanya tidak ada kesatuan publik, ini merupakan suatu gejala zaman modern yang ditujukan pada persoalan-persoalan khusus, sehingga akan menimbulkan spesialisasi dan keahlian tentang suatu persoalan dari para peserta publik. Dengan adanya spesialisasi maka sifat dari publik ini lebih kritis dan rasional.

Pada publik terdapat ciri-ciri, antara lain adanya minat, tujuan, kegemaran dan kepentingan yang sama. Meskipun ada minat yang sama, tidak berarti bahwa pendapatnya harus sama, akan tetapi dapat juga berlawanan dalam menanggapi suatu persoalan, dengan kata lain ada yang pro ataupun kontra dalam menanggapi suatu

persoalan tertentu. Pada waktu sekarang ini untuk kegiatan publik dalam masyarakat modern dapat dilihat pada kehidupan sehari-hari yaitu disediakannya program-program, baik melalui radio maupun televise ataupun juga rubrik-rubrik yang tersedia dalam surat kabar.

Dalam suatu publik, anggotanya dibedakan atas 3 kelompok yaitu:

1. Kelompok *vested interest,* yaitu kelompok yang merupakan sekumpulan orang-orang yang sudah mempunyai kedudukan-kedudukan tertentu dalam masyarakat dan biasanya bersifat pro, karena ingin mempertahankan keadaan yang sudah ada.
2. Kelompok *new comer*, yaitu kelompok yang merupakan sekumpulan orang-orang yang ingin memperjuangkan kepentingan-kepentingan baru dan ingin pula berusaha merebut suatu kedudukan dalam masyarakat, oleh karenanya kelompok ini sifatnya kontra.
3. Kelompok yang pasif, yaitu kelompok yang merupakan sekumpulan orang-orang yang hanya mempunyai minat saja, akan tetapi belum menentukan pendiriannya terhadap suatu persoalan.

   Dalam publik kelompok inilah merupakan kelompok yang terbesar dan dapat menentukan pendapat terakhir daripada publik, sehingga kelompok ini bertindak sebagai wasit. Oleh karena itulah, kedua kelompok yang telah disebut terdahulu berusaha untuk memengaruhi kelompo ini dengan berbagai cara misalnya dengan cara menggunakan propaganda atau penerangan yang bersifat berat sebelah.

c. Massa

Berbeda dengan *Crowd*, massa merupakan kumpulan orang banyak yang mempunyai kehendak atau pandangan yang sama, tapi tidak berkerumun pada suatu tempat tertentu dan mengikuti kejadian dan peristiwa yang penting dengan alat-alat komunikasi modern seperti halnya publik.

Meskipun massa lebih rasional, akan tetapi kalau dbandingkan dengan publik, maka tingkat kecerdasannya lebih sederhana.

Menurut Leopold Von Wiese, massa dibedakan antara:

1. Massa yang konkret.
2. Massa yang abstrak.

Massa disebut massa yang konkret apabila mempunyai cirri-ciri sebagai berikut:

a. Adanya ikatan batin, karena adanya persamaan kehendak dan pandangan.
b. Adanya persamaan norma-norma, karena orang-orang yang tergabung dalam massa yang konkret ini mempunyai peraturan dan kebiasaan sendiri. Misalnya: massa orpol.
c. Mempunyai struktur yang jelas. Seperti halnya massa orpol dengan sendirinya, maka sudah terbentuk struktur organisasi yang jelas sehingga mengenal pimpinan dan pembagian kerja.
d. Mempunyai potensi yang dinamis, sehingga dapat menimbulkan gerakan massa. Misalnya: gerakan buruh, gerakan pemuda.

Sebaliknya, massa yang abstrak adalah sekadar kumpulan manusia yang belum diikat oleh kesatuan norma, kesatuan emosional dan sebagainya meskipun mereka telah menjadi satu karena adanya dorongan. Jadi, massa yang abstrak merupakan embrio dari massa yang konkret, akan tetapi tidak selamanya demikian tergantung dari situasi dan kondisi di mana massa itu terbentuk bisa juga massa abstrakitu kemudian bubar. Demikian juga halnya dengan massa yang konkret, dalam perkembangannya selalu mengalami kegagalan-kegagalan, sehingga anggotanya menjadi putus asa dan tidak bersemangat lagi untuk berjuang dan akhirnya massa bubar.

BAB IV. NORMA SOSIAL PADA PENGELOLAAN HUTAN

Di dalam masyarakat manusia selalu ada, dan selalu dimungkinkan adanya, apa yang disebut *double reality*. Di satu pihak ada sistem fakta, yaitu system yang tersusun atas segala apa yang senyatanya di dalam kenyataan ada, dan di lain pihak ada system normative, yaitu system yang berada di dalam mental yang membayangkan segala apa yang seharusnya ada.

Sistem fakta dan sistem normative tersebut di atas itu sesungguhnya bukan dua realitas yang identik. Namun, meskipun tidak identik, kedua realitas itu pun sama sekali tidak saling berpisahan. Antara keduanya ada pertalian yang erat; secara timbal balik, yang satu amat memengaruhi yang lainnya.

Pertama-tama, system fakta berfungsi sebagai determinan system normative. Artinya, bahwa apa yang dibayangkan didalam mental sebagai suatu keharusan itu sesungguhnya adalah selalu sesuatu yang di alam kenyataan merupakan sesuatu yang betul-betul ada, dan atau yang mungkin ada. Norma atau keharusan selalu dipertimbangkan dalam kenyataan dan mempertimbangkan pula segala kemungkinan-kemungkinan yang ada di dalam situasi fakta. Orang tidak akan mungkin diwajibkan melakukan tindakan yang tidak akan dikerjakan oleh orang pada umumnya.

Sementaraitu, di lain pihak system normative pun pada gantinya balik memengaruhi system fakta (kenyataan). Di dalam halini, wujud dan bentuk perilaku-perilaku kultural yang di alam kenyatan ditentukan oleh pola-pola cultural yang telah diketahui *apriori* di dalm mental sebagai keharusan-keharusan yang harus dikerjakan. “mengapa perilaku-perilaku pada kenyataannya berhal demikian”, itu lain tidak adalah karena “system dan tertib” normatifnya memang mengharuskan hal dan keadaan yang demikian itu. dengan jalan membebankan keharusan-keharusan yang disebut norma-norma sosial itu, maka secar keseluruhan dapat diwujudkan suatu aktivitas bersama yang tertib yang dapat digerakkan secara efektif kea rah pemenuhan keperluan-keperluan dan hajat-hajat hidup masyarakat.

A. Klasifikasi Norma-Norma Sosial

Ada berbagai macam jenis norma-norma sosial, yang tak selamanya dapat mudah dibedakan satu sama lain. Oleh karena itulah usaha-usaha mengadakan klasifikasi yang sistematis amatlah sukar. Satu di antara usaha-usaha ini mencoba membedakan norma-norma sosial disokong oleh sanksi-sanksi yang tidak seberapa berat serta tak mengancamkan ancaman-ancaman fisik, sedangkan satu golongan lagi berlaku dengan sokongan-sokongan sanksi-sanksi yang berat disertai dengan ancaman-ancaman fisik.

Ada satu pembedaan lagi yang mencoba membedakan norma-norma sosial itu atas dasar cara bagaimana masing-masing norma itu dilahirkan dan berlaku di dalam masyarakat. Ditanyakan, apakah norma-norma itu dilahirkan secara sengaja lewat perundang-undangan, ataukah lahir secara berangsur-angsurtanpa disadari lewat kebiasaan-kebiasaan dan praktik-praktik hidup kemasyarakatan. Namun, cara apapun juga yang ditempuh untuk membedakan norma-norma itu satu sama lain tidaklah selamanya jelas.

Menyadari hal ini para sosiolog umumnya lalu menggolongkan norma-norma itu ke dalam sekian banyak jenis, dengan tetap mengakui bahwa penggolongan yang dilakukan itu adalah penggolongan atau klasifikasi yang kasar-kasaran saja, serta tidak memiliki batas-batas pembedaan yang tegas. Salah satu cara klasifikasi kasar-kasaran ini ialah klasifikasi yang membedakan norma-norma sosial antara lain menjadi apa yang disebut *folkways, mores* dan hukum. Sementara itu hukum masih dibedakan lagi antara yang tertulis dan yang tak tertulis.

1. Folkways

Diterjemahkan menurut arti kata-katanya, *folkways* itu berarti tata cara *(ways)* yang lazim dikerjakan atau diikuti oleh rakyat kebanyakan *(folk).* Di dalam literature-literatur sosiologi, *folkways* dimaksudkan untuk menyebutkan seluruh norma-norma soail yang terlahir dari adanya pola-pola perilaku yang selalu diikuti oleh orang-orang kebanyakan-di dalam hidup mereka sehari-harinya-karena dipandang sebagai suatu hal yang lazim. Demikianlah, maka walaupun *folkways* itu semula memang merupakan sesuatu kebiasaan dan kelaziman belaka (yaitu sesuatu yang terjadi secara berulang-

ulang ajeg di alam realita), namun karena dikerjakan secara berulang-ulang maka berangsur-angsur terasa kekuatannya sebagai hal yang bersifat standar, yang karenanya-secara normative-wajib dijalani.

Folkways yang diikuti dan dikerjakan berulang-ulang sering kali tidak hanya terbatas menjadi kebiasaan-kebiasaan di dalam hal perbuatan-perbuatan lahir saja, tetapi bahkan sampai mendalam menjadi kebiasaan-kebiasaan berpikir. Kebiasaan-kebiasaan demikian ini-apalagi kalau telah manguat-memungkinkan para warga masyarakat saling mengetahui apakah yang akan dilakukan masing-masing di dalam situasi tertentu. Dengan demikian, para warga masyarakat masing-masing akan mendapatkan perasaan kepastian dan perasaan aman bahwa setiap perilakunya-karena mengikuti *folkways* yang berlaku-akan dapat diterima dan dimengerti oleh warga-warga masyarakat lainnya; dan demikian pula sebaliknya, dia akan dapat menerima dan mengerti apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh orang lain.

Sebagaimana halnya dengan norma-norma sosial yang lain, di dalam perannya sebagai sarana pengontrol dan penentu keadaan tertib sosial di alam kenyataan ini, *folkways* pun mengancamkan sanksi-sanksi kepada siapa saja yang tidak menjalaninya. Sanksi-sanksi *folkways* itu relative tidak berat dan sifatnya tidak formal terencana dan teratur; melainkan bersifat informal-seperti misalnya berupa sindiran, pergunjingan atau olok-olok. Bersesuaian benar dengan sifat-sifat folkways, demikian pula sanksi-sanksi folkways selalu dijatuhkan berdasarkan kelaziman pula. Setiap pelanggaran normalnya selalu dihadapi oleh suatu standar prosedur (informal) tertentu-yang telah lazim diikuti-untuk menghukum pelanggaran tersebut. Walaupun lunak dan informal sifatnya, sanksi-sanksi terhadap pelanggaran *folkways* itu bisa bersifat kumulatif. Jika suatu norma *folkways* tertentu terus-menerus dilanggar oleh seseorang tertentu, maka sanksi yang dikenakan akan bertambah berat. Begitu pula halnya apabila satu orang tertentu sampai berani melanggar berbagai macam norma *folkways* secara terus menerus. Seperti telah dikatakan di atas, orang pasti akan tersisih dari kontak-kontak sosial apabila dia di dalam segala hal menyimpang dan melanggar ketentuan-ketentuhan norma *folkways*.

Folkways kebanyakan dianut orang di dalam batas-batas kelompok tertentu. ancaman-ancaman sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran *folkways* pun hanya akan datang dari kelompok-kelompok tertentu itu saja. Oleh karena itu, maka sanksi-sanksi informal yang mempertahankan *folkways* sering kali terbukti tidak efektif kalau ditunjukkan kepada orang-orang yang tidak menjadi warga penuh dari kelompok pendukung *folkways* itu.

2. Mores

Kesamaan *mores* dan *folkways* terletak pada kenyataan bahwa kedua-duanya tidak jelas asal-usulnya, terjadi tidak terencana. Dasar eksistensinya pun tidak pernah dibantah, dan kelangsungannya-karena didukung tradisi-relatif amatlah besar. Kesamaan lain ialah bahwa kedua-duanya dipertahankan oleh sanksi-sanksi yang bersifat informal dan komunal, berupa sanksi spontan dari kelompok-kelompok sosial di mana kaidah-kaidah tersebut hidup. Walaupun ada kesamaan-kesamaan antara *folkways* dan *mores*, namun *mores* selalu lebih dipandang sebagai bagian dari hakikat kebenaran. *Mores* adalah segala norma yang secara moral dipandang benar. Pelanggaran terhadap *mores* selalu dikutuk sebagi sesuatu hal yang secara moral tidak dapat dibenarkan. *Mores* tidak memerlukan dasar pembenaran, karena *mores* itu sendiri adalah sesuatu yang sungguh-sungguh telah bernilai benar. *Mores* tidak bisa diganggu gugat untuk diteliti benar tidaknya; sedangkan folkways-di lain pihak-benar tidaknya masih agak leluasa untuk diperbantahkan.

Mores sering dirumuskan di dalam bentuk negative, berupa sebuah larangan keras. *Mores* yang dirumuskan di dalm bentuk larangan ini disebut tabu. Sementara itu, sebagian *mores* lagi mengkaidahi secara umum sejumlah hubungan-hubungan sosial di dalam situasi-situasi umum, misalnya: keharusan berlaku jujur, keharusan bersikap ksatria, keharusan bekerja rajin dan sebagainya. Jadi, kita tidak hanya dapat menemui *mores* yang sifatnya spesifik (yaitu *mores* yang mengatur keharusan perilaku-perilaku tertentu), akan tetapi juga *mores* yang sifatnya umum, yang mengharuskan adanya penataan secara mutlak terhadap norma *mores* tertentu, oleh siapapun dan pada situasi bagaimanapun juga.

3. Hukum

Apakah *folkways* dan *mores* saja telah cukup memadai sebagai kekuatan-kekuatan yang dapat mengatur serta menjamin keadaan tertib masyarakat? dengan kata lain, apakah masih diperlikan norma-norma jenis lain (tegasnya: hukum!) unyuk pula mengatur tertibnya masyarkat?

Adalah suatu kenyataan bahwa tidak semua masyarakat dapat menegakkan ketertiban secara apa yang dilakukan dalam masyarakat-masyarakat kecil dan terisolasi seperti itu. Pada, kebanyakan masyarakat, di samping adanya *folkways* dan *mores*, diperlukan pula adanya segugus kaidah yang lain, yang lazim disebut hukum, untuk menegakkan keadaan tertib sosial. Berbeda halnya dengan *folkways* dan *mores,* pada hokum didapati adanya organisasi-politik khusunya, yang secara formal dan berprodesur bertugas memaksakan ditaatinya kaidah-kaidah sosial yang berlaku. Inilah organisasi yang lazim dikenal dengan nama badan peradilan. apabila suatu mores memerlukan kekuatan organisasi peradilan semacam itu agar penataannya bisa dijamin, maka segera itu pula *mores* itu tak lain adalah kaidah-kaidah yang tak tertulis, maka hukum yang dijadikan dari *mores* dengan ditunjang oleh wibawa suatu struktur kekuasaan politik ini pun lalu merupakan hokum yang tak tertulis (atau lazim dinamakan hukum, adat, *customary law*).

Dapatlah dikatakan bahwa dibandingkan dengan folkways dan mores, hukum tertulis itu adalah jauh lebih terpikir dan lebih terlafalkan secara tegas. Hukum tertulis betul-betul merupakan hasil suatu perencanaan dan pikiran-pikiran yang sadar. Walaupun mungkin pula bertumpu pada jiwa dan semangat mores lama yang telah ada sehingga karenanya memperoleh pula pentaatan yang spontan dari warga masyarakat hukum tertulis melaksanakan fungsinya secara lebih lanjut. Yaitu, dalam bentuk memberikan pelafalan-pelafalan yang lebih tepat dan tegas kepada sementara mores yang ada, serta demi pelaksaannya memberikan kekuatan-kekuatan formal kepadanya.

4. Nilai

Menurut Horton dan Hunt (1987), nilai adalah gagasan mengenai apakah suatu pengalaman itu berarti atau tidak berarti. Nilai pada hakiaktnya mengarahkan perilaku dan pertimbangan seseorang, tetapi ia tidak manghakimi apakah sebuah perilaku tertentu itu salah atau benar.

Nilai adalah suatu bagian penting dari kebudayaan. Suatu tindakan dianggap sah artinya secara moral dapat diterima kalau harmonis dengan nilai-nilai yang disepakati dan dijunjung oleh masyarakat di mana tindakan itu dilakukan. Ketika nilai yang berlaku menyatakan bahwa kesalehan beribadah adalah sesuatu yang harus dijunjung tinggi, maka bila ada orang yang malas beribadah tentu akan menjadi bahan pergunjingan. Sebaliknya, bila ada orang yang dengan ikhlas rela menyumbangkan sebagian hartanya untuk kepentingan ibadah atau rajin amal dan semacamnya, maka ia akan dinilai sebagai orang yang pantas dihormati dan diteladani.

BAB V. PRANATA SOSIAL PENGELOLAAN HUTAN

A. Pengertian Pranata Sosial

Menurut Koentjaraningrat (1979) yang dimaksud dengan pranata-pranata sosial adalah system-sistem yang menjadi wahana yang memungkinkan warga masyarakat itu untuk berinteraksi menurut pola-pola resmi atau suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.

Pranata sosial pada hakikatnya bukan merupakan sesuatu yang bersifat empirik, karena sesuatu yang empirik unsur-unsur yang terdapat di dalamnya selalu dapat dilihat dan diamat-amati. Sedangkan pada pranata sosial unsure-unsur yang ada tidak semuanya mempunyai perwujudan fisik. Pranata sosial adalah sesuatu yang bersifat konsepsional, artinya bahwa eksistensinya hanya dapat ditangkap dan dipahami melalui sarana pikor dan hanya dapat dibayangkan dalam imajinasi sebagai suatu konsep atau konstruksi pikor.

Walaupun ada juga yang tetap berpendapat bahwa pranata sosial itu sesungguhnya merupakan sesuatu yang bersifat empirik. Alasan yang dikemukakan ialah, bahwa unsur-unsur pranata sosial, khusunya perilaku-perilaku individu ketika melaksanakan hubungan dengan sesamanya selalu dapat dilihat atau diamati. Benar tidaknya anggapan konseptual yang demikian ini terlebih dahulu harus diingat bahwa manusia-manusia di dalam kelompok atau pranata sosial itu hanyalah sebagai pelaksana fungsi atau pelaksana kerja dari unsure saja .sehingga dalam kenyataannya mereka itu bisa dating atau pergi dan diganti oleh orang lain tanpa mengganggu eksistensi dan kelestarian dari pranata sosial. Oleh karena itu sesungguhnya di dalam pranata sosial yang menjadi unsure-unsurnya bukanlah individu-individu manusianya itu, akan tetapi kedudukan-kedudukan yang ditempati oleh para individu itu beserta aturan tingkah lakunya. Dengan demikian pranata sosial merupakan bangunan atau konstruksi dari seperangkat peranan-peranan dan aturan-aturan tingkah laku yang terorganisir. Aturan tingkah laku tersebut dalam kajian sosiologi sering disebut dengan istilah norma-norma sosial.

B. Tujuan dan Fungsi Pranata Sosial

Diciptakan pranata sosial pada dasarnya mempunyai maksud serta tujuan yang secara prinsipil tidak berbeda dengan norma-norma sosial, karena pranata sosial sebenarnya memang produk dari norma sosial.

Secara umum, tujuan utama diciptakannya pranata sosial, selain untuk mengatur agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai, juga sekaligus untuk mengatur agar kehidupan sosial warga masyarakat bisa berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Contoh: pranata keluarga mengatur bagaimana keluarga harus memelihara anak. Sementara itu, pranata pendidikan mengatur bagaimana sekolah harus mendidik anak-anak hingga menghasilkan lulusan yang andal. Tanpa adanya pranata sosial, kehidupan manusia nyaris bisa dipastikan bakal porak-poranda karena jumlah prasarana dansarana untuk memenuhi kebutuhan manusia relative terbatas, sementara jumlah warga masyarakat yang membutuhkan justru semakin lama semakin banyak.

Untuk mewujudkan tujuannya, menurut Soerjono Soekanto (1970), pranata sosial di dalam masyarakat dengan demikian harus dilaksanakan fungsi-fungsi berikut:

1. Memberi pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana bertingkah laku atau bersikap di dalam usaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dengan demikian pranata sosial yang dapat harus dipergunakan berbagai aturan atau kaidah-kaidah sosial yang dapat harus dipergunakan oleh setiap anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan atau disintegrasi masyarakat. Hal ini mengingat bahwa sumber pemenuhan kebutuhan hidup yang dapat dikatakan tidak seimbang dengan jumlah mausia yang semakin bertambah baik kuantitas maupun kualitasnya, sehingga dimungkinkan pertentangan yang bersumber pada perebutan maupun ketidak adilan dalam usaha memenuhi kebutuhannya akan ancaman kesatuan dari warga masyarakat. Oleh karena itu, norma-norma sosial yang terdapat di dalam pranata sosial akan berfungsi untuk mengatur pemenuhan kebutuhan hidup dari setiap warganya secara adil atau memadai, sehingga dapat terwujudnya kesatuan yang tertib.

3. Berfungsi untuk memberikan pegangan dalam mengadakan system pengendalian sosial (social control). Sanksi-sanksi atas pelanggaran norma-norma sosial merupakan sarana agar setiap warga masyarakat tetap conform dengan norma-norma sosial itu, sehingga tertib sosial dapat terwujud. Dengan demikian sanksi yang melekat pada setiap norma sosial itu merupakan pegangan dari warga untuk meluruskan maupun memaksa warga masyarakat agar tidak menyimpang dari norma sosial, karena pranata sosial akan tetap di tengah kehidupan masyarakat.

C. Tipe-Tipe Pranata Sosial

1. Tingkat Kompleksitas Penyebarannya

Dengan mendasarkan diri pada tingkat kompleksitas penyebarannya itu maka pranata sosial dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk, yaitu:

a. *General social institutions*
b. *Restricted social institutions*

General Social Institutions

Sesuai dengan namanya, maka pranata sosial ini dapat dikatakan hampir terdapat di setiap bentuk masyarakat, sehingga bersifat universal. Dari, kenyataan yang demikian membuktikan bahwa pranata sosial mempunyai nilai yang tinggi dalam kehidupan masyarakat terutama untuk kelangsungan hidupnya. Luasnya jangkauan penyebaran pranata sosial yang demikian ini berarti dikenal, diakui dan diterimanya pranata sosial itu oleh sebagian besar atau bahkan oleh seluruh umat manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pranata sosial jenis ini merupakan wahana atau tempat dari berbagai pranata sosial sejenis yang relative lebih kecil, karenanya sifat dari pranata sosial yang demikian ini dapat dikatakan netral, umum, atau tidak memihak terhadap komponen atau unsure-unsur yang terdapat di dalamnya. Seperti agama, adalah merupakan salah satu contoh dari pranata sosial yang bersifat universal atau umum-yang menghimpun dari berbagai macam agama tertentu, tanpa memihak terhadap sakah satu agama tertentu tersebut. Pranata sosial yang bersifat universal ini mempunyai tingkat kompleksitas yang relative lebih luas dan banyak dibandingkan dengan pranata yang bersifat khusus.

Restricted Social Institutions

Pranata sosial ini pada umumnya mempunyai corak yang khas atau khusus dalm kehidupan masyarakat. Kenyataan ini dipengaruhi oleh kaidah-kaidah serta peranan-peranan yang terdapat di dalam pranata itu mempunyai kekhususan. Karena sifat yang demikian, maka pola penyebarannya relative lebih terbatas disbanding dengan pranata yang umum. Hal ini juga disebabkan oleh relative lebih kecilnya kepentingan serta terbaginya minat warga ke dalam pranata lain yang bercorak khusus. Oleh karena itu, pranata ini daya jangkauannya hanya terbatas pada kelompok, kelas ataupun golongan tertentu saja, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa seorang warga dapat melakukan perpindahan dari satu pranata sejenis yang khusus ini ke pranata yang lain. Seperti telah dikemukakan terdahulu, bahwa pranata sosial yang bersifat umum misalnya adalah agama, sedang pranata sosial yang khusus adalah agama tertentu, Yaitu Isla'm, Kristen Katholik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan lain sebagainya.

2. Orientasi Nilainya

Seperangkat kaidah sosial yang terkandung di dalam setiap pranata sosial yang mempunyai arti penting atau nilai di dalam kehidupan masyarakat. Namun, mengingat kaidah sosial itu pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkatan yang bersifat hierarkis, maka nilai-nilai dari kaidah tersebut juga dapat dikelompokkan ke dalam kategori pokok dan kurang pokok. Berdasarkan klasifikasi nilai yang demikian ini maka dari segi orientasi nilainya, pranata sosial dapat digolongkan sebagai berikut:

a. *Basic social institutions.*
b. *Subsidiary social institutions.*

Basic Social Institutions

Pranata sosial yang bersifat dasar atau utama ini harus ada dalam kehidupan masyarakat, karena terdiri dari kaidah sosial yang memiliki nilai sangat pokok atau utama bagi kelangsungan kehidupan masyarakat. Seperti kaidah yangmengatur pemenuhan hajat hidup manusia, mempunyai nilai paling utama, oleh karena itu pranata sosial yang mengaturnya pun bersifat primer.

Primernya suatu pranata sosial sangat dipengaruhi oleh pentingnya kaidah yang mempunyai nilai sangat tinggi untuk menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat,

sehingga apabila dalam kehidupan masyarakat tidak terdapat pranata sosial yang bersifat primer ini maka kelangsungan hidup manusia akan terancam. Sebab apabila tidak ada pranata sosial yang primer berarti tidak ada kaidah sosial yang mengatur pemenuhan kebutuhan pokok hidup manusia secara tertib dan teratur. Dengan demikian, ketidaktertiban pemenuhan hajat hidup itu disebabkan oleh tidak adanya norma sosial yang sekaligus tidak adanya sanksi, sehingga sewajarnyalah apabila individu yang mempunyai kemampuan lebih dari yang lain akan mendominasi pihak yang lemah.

Subsidiary Social Institutions

Pranata sosial sekunder disukung oleh kaidah sosial yang nilai-nilainya dianggap kurang penting untuk menunjang kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, jika di dalam kehidupan masyarakat tidak menggunakan pranata sekunder tidaklah memengaruhi kelangsungan kehidupannya. Sehingga pengunaan pranata ini hanya merupakan tambahan untuk memperoleh kenikmatan dalam hidup.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa ada masyarakat tertentu di suatu saat dan tempat tertentu, mempunyai anggapan terhadap pranata sosial sekunder itu sebagai pranata primer. Hal ini di antaranya dipengaruhi oleh perubahan struktur masyarakat dan kemampuan pranata sekunder untuk mangait terhadap pranata primer. Misalnya dalam kehidupan masyarakat yang sudah maju, terdapat beberapa kebutuhan sekunder yang kegiatannya dikaitkan dengan kegiatan primer. Seperti untuk dapat memperoleh kesehatan, rasa keindahan, rasa seni, dan pengembangan diri secara bertahap dikaitkan dengan kegiatan ekonomi. Suatu contoh yang paling mudah kita kenali adalah bahwa kebutuhan pendidikan dalam kehidupan yang bersifat sekunder. Karena dengan memperoleh pendidikan, maka individu yang bersangkutan akan ditempatkan oleh masyarakat pada posisi sosial, ekonomi dan politis tertentu.

D. Pranata Ekonomi

Pranata ekonomi lahir ketika orang-orang mulai mengadakan pertukaran barang secara rutin, membagi-bagi tugas dan mengakui adanya tuntutan dari seseorang terhadap orang lain (Horton dan Hunt,1987:364).

Ketika manusia masih hidup secara tradisional dengan cara mengumpulkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, kebutuhan akan adanya pranata ekonomi yang mengatur pola perdagangan masih belum mendesak dan tidak penting. Tiap-tiap keluarga umum-nya bisa memenuhi kebutuhannya secara subsisten dari hasil usahanya sendiri, sehingga kemungkinan persinggungan dengan kepentingan orang lain nyaris tak ada. Tetapi,lain soal ketika orang-orang lain mulai membutuhkan sesuatu dari orang lain, seperti tetangga maupun kerabatnya. Desakan akan kebutuhan barang-barang di luar apa yang dimilikinya menyebabkan warga masyarakat disadari atau tidak mulai merasa perlu untuk mengatur proses pertikaran menurut kaidah-kaidah tertentu yang disepakati bersama. Pada masyarakat seperti inilah proses pertukaran barang kemudian distandarisasi, diatur, bisa diramalkan dan dianggap perlu untuk segera dilembagakan.

Kaidah yang mengatur masalah produksi, distribusi, pemakaian barang dan jasa yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia itulah dalam terminology sosiologi disebut pranata ekonomi. Dengan kata lain, pranata ekonomi adalah sarana yang distandarisasi untuk memelihara ketertiban dalam proses produksi dan distribusi barang serta jasa. Menurut Jonathan M. Turner, yang dimaksud pranata ekonomi adalah sekelompok status sosial, norma umum dan peran relative stabil dan saling berhubungan di sekitar pengumpulan sumber-sumber daya produksi dan distribusi barang serta jasa. Proses produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa yang makin penting dan berbelit-belit adalah faktor utama yang melatar belakangi meunculnya pranata ekonomi.

1. Elemen Dasar Proses dan Struktur Ekonomi

Struktur pranata ekonomi pada dasarnya bervariasi dalam berbagai masyarakat-bisa sederhana, bisa pula rumit-tergantung kepada: (1) elemen dasar proses ekonomi yang ada; (2) faktor-faktor ynag menentukan struktur pranata ekonomi.

Secara garis besar, beberapa faktor yang menentukan struktur pranata ekonomi, adalah:

a. Gathering atau pengumpulan adalah proses pengumpulan barang atau sumber daya alam dari lingkungannya. Apa dan berapa banyak yang dikumpulkan merupakan pencerminan dari tingkat teknologi, tingkat modal, sifat tenaga kerja dan kemampuan masyarakat mengorganisasi elemen-elemen tersebut.

b. Production atau produksi adalah proses mengubah sumber daya alam menjadi barang-barang atau komoditi tertentu sehingga dapat digunakan oleh subsistem lainnya.
c. Distributing atau distribusi adalah proses pembagian barang dan komoditi pada subsistem-subsistem lainnya.
d. Servicing atau jasa organisasi dari elemen-elemen ekonomi yang tidak tercakup dalam proses produksi, tetapi diperlukan untuk menunjang proses ekonomi lainnya. Misalnya, bank.

Sementara itu, yang dimaksud elemen-elemen ekonomi yang memengaruhi variasi struktur pranata ekonomi, adalah:

Tanah. Di samping luas tanah, kualitas, atau produktivitas, tanah merupakan indicator untuk menetukan besarnya produksi dan pendapatan yang bakal diperoleh pemilik atau pengelola tanah itu.

Tenaga Kerja. Tenaga kerja adalah elemen proses ekonomi yang peranan dalam proses produksi. Menurut Kay, (1981), tenaga kerja terdiri dari dua unsure, yaitu jumlah dan kualitas. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk proses produksi dipenuhi dari tenaga kerja keluarga yang tersedia maupun dari luar keluarga. Sedangkan kualitas tenaga kerja tergantung dari keterampilan, kondisi fisik, pengalaman dan latihan. Di lingkungan masyarakat agraris, rendahnya produktivitas tenaga kerja erat kaitannya dengan kualitas manusia itu sendiri. Tingkat pendidikan yang rendah, kekurangan gizi, dan sebagainya adalah factor yang menyebabkan rendahnya produktivitas usaha dan pendapatan yang diterima petani.

Modal. Dalam pengertian ekonomi modal adalah barang atau uang yang bersama-sama elemen proses ekonomi lain-terutama tanah da tenaga kerja –menghasilkan barang-barang baru. Di lingkungan masyarakat pedesaan, usaha penciptaan modal biasanya dilakukan melalui dua cara, yakni: (1) dengan cara menyisihkan kekayaan atau sebagian hasil produksinya untuk disimpan dan diinvestasikan kembali; (2) melalui pinjaman atau kredit dari berbagai sumber dana yan ada (Suyanto,et.al, 2002).

Teknologi. Secara umum yang dimaksud teknologi ialah pengetahuan tentang dunia dan lingkungan yangada dalam kebudayaan suatu masyarakat. Di dalam masyarakat yang makin modern, kedudukan teknologi makin lama makin dominan dan penting-

kendati dalam beberapa hal teknologi sering menimbulkan alienasi (keterasingan) pada manusia.

Kewiraswastaan. Kewiraswastaan adalah struktur dan proses dalam masyarakat yang meningkatkan organisasi dan integrasi elemen-elemen dasar dalam proses ekonomi. Kewiraswastaan sedikit-banyak sama dengan keterampilan manajemen. Kemampuan memutuskan seberapa banyak pupuk yang digunakan, bagaimana mengatur pemasaran, biaya produksi, dan sebagainya adalah termasuk ke dalam bagian keterampilan manajemen.

2. Perkembangan Masyarakat Dan Tipe Pranata Ekonomi

Tingkat keragaman dalam kehidupan sosial manusia adalah fenomena umum yang telah diketahui banyak pihak. Sebagian masyarakat terorganisasi secara sederhana dan kecil; sementara sebagian yang lain besar dan sangat kompleks perkembangan dan pembagian kerja masyarakat, semakin rumit dan lengkap pranata ekonomi yang berlaku.

Berikut ini akan diuraikan sejarah perkembangan masyarakat dan tipe pranata ekonomi yang berlaku. Secara rinci, beberapa masyarakat yang dibahas adalah:

a. Masyarakat pencari makanan dan pemburu;
b. Masyarakat hortikultura;
c. Masyarakat prakapitalis;
d. Masyarakat kapitalis; dan
e. Masyarakat sosialis.

a. Masyarakat Pencari Makanan dan Pemburu

Menurut sejarahnya, awal kehidupan manusia adalah kelompok masyarakat pencari makanan (food gathering)-seperti buah, sayur, akar, ubi-pemburu binatang serta berusaha hidup dari menangkap ikan (hunting and fishing). Kehidupan masyarakat tersebut berada dalam kekuasaan alam karena teknologi dan pengetahuan tentang bagaimana mengontrol lingkungan masih relative rendah.

Pada masyarakat taraf ini, keluarga dan komunitas kelompok merupakan suatu kesatuan penting, baik dalam produksi maupun konsumsi. Pembagian kerja antar-

anggota keluarga dan kelompok dalam masyarakat pencari makan dan berburu umumnya diatur menurut perbedaan jenis kelamin.

Kaum pria-dengan kekuatan ototnya yang lebih ungul dari kaum wanita-bertugas berburu binatang , sedangkan kaum wanita bertugas memasak dan mengasuh anak. Kalaupun kaum wanita ikut terlibat dalam usaha mengumpulkan bahan makanan, biasanya terbatas pada usaha mencari tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang notabene tidak seberat pekerjaan berburu binatang yang dilakukan kaum pria. Terkadang kaum wanita juga ikut berburu binatang atau memasang perangkap, tetapi terbatas pada jenis yang relative kecil.

Di tingkat kelompok, kegiatan ekonomi yang telah melembaga adalah dalam hal pembagian makanan. Kehidupan ekonomi masyarakat ini bersifat familistik. Sering terjadi kaum laki-laki dalam kelompok masyarakat yang masih tergolong primitive ini merupakan mengadakan perburuan bersama secara besar-besaran. Hasil perburuan bersama itulah yang kemudian dibagi-bagi kepada semua anggota kelompok. Tiap-tiap rumah tangga berhak dan diakui untuk memperoleh bagian dari hasil perburuan bersama yang dilakukan. Seseorang yang memperlihatkan keberanian dan ketangkasan dalam berburu tidak memperoleh bagian yang lebih dari yang lain-kecuali berupa nama harum dan gengsi pribadi.

b. Masyarakat Hortikultura

Kendati masyarakat pemburu mungkin sudah mengenal bagaimana cara menjinakkan binatang liar dan bercocok tanam, tetapi mereka muali hidup menetap di desa-desa dan mempratikkan pertanian belum lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Kepandaian menjinakkan binatang liar biasanya dilakukan kaum pria, sedangkan kepandaian bercocok tanam banyak dilakukan oleh kaum wanita.

Masyarakat hortikultura sederhana pada perkembangan berikutnya tumbuh menjadi masyarakat hortikultura intensif. Pada taraf ini, mereka tak sekadar mempratikkan sistem ladang berpindah, tetapi mereka telah mempratikkan penggunaan semacam humus dan pupuk kandang. Kebanyakan masyarakat hortikultura telah mengenal cangkul untuk mengolah tanah. (Boserup, 1965:24). Masyarakat hortikultura intensif sangat produktif dalam memamfaatkan tanah. Mereka telah menghasilkan surplus ekonomi yang nyata dan membagi hasil kelebihan yang dimilikinya itu kepada

anggota kelompok lain yang tidak terlihat dalam produksi pertanian. Contoh masyarakat hortikultura intensif adalah penduduk Tahiti Aborigin. Pada masyarakat hortikultura peran pasar mulai menonjol . Pasar merupakan tempat untuk tukar-menukar surplus produksi warga masyarakat.

c. Masyarakat Kapitalis

Di dalam masyarakat agraris tenaga kerja yang terlibat dalam sector pertanian jumlahnya besar. Pada masyarakat taraf ini mulai dikenal system sewa tanah. Pada masyarakat agraris, polarisasi sosial ekonomi masyarakat terlihat mencolok di mana pihak yang menjadi elite adalah para bangsawan yang umumnya sekaligus sebagai tuan tanah.

Di dalam masyarakat taraf ini, mulai dikenal apa yang disebut tanah pribadi. Struktur ekonomi masyarakat terpilah ke dalam dua kelas dominan, yakni kelompok kecil pemilik tanah atau tuan tanah dengan sekelompok besar sisanya sebagai petani atau buruh tani. Kedudukan antara tuan tanah dan petani sangat tidak seimbang. Petani harus bekerja pada tuan tanah di tanah pribadinya, sementara di lain pihak petani juga harus membayar upeti . Misalnya, petani wajib memberikan hasil-hasil pertanian tertentu dan membayar bea, seperti penggunaan alat pemeras anggur, tungku pemanas, atau penggilingan.

Pranata ekonomi yang berkembang pada masyarakat prakapitalis ini adalah feodalisme. Menurut Horton dan Hunt (1987), yang dimaksud dengan feodalisme adalah seperangkat lembaga ekonomi dan politik yang berkembang di dalam masyarakat yang mengalami peralihan dari masyarakat suku ke masyarakat bangsa-yang didasarkan atas sejumlah hak dan kewajiban timbal-balik.

BAB VI. STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT LOKAL DALAM PENGELOLAAN HUTAN

Struktur sosial menurut Selo Soemardjan dan Soelaman Soemardi adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial pokok, yaitu kaidah-kiadah sosial (norma-norma sosial), lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, serta lapisan-lapisan sosial. Di antara struktur sosial yang ada, yang menonjol adalah lapisan-lapisan sosial atau stratifikasi sosial. Untuk hal yang terakhir ini akan dibahas dalam bagian berikutnya.

Stratifikasi sosial dapat didefinisikan sebagai perbedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya. Status yang dimiliki seseorang dibedakan lagi antara status yang diperoleh (ascribed status) dan status yang diraih (achieved status). Status yang diperoleh misalnya perbedaaan usia, perbedaan jenis kelamin, hubungan kekerabatan dan keanggotaan dalam kelompok seperti kasta dan kelas sosial.

Berbeda dengan itu, status sosial yang diraih adalah status sosial yang diperoleh seseorang karena prestasi kerja yang diperolehnya. Seorang anak petani karena prestasinya dalam bidang ilmu pengetahuan berhasil menempatkan diri pada status sosial yang tinggi karena prestasi akademiknya yang tinggi, professor, misalnya.

Pitirim A. Sorokin mengatakan bahwa stratifikasi sosial adalah pembedaan/pengelompokan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang bertingkat (hierarkis), kelas tinggi, menengah dan rendah. Pemilikan terhadap sesuatu yang berharga merupakan bibit yang menimbulkan adanya system berlapis-lapis dalam masyarakat. Sesuatu yang berharga itu dapat berupa benda ekonomis dan nonekonomis. Pemilikan tanah, rumah, mobil, deposito dan lain-lain adalah benda-benda ekonomis. Akan tetapi, kekuasaan, ilmu, pengetahuan, kesalehan dalam beragama, keturunan keluarga terhormat adalah benda-benda yang nonekonomis.

Bentuk-bentuk Stratifikasi sosial. Menurut Ralph Lipton stratifikasi sosial terdiri dari:

Pertama, stratifikasi sosial berdasarkan usia. Stratifikasi ini sangat menetukan hak dan wewenang dari mereka yang menjadi anak sulung dan yang bukan. Dalam system kerajaan Inggris misalnya, anak sulung memiliki hak untuk menjadi putra mahkota menggantikan kedudukan raja di kemudian hari.

Kedua, stratifikasi jenis kelamin. Startifikasi ini menentukan hak dan wewenang antara anak laki-laki dan perempuan. Dalam masyarakat yang menganut system patriarkat, anak laki-laki mempunyai wewenang yang lebih besar untuk mewarisi kekayaan orang tua. Sebaliknya, dalam system kemasyarakatan matrilineal, wanita memiliki hak yang lebih luas dibandingkan laki-laki.

Ketiga, stratifikasi berdasarkan hubungan kekerabatan. Stratifikasi ini menetukan hak dan wewenang dari seseorang ayah, ibu, paman dan anak serta keponakan dalam kehidupan keluarga.

Keempat, stratifikasi berdasarkan keanggotaan dalam masyarakat. stratifikasi yang berhubungan dengan etnis, agama dan golongan dalam masyarakat. Stratifikasi ini bersifat horizontal.

Kelima, stratifikasi ini berdasarkan pendidikan. Stratifikasi berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang. semakin tinggi pendidikan yang dimilikinya, semakin tinggi kedudukan sosial seseorang.

Keenam, stratifikasi berdasarkan pekerjaan. Stratifikasi ini tergantung jabatan seseorang dalam pekerjaan. ada yang berkedudukan sebagai manajer dan ada yang berkedudukan sebagai pekerja biasa saja.

Ketujuh, stratifikasi berdasarkan tingkat perekonomian yang dimiliki seseorang. Ada yang berkedudukan sebagai kelas atas, menengah dan ada yang kelas bawah.

Stratifikasi sosial terdiri dari tiga dimensi, yaitu:

1. Dimensi ekonomi: kaya, kelas menengah dan miskin;
2. Dimensi kehormatan: kelas bangsawan dan rakyat jelata; dan
3. Dimensi kekuasaan: *ruler dan the ruled*; sebab terjadinya stratifiasi sosial.
   a) Imbalan bagi status yang dimilikinya; imbalan bagi seorang manajer beda dengan imbalan yang diterima seorang buruh harian;
   b) Pembagian kerja: memungkinkan perbedayaan kekayaan, kekuasaan prestise seseorang;
   c) Ketidaksamaan (*inequality*) dalam bidang ekonomi kekuasaan dan prestise.

Tentang kelas sosial Peter L. Berger dan Jefries berbeda pendapat. Kelas sosial adalah suatu tipe stratifikasi di dalam suatu posisi umum dalam masyarakat yang secara mendasar ditentukan oleh criteria ekonomi. Akan tetapi, Jefries mengatakan

kelas sosial merupakan kelompok sosial dan ekonomi yang ditentukan oleh persekutuan ikatan ekonomi, pekerjaan dan pendidikan.

Pelapisan sosial terjadi dalam dua proses, yaitu:

1. System pelapisan yang terjadi dengan sendirinya, dan
2. Pelapisan sosial yang dibuat dengan sengaja. Yang pertama terjadi seiring dengan perkembangan masyarakat. Kadang masyarakat tidak menyadarinya. Pelapisan ini terjadi berdasarkan:
   a. Tingkat usia. Orang sebaya cenderung berkelompok;
   b. Jenis kelamin: kelompok pria dan wanita mengelompok pada jenis kelaminnya;
   c. Kepandaian: orang pandai biasanya menjadi panutan masyarakat sehingga muncul sikap hormat kepada mereka;
   d. Karisma dan wibawa. Karisma dan wibawa membuat orang dihargai dan dihormati dalam masyarakat dan memungkinkan mereka menjadi pemimpin dalam masyarakat,
   e. Harta kekayaan: orang yang memiliki harta kekayaan yang banyak cenderung dibedakan dengan mereka yang tidak kaya.

Berbeda dengan itu, system pelapisan yang dibentuk sengaja adalah system pelapisan yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang resmi dalam organisasi-organisasi formal seperti: pemerintahan, partai politik dan lain-lain. Biasanya ada pengangkatan, peresmian pemberian tanda jasa, lambing dan kedudukan, kekuasaan dan wewenang.

Stratifikasi sosial bisa dibedakan antara stratifikasi yang dibentuk secara sengaja seperti kasta dan stratifikasi sosial yang terjadi secara alamiah. Dalam masyarakat yang mengenal system kasta, manusia dibedakan berdasarkan kelahirannya. Di sini orang tidak lagi berbicara tentang kemampuan dan keahlian yang dimiliki seseorang. Status sosial seseorang yang dipatok berdasarkan kelahirannya. Seseorang ditempatkan pada masyarakat kasta atas (brahmana, misalnya) terutama karena secara kebetulan ia lahir dari kelas itu. Sekalipun ia ditempatkan pada masyarakat kasta atas, tidak berarti kemampuan dan keahliannya lebih tinggi dari individu yang berasal dari kelas bawah. Dengan demikian, stratifikasi sosial seseorang secara sengaja dibentuk oleh mereka menciptakan kelompok-kelompok dalam masyarakat

sedemikian sehingga hanya mereka yang dekat atau berhubungan erat dengan sang penguasa saja yang menempati kasta atas. Akan tetapi, stratifikasi sosial yang terjadi secara alamiah terjadi karena individu-individu memiliki kemampuan dan keahlian yang dapat membedakan dirinya dengan individu yang lain. Seseorang ditempatkan pada masyarakat kelas atas (dalam bidang ekonomi) misalnya terjadi karena ia mempunyai keahlian dan kemampuan yang lebih dari anggota masyarakat lain. Demikian seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan memiliki status sosial yang tinggi dalam masyarakat karena kepandaiannya.

Analisis masyarakat dari sudut pandang stratifikasi sosial sangat bermamfaat bagi kita untuk memahami sebab-sebab terjadinya kemiskinan di masyarakat, atau untuk memahami mengapa terjadi kemiskinan di Negara berkembang. Kemiskinan structural merupakan suatu wacana sosial ekonomi yang penting. Para ahli mencoba memahami sebab-sebab terjadinya kemiskinan structural. Kemiskinan structural terjadi karena distribusi factor-faktor ekonomi yang tidak merata di masyarakat. Di sini kemiskinan tidak lagi disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang tetapi karena ketidakberdayaan seseorang dalam menghadapi struktur kekuasaan yang ada. Penguasa mendistribusikan factor-faktor ekonomi yang tidak merata. Ada yang menguasai areal pertanahan yang luas, sementara itu ada yang kurang atau bahkan tidak memilikinya sama sekali. Kelompok yang tidak memiliki tanah, otomatis menjadi kelompok yang miskin.

Analisis struktur juga sangat bermanfaat bila kita ingin memahami struktur perekonomian dunia yang ditandai oleh adanya negara maju, negara sedang berkembang dan negara miskin. Ahli-ahli ekonomi dari Amerika latin seperti Andre Gunderfrank, Johan galtung, Samir amin, Hendri Cardoso adalah ahli-ahli yang berpendapat bahwa kemiskinan di negara berkembang terutama terjadi karena adanya eksploitasi Negara maju terhadap negara berkembang. Imanuel Wellerstein dalam tulisannya “The World System” membagi negara atas negara pusat (*centre state*), semi pinggiran (*semi periphery state*) dan negara pinggiran (*periphery state*). Negara pusat mengeksploitasi negara pinggiran.

Analisis struktur juga bermanfaat bagi kita dalam memahami gejala *patron-client* dalam kehidupan ekonomi. Gejala *patron-client* dalm kehidupan ekonomi terjadi karena

client mendapat kemudahan-kemudahan dari *patron* dalam usaha bisnisnya, antara lain dalam pemenangan tender perusahaan. Kemenangan tender biasanya diberikan kepada client tersebut. Sebaliknya *client* menyediakan dana-dana politik bagi si *patron* guna mempertahankan kekuasaannya.

Patron-Klien

Kata patron berasal dari bahasa latin pater yang berarti bapak, dari pater berubah menjadi patris dan patronis yang berarti bangsawan atau patricius yang berarti seseorang yang dianggap sebagai pelindung sejumlah rakyat jelata yang menjadi pengikutnya.

Sebaliknya klien atau client berasal dari kata cliens yang berarti pengikut. Mereka ini adalah orang-orang merdeka yang sejak awal atau bekas budak yang dimerdekakan. Mereka menggantungkan diri pada patron, nahkan kadang menggunaka nama paham sang patron.

1. Pola Hubungan Patron-Klien

Christian Pelras mengatakan hubungan Patron-Klien merupakan hubungantidak setara yang terjalin secara perorangan antara seorang pemuka masyarakat (*patron*) dengan sejumlah pengikutnya (*klien*). Hubungan itu berdasarkan pertukaran jasa, dimana ketergantungan klien pada patron diimbali oleh perlindungan patron pada kliennya.

James scott mengatakan hubungan patron klien merupakan hubungan special antara dua pihak di mana pihak yang memiliki status ekonomi lebih tinggi menggunakan pengaruhnya dan r*esources*nya untuk melindungi dan member mamfaat pada pihak yang status sosial ekonominya lebih rendah. dalam hubungan ini, imbalan yang diberikan klien dalam bentuk bantuan atau dukungan termasuk pelayanan kepada patron.

Perbedaan imbalan yang diberikan patron dank lien:

a. Imbalan klien pada patron dapat diberikan oleh siapa saja.
b. Imbalan patron hanya dapat diberikan oleh orang yang berstatus tinggi.

Peter M. Blau mengatakan hubungan patron-klien lebih merupakan hubungan pertukaran (exchange-relationship) yaitu bahwa:

a. Pertukaran hanya terjadi di antara pelaku yang mengharapkan imbalan dari pelaku lain dalam hubungan mereka.
b. Dalam mengejar imbalan ini, para pelaku dikonseptualisasikan sebagi seseorang yang mengejar profit.
c. Pertukaran antara dua macam, yang langsung (dalam jaringan interaksi yang relative kecil) dan kurang langsung (dalam system sosial yang lebih besar).
d. Ada empat macam imbalan dengan derajat berbeda, yaitu uang, persetujuan sosial, penghormatan/penghargaan dan kepatuhan.

2. Kekuasaan dan Patron-Klien: Patrimonialisme

Patrimonialisme dalam pemerintahan menurut weber adalah sebagai berikut:

a. Dalam kekuasaan patrimonial wewenang orang-orang yang dianggap lebih berkuasa seperti suami, ayah, lord, dan lain-lain, sangat berperan.
b. Ciri khas kekuasaan patriarkat dan patrimonial: adanya norma yang dianggap suci. Norma suci itu adalah bahwa yang menguasai (the ruler) akan memimpin yang dikuasai (the ruled). Pelanggaran atas norma suci akan mendatangkan kemarahan dewa. Oleh karena itu, dituntut kepatuhan mutlak.

Ciri-ciri hubungan Patron-klien:

1. Adanya ketidakseimbangan status antara patron dank lien;
2. Meskipun patron juga mengharapkan bantuan dari klien, tetapi kedudukan patron lebih tinggi dari klien;
3. Ketergantungan klien pada patron karena adanya pemberian barang-barang yang dibutuhkan klien dari patron yang menyebabkan adanya rasa utang budi klien pada patron;
4. Utang budi ini menyebabkan terjadinya hubungan ketergantungan.

Menurut Peter M. Blau sifat hubungan patron-klien adalah sebagai berikut:

1. *Asas resiprositas*
2. *In equal*
3. *Ada force dan coercion*
4. Ikatan akrab atas dasar saling percaya.

Sedangkan menurut James Scott ada tiga sifat hubungan Patron-Klien:

1. *Basic in equality;*

2. *Face to face character;*
3. *Diffuce flexibility* (meliputi semua segi kehidupan).

Ada tiga jenis imbalan yang dapat diberikan klien pada patron, yaitu:

1. Klien dapat menyediakan tenaganya bagi usaha patron di lading, sawah atau usaha lainnya;
2. Klien dapat menyerahkan bahan makanan hasil ladangnya buat patron atau pelayanan rumah tangga;
3. Klien dapat menjadi kepentingan politik patron, bahkan bersedia menjadi kaki tangan patron.

A. STRATIFIKASI SOSIAL: UNSUR, SIFAT, DAN PERSPEKTIF

Cara yang paling mudah untuk memahami pengertian konsep stratifikasi sosial adalah dengan berpikir membanding-bandingkan kemampuan dan apa yang dimiliki anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya.

Sadar atau tidak, pada saat Anda mulai membedakan kemampuan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain dan mulai menyusun pemilahan-pemilahan masyarakat ke dalam berbagai golongan atau strata itu, sebenarnya Anda mulai sedikit paham tentang hakikat stratifikasi sosial. Ketika Anda menyatakan bahwa si A adalah orang kaya dan sanggup membeli rumah mewah, sementara itu si B adalah orang miskin yang tidak sanggup membeli rumah mewah, maka sejak itu berarti Anda telah sadar bahwa masyarakat bukanlah sebuah komunitas yang homogeny, melainkan merupakan komunitas selalu penuh perbedaan.

1. Apakah Stratifikasi Sosial Itu?

Menurut Soerjono Soekanto (1982), di dalam setiap masyarakat di mana pun selalu dan pasti mempunyai sesuatu yang dihargai. Sesuatu yang dihargai di masyarakat bisa berupa kekayaan, ilmu pengetahuan, status haji, status “darah biru” atau keturunan dari keluarga tertentu yang terhormat atau apapun yang bernilai ekonomis.

Lebih lanjut Sorokin mengemukakan, stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkis). Perwujudannya adalah adanya kelas-kelas tinggi dan kelas yag lebih rendah.

Selanjutnya disebutkan bahwa dasar dan inti dari lapisan-lapisan dalam masyarakat adalah adanya ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban, kewajiban dan tanggung jawab nilai-nilai sosial dan pengaruhnya di antara anggota-anggota masyarakat.

Bentuk konkret lapisan-lapisan dalam masyarakat tersebut bermacam-macam. Namun pada prinsipnya bentuk-bentuk tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga macam kelas, yaitu:

a. Kelas yang didasarkan pada factor ekonomis,
b. Kelas yang didasarkan pada factor politis,
c. Kelas yang didasarkan pada jabatan-jabatan tertentu dalam masyarakat.

2. Karakteristik Stratifikasi Sosial

Pengertian stratifikasi sosial (social stratification) pada hakikatnya berbeda dengan konsep ketidaksamaan sosial (social inequality) (sanderson,1993:145-146).

Ketidaksamaan sosial umumnya lebih berkaitan dengan adanya perbedaan derajat dalam pengaruh atau prestise sosial antar-individu dalam suatu masyarakat tertentu. Dua ciri penting yang menandai ketidaksamaan sosial, yaitu:

1. Ketidaksamaan sosial hanya mengenai perbedaan prestise atau pengaruh antara individu satu terhadap individu lainnya. Jadi, ketidaksamaan sosial bukan berkenaan dengan derajat kekuasaan atau kekayaan. Ketidaksamaan sosial ada dan dapat terjadi dalam masyarakat yang relatif homogeny.
2. Ketidaksamaan sosial mengimplikasikan ketidaksamaan antar-individu bukan antar kelompok yang berlainan.

Berbeda dengan ketidaksamaan sosial, stratifikasi sosial lebih berkenaan dengan adanya dua atau lebih kelompok-kelompok bertingkat dalam suatu masyarakat tertentu, yang anggota-anggotanya mempunyai kekuasaan, hak-hak istimewa dan prestise yang tidak sama pula. Inti dari stratifikasi sosial adalah perbedaan akses golongan satu denga golongan masyarakat lain dalam memamfaatkan sumber daya. Jadi, dalam stratifikasi sosial, tingkat kekuasaan, hak istimewa dan prestise individu tergantung pada keanggotaannya dalam kelompok sosial, bukan pada karakteristik personalnya.

Secara rinci, ada tiga aspek yang merupakan karakteristik startifikasi sosial, yaitu:

1. Perbedaan dalam kemampuan atau kesanggupan. Anggota masyarakat yang menduduki strata tinngi, tentu memiliki kesanggupan dan kemampuan yang lebih besar dibandingkan anggota masyarakat yang di bawahnya. Contoh: berbeda dengan pegawai negeri golongan IV yang kebanyakan mampu membeli mobil, akibat keterbatasan gaji yang diperolehnya seorang pegawai negeri golongan I dan II tentu hanya akan sanggup membeli sepeda atau sepeda motor saja.
2. Perbedaan dalam gaya hidup (life style). seorang direktur sebuah perusahaan, selain dituntut selalu berpakaian rapi, mereka biasanya juga melengkapi atribut penampilannya dengan aksesoris-aksesoris lain untuk menunjang kemantapan penampilan, seperti memakai dasi, bersepatu mahal, berolahraga tenis atau golf, memakai pakaina merek terkenal dan perlengkapan-perlengkapan lain yang sesuai dengan statusnya. seorang direktur perusahaan besar yang berpakaian kumal besar kemungkinan akan menjadi pergunjingan. sebaliknya, seorang bawahan yang berprilaku seolah-olah direktur tentu jugaakan menjadi bahan cemoohan.
3. Perbedaan dalam hal hak dan akses dalam memamfaatkan sumber daya. Seseorang yang menduduki jabatan tinggi biasanya akan semakin banyak tidak menduduki jabatan strategis apa pun tentu hak dan fasilitas yang mampu dinikmati akan semakin kecil. Seorang Kepala Bagian, misalnya, selain bergaji besar dan memiliki ruang kerja sendiri, mereka juga berhak untuk memerintah stafnya. Bandingkan dengan hak dan fasilitas apa saja yang dimiliki bawahannya? sejauh mana hak dan fasilitas apa antara keduanya berbeda?. Di dalam berbagai perusahaan swasta, biasanya kita akan menemui adanya ketentuan tertulis yang mengatur apa saja yang menjadi hak atasan dan apa pula yang menjadi hak bawahan. Kendati sama-sama pekerja di sebuah perusahaan, bila seorang Kepala Bagian sakit dan harus opname di Rumah Sakit, maka ia akan berhak menginap di kamar yang baik-katakanlah kelas I. Sedangkan bila ada seorang staf yang sakit, mungkin perusahaan hanya akan mau mengganti maksimal biaya nginap di kamar kelas III atau sekurang-kurangnya tidak mungkin sama dengan yang menjadi hak Kepala Bagiannya.

3. Unsur – Unsur Stratifikasi Sosial

Dalam teori sosiologi, unsur-unsur sistem pelapisan sosial dalam masyarakat adalah:

a. Kedudukan (status)
b. Peran (role)

Kedudukan dan peran di samping unsur pokok dala sistem berlapis-lapis dalam masyarakat, juga mempunyai arti yang sangat penting bagi system sosial masyarakat. status menunjukkan tempat atau posisi seseorang dalam masyarakat, sedangkan peranan menunjukkan aspek dinamis dari status, merupakan suatu tingkah laku yang diharapkan dari seorang individu tertentu yang menduduki status tertentu. Untuk lebih jelasnya akan dibicarakan masing-masing unsur tersebut di atas.

a. Kedudukan (status)

Kedudukan (status) sering kali dibedakan dengan kedudukan sosial (social status). Kedudukan adalah sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan orang lain dalam kelompok tersebut atau tempat suatu kelompok sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi.

Sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. dengan demikian kedudukan sosial tidaklah semata-mata merupakan kumpulan kedudukan-kedudukan seseorang dalam kelompok yang berbeda, tapi kedudukan sosial tersebut memengaruhi kedudukan orang tadi dalam kelompok sosial yang berbeda. Namun,untuk mendapatkan pengertian yang mudah kedua istilah tersebut akan dugunakan dalam pengertian yang sama, yaitu kedudukan (status).

Oleh karena kedudukan sering diartikan sebagai tempat seseorang dalam suatu pola atau kelompok sosial, maka seseorang dapat pula mempunyai beberapa kedudukan sekaligus. Hal ini disebabkan seseorang biasanya ikut dalam beberapa pola kehidupan atau menjadi anggota dalam berbagi kelompok sosial. Misalnya, Pak Amir sebagai warga masyarakat, merupakan kombinasi dari beberapa kedudukan misalnya

sebagai guru, kepala sekolah, ketua RT, suami dari nyonya Rini, sebagai ayah dari anak-anaknya, dan sebagainya. Untuk mengukur status seseorang menurut Pitirim Sorokin secara rinci dapat dilihat dari:

a. Jabatan suatu pekerjaan;
b. Pendidikan dan luasnya ilmu pengetahuan;
c. Kekayaan;
d. Politis;
e. Keturunan: dan
f. Agama.

Status pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua jenis, yakni: yang bersifat objektif dan subjektif. Jabatan sebagai direktur merupakan posisi status yang bersifat objektif dengan hak dan kewajiban yang terlepas dari individu. Sementara itu, yang dimaksud status yang bersifat subjektif adalah status yang menunjukkan hasil dari penilaian orang lain, dimana sumber status yang berhubungan dengan penilaian orang lain tidak selamanya konsisten untuk seseorang.

Kedudukan, apabila dipisahkan dari individu yang memilikinya, hanyalah merupakan kumoulan hak dan kewajiban. Namun, karena hak dan kewajiban itu hanya dapat terlaksana melalui perantara individu, maka sulit untuk memisahkannya secara tegas dan kaku.

Dalam masyarakat sering kali kedudukan dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Ascribed-status. Status ini diartikan sebagai kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan seseorang. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Misalnya, kedudukan anak seorang bangsawan adalah bangsawan pula, seorang anak dari kasta Brahmana juga akan memperoleh kedudukan yang demikian. Kebanyakan ascribed status dijumpai pada masyarakat dengan system pelapisan sosial yang tertutup, seperti system pelapisan berdasarkan perbedaan ras. Meskipun demikian bukan berarti bahwa dalam masyarakat dengan system pelapisan sosial terbuka tidak ditemui adanya ascribed status. Kita lihat misalnya kedudukan laki-laki dlam suatu keluarga akan berbeda

dengan kedudukan isteri dan anak-anaknya, karena pada umumnya laki-laki (ayah) akan menjadi kepala keluarga.

b. Achieved-status, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seorang dengan usaha-usaha yang sengaja dilakukan, bukan diperoleh karena kelahiran. Kedudukan ini bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung dari kemampuan dari masing-masing orang dalam mengejar dan mencapai tujuan-tujuannya. Misalnya, setiap orang bisa menjadi dokter, hakim, guru dan sebagainya, asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dengan demikian tergantung pada masing-masing orang apakah sanggup dan mampu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan atau tidak.

Di samping kedua kedudukan tersebut di atas, sering kali dibedakan lagi satu macam kedudukan, yaitu assigned-status, kedudukan yang diberikan. Assigned-status sangat erat hubungannya dengan achieved-status, artinya suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang karena telah berjasa kepada masyarakat.

b. Peran (Role)

Peran (role) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Artinya, seseorang telah menjalankan hak – hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Sebagaimana kedudukan,maka setiap orang pun dapat mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti pula bahwa peran tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran sangat penting karena dapat mengatur perikelakuan seseorang, di samping itu peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.

Peran yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat (social-position) merupakan unsure statis tang menunjukkan tempat

individu dalam organisasi masyarakat. Sedangkan peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, artinya seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran. Suatu peran paling sedikit mencakup 3 hal, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat;
2. Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat; dan
3. Peran dapat dikatakn sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Seiring dengan adanya konflik antara kedudukan-kedudukan, maka ada juga konflik peran (*conflict of role*) dan bahkan pemisahan antara individu dengan peran yang sesungguhnya harus dilaksanakan (*role-distance*). *Role-distance* terjadi apabila si individu merasakan peran yang diberikan masyarakat kepadanya, sehingga tidak dapat melaksanakan perannya dengan sempurna atau bahkan menyembunyikan diri.

Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

1. Memberi arah pada proses sosialisasi;
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat; dan
4. Menghidupkan system pengendali dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang. Berbagai macam peranan dapat disebutkan sebagai berikut (Hendropuspio), 1989-185).

Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Peranan yang diharapkan (expected roles): cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. Peranan jenis ini antara lain peranan hakin, peranan protokoler diplomatic, dan sebagainya; dan

2. Peranan yang disesuaikan (actual roles), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan denga situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok denga situasi setempat, tetapi kekurangan yang uncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

Sementara itu, berdasarkan cara memperolehnya,peranan bisa dibedakan menjadi:

1. Peranan bawaan (ascribed roles), yaitu peranan yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha, misalnya peranan sebagai nenek, anak bupati, dan sebagainya; dan
2. Peranan pilihan (achives role), yaitu peranan yang diperoleh atas dasar keputusannya sendiri, misalnya seseorang yang memutuskan untuk memilih kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas airlangga dan menjadi mahasiswa program studi sosoiologi.

B. MOBILITAS SOSIAL

Di dalam sosiologi, proses keberhasilan seseorang mencapai jenjang status sosial yang lebih tinggi atau proses kegagalan seseorang hingga jatuh di kelas sosial yang lebih rendah itulah yang disebut mobilitas sosial. dengan demikian jika kita berbicara mengenai mobilitas sosial hendaknya tidak selalu diartikan sebagai bentuk perpindahan dari tingkat yang rendah ke suatu tempat yang lebih tinggi karena mobilitas sosial sesungguhnya dapat berlangsung dalam dua arah. Sebagian orang berhasil mencapai status yang lebih tinggi, beberapa orang mengalami kegagalan, dan selebihnya tetap tinggal pada status yang dimiliki oleh orang tua mereka.

Menurut Horton dan Hunt (1987), mobilitas sosial dapat diartikan sebagai suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Mobilitas sosial bisa berupa peningkatan atau penurunan dalam segi status sosial dan (biasanya) termasuk pula segi penghasilan yang dapat dialami oleh beberapa individu atau oleh keseluruhan anggota kelompok.

Tingkat mobilitas sosial pada masing-masing masyarakat berebda-beda. Pada masyarakat yang bersistem kelas sosial terbuka maka mobilitas sosial warga masyarakatnya akan cenderung tinggi. Tetapi, sebaliknya pada system kelas sosial tertutup-seperti masyarakat feudal atau masyarakat bersistem kasta –maka mobilitas sosial warga masyarakatnya akan cenderung sangat rendah dan sangat sulit diubah atau bahkan sama sekali tidak ada.

1. Jenis Mobilitas Sosial

Dalam mobilitas sosial secara prinsip dikenal dua macam, yaitu mobilitas sosial horizontal. Yang dimaksud dengan mobilitas sosial vertical adalah perpindahan individu atau objek sosial dari kedudukan sosialn lainnya yang tidak sederajat (soekanto, 1982:244). Sesuai dengan arahnya, karena itu dikenal dua jenis mobilitas vertical, yakni:

a. Gerak sosial yang meningkat (social climbing), yakni gerak perpindahan anggota masyarakat dari kelas sosial rendah ke kelas sosial yang lebih tinggi. Misalnya, seorang ataf yang dipromosikan naik pangkat menjadi kepala bagian di sebuah perusahaan swasta.
b. Gerak sosial yang menurun (social sinking), yakni gerak perpindahan anggota masyarakat dari kelas sosial tertentu ke kelas sosial lai lebih rendah posisinya. Misal, seorang petani cengkeh yang jatuh miskin karena komoditas yang ditanamnya tidak laku-laku dijual di pasaran.

Menurut Soedjatmoko (1980), mudah tidaknya seseorang melakukan mobilitas vertical salah satunya ditentukan oleh kekakuan dan keluwesan struktur sosial di mana orang tua itu hidup. Seseorang yang memiliki bekal pendidikan yang tinggi- bergelar Doktor atau MBA, misalnya-dan hidup di lingkungan masyarakat yang menghargai profesionalisme, besar kemungkinan akan lebih mudah menembus batas-batas lapisan sosial dan naik pada kedudukan lebih tinggi sesuai dengan keahlian yang dimilikinya.

Sebaliknya, setinggi apa pun tingkat pendidikan seseorang, tetapi bila ia hidup pada suatu lingkungan masyarakat yang masih kuat nilai-nilai primodialisme dan system hubungan koneksi, maka kecil kemungkinan orang tersebut akan bisa lancar jenjang kariernya dalam bekeja. Sudah menjadi rahasia umum,bahwa untuk saat ini gelar sarjana bukan jaminan bagi seseorang untuk bisa memperoleh pekerjaan dengan mudah jika ia sama sekali tidak memiliki patron atau pihak-pihak tertentu yang bisa memberikan rekomendasi atau katebelece.

Seorang petani miskin dalam banyak hal sulit naik status sosialnya dan sulit meningkatkan penghasilannya bila ia hidup di bawah sejumlah tekanan structural. Untuk memperoleh bantuan kredit, misalnya, mereka bukan saja sering kurang dipercaya, tetapi juga sulit memperolehnya karena kalah bersaing denga warga desa lain yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Studi yang dilakukan Daru Priyambodo dan Bagong Suyanto (1991) menemukan bahwa para petani miskin umumnya agak sulit bisa memperoleh bantuan kredit dari lembaga KURK (Kredit Usaha Rakyat Kecil) karena dinilai sering menunggak angsuran.

2. Saluran-Saluran Mobilitas Sosial Vertikal

Pitrim A. Sotokin, di dalam mobilitas sosial secara vertical dapat dilakukan lewat beberapa saluran terpenting sebagai berikut:

a. Angkatan Bersenjata.
b. Lembaga-lembaga pendidikan.
c. Lembaga-lembaga keagamaan.
d. Organisasi politik.
e. Organisasi ekonomi.

3. Determinan Mobilitas

Horton dan Hunt (1987) mencatat ada dua faktor yang memengaruhi tingkat mobilitas pada masyarakat modern, yakni:

a. Faktor structural, yakni jumlah relative dari kedudukan tinggi yang bisa dan harus diisi serta kemudahan untuk memperolehnya. Ketidakseimbangan jumlah lapangan kerja yang tersedia dibandingkan dengan jumlah pelamar atau pencari kerja adalah termasuk faktor struktural.
b. Faktor individu. Yang dimaksud factor individu adalah kualitas orang per orang, baik ditinjau dari segi tingkat pendidikannya, penampilannya, keterampilan pribadi, dan lain-lain-termasuk factor kemujuran yang menentukan siapa yang akan berhasil mencapai kedudukan itu.

4. Konsekuensi Mobilitas Sosial

Secara rinci Horton dan Hunt (1987) mencatat beberapa konsekuensi negative dari mobilitas vertical, seperti kecemasan akan terjadinya penurunan status bila terjadi mobilitas menurun, ketegangan dalam mempelajari peran baru dari status jabatan yang meningkat, keretakan hubungan antara anggota kelompok primer yang semula karena seseorang berpindah ke status yang lebih tinggi atau ke status yang lebih rendah.

Di lingkungan kelas sosialnya yang baru, seseorang yang baru saja naik status belum tentu diterima dengan tangan terbuka. Seseorang yang kaya mendadak karena mendapat lotre atau warisan hibah, mungkin saja tetap dianggap bukan sebagai bagian dari kelompok elite eksklusif karena belum atau tidak memiliki gaya hidup yang sama. Orang-orang yang naik status, tetapi posisinya mengambang ini lazim disebut OKB (Orang Kaya Baru). Di lingkungan masyarakat desa ada sebutan (bernada cemoohan), seperti petruk dadi ratu atau kere munggah bale,, untuk menyebut orang-orang tertentu yang kaya secaramendadak dan dinilai lupa dari mana asalnya. Para OKB biasanya baru diterima dan dianggap sebagai bagian dari kelas sosial barunya bila telah beberapa lama melakukan penyesuaian atau adaptasi.

C. STRUKTUR MASYARAKAT DESA CIBODAS PADA TAHUN 1950-AN

Tulisan ini merupakan analisis dari hasil penelitian H ten Dam pada tahun 1950 hingga 1954. Desa Cibodas termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, terletak kurang lebih 20 kilometer sebelah utara Kota Bandung. Desa Cibodas berada pada ketinggian 1.200 meter diatas permukaan laut. Jumlah penduduk Desa Cibodas sekitar 5.000 jiwa. Komoditas pertanian yang paling menonjol diusahakan adalah kentang serta sayur mayur.

Dalam struktur masyarakat Desa Cibodas terdapat dua kelompok sosial yang memiliki perbedaan mendasar. Perbedaan tersebut terdapat pada akses terhadap faktor produksi utama dalam pertanian, yaitu tanah. Kelompok sosial yang terbentuk di Desa Cibodas adalah kelompok buruh tani dan kelompok petani bebas. Selain akses terhadap tanah terdapat pula prinsip peran yang membagi masyarakat Desa Cibodas menjadi dua kelompok sosial tersebut. Prinsip tersebut adalah salah satu kelompok memiliki peran sebagai “pengabdi” sedangkan kelompok lainnya sebagai “penguasa”.

Perbedaan akses serta prinsip peran kelompok sosial yang ada di Desa Cibodas membawa berbagai implikasi dalam kehidupan sosial. Kedua kelompok sosial yang hidup bersama dalam satu tatanan masyarakat saling berinteraksi satu sama lain. Perbedaan satus sosial antara dua kelompok sosial tersebut membawa dampak pada peran masing-masing kelompok dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

1. Buruh Tani

Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi jumlah buruh tani yang ada di Desa Cibodas. Keberadaan buruh tani dapat diidentifikasi dari jumlah penduduk yang tidak memiliki tanah pertanian. Keterbatasan informasi menyebabkan kepemilikan tanah dijadikan sebagai dasar penentuan status sebagai buruh tani. Namun perlu ditekankan bahwa ciri terpenting dari buruh tani bukan pada kepemilikan tanah tetapi pada sikapnya yang menyerahkan diri kepada orang lain, dalam hal ini pemilik tanah.

Sebanyak 43% keluarga yang ada di Desa Cibodas tidak memiliki tanah. Tempat kediaman buruh tani yang tidak memiliki tanah terletak pada tanah orang lain, baik tanah milik kerabat atau orang lain. Kompensasi yang diberikan bagi buruh tani yang tinggal diatas tanah milik orang lain bukan berupa uang, namun berupa peran dirinya sebagai “abdi”.

Dua puluh lima persen keluarga di Desa Cibodas hanya memiliki tanah pekarangan di sekitar tempat tinggal mereka. Sedangkan 23% keluarga lainnya mempunyai tanah garapan dengan luas kurang dari 2,5 *acre*. Sebagian besar berupa tanah tegalan dengan produktivitas yang rendah. Letak tanah berada di lereng perbukitan atau di bagian desa yang jauh terpencil. Tanah pertanian tersebut tidak mencukupi untuk menghidupi para pemiliknya. Secara kasar terdapat 90% dari keluarga yang ada di Desa Cibodas merupakan buruh tani.

Untuk mengkaji struktur sosial Desa Cibodas dipandang perlu untuk membagi kelompok buruh tani ini menjadi dua subkelompok. Subkelompok pertama adalah mereka yang sama sekali tidak memiliki tanah pertanian atau hanya memiliki tanah pekarangan saja, untuk selanjutnya disebut buruh tani. Sedangkan subkelompok kedua adalah mereka yang memiliki tanah pertanian dengan luasan yang sempit yakni kurang dari 2,5 *acre*. Subkelompok ini disebut dengan petani tidak tetap (*part time farmers*).

2. Buruh Tani dalam Arti Sebenarnya

Buruh tani memperoleh penghasilan dari upah bekerja pada tanah pertanian milik orang lain atau petani penyewa tanah. Sebagian besar buruh tani bekerja lepas dengan upah harian, hanya sebagian kecil yang bekerja untuk jangka satu tahun atau lebih. Selain dari upah sebagai pekerja, buruh tani juga melakukan kegiatan dagang kecil-kecilan. Ada juga diantaranya yang menanami lahan hutan dengan perjanjian tertentu.

Secara stratifikasi sosial buruh tani menempati posisi paling bawah pada lapisan masyarakat Desa Cibodas. Secara ekonomi mereka sangat terbatas sehingga buruh tani sering malkukan kegiatan migrasi dari desa ke desa lain. Tujuan utama mereka dalam bermigrasi adalah mencari upah paling baik. Kebiasaan migrasi ini ditengarai merupakan bagian dari sisa-sisa perpindahan penduduk Priangan apa abad 18-19.

Kegiatan ekonomi buruh tani berkisar pada pekerjaan pertanian yang mereka lakukan untuk tuan tanah besar dengan upah harian. Selepas masa panen, buruh tani dibebaskan untuk menanami tanah pertanian tersebut dengan sistem bagi hasil (*maro*). Sewaktu senggang ketika mereka tidak dipekerjakan sebagai buruh, mereka melakukan usaha perdagangan kecil-kecilan dengan keuntungan yang kecil.

Buruh tani yang menempati tingkatan paling rendah dalam lapisan masyarakat membawa konsekuensi bahwa kedudukan mereka tidak akan hilang. Mereka merasa tidak perlu berupaya mempertahankan kedudukannya tersebut, karena suatu yang mustahil mereka akan jatuh dari kedudukan sosialnya. Akibat dari kedudukan sosial yang mereka miliki, rasa ketenteraman yang mereka alami sangat berbeda dengan perasaan kaum pemilik tanah. Perasaan ini memunculkan nilai “nrimo ing pandum” sehingga rasa berserah diri kepada nasib sangatlah besar pada diri buruh tani. Keadaan ini menyebabkan timbulnya ketegangan sosial apabila terdapat tindakan-tindakan yang berasal dari luar untuk merubah nasib mereka. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tani melaui pemberantasan buta huruf sama sekali tidak mempengaruhi para buruh tani.

Kemampuan buruh tani yang hanya sebatas pada pengerahan tenaga tanpa dibarengi dengan kemampuan manajerial menyebabkan ketidaksiapan mereka dalam mengelola tanah pertanian. Kebijakan *land reform* tanah bekas perkebunan kepada

para penduduk yang tidak memiliki tanah tidak membawa dampak terhadap peningkatan kesejahteraan mereka. Dalam waktu yang singkat tanah-tanah tersebut kembali dikuasai oleh sejumlah kecil orang sehingga buruh tani kembali pada posisi semula, sebagai kaum “abdi”.

Kebiasaan melakukan migrasi menyebabkan buruh tani tidak merasa “memiliki” desa dimana mereka tinggal. Partisipasi mereka dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di tingkat desa sangat rendah. Mereka merasa tidak berkepentingan dengan desa. Pola pikir buruh tani hanya sebatas pada “besok mau makan apa?”. Gagasan untuk mengajak mereka dalam koperasi akan sebatas pada sejauhmana koperasi dapat memenuhi kebutuhannya. Koperasi hanya dipandang sebagai sarana yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka melalui kredit. Pengembalian kredit adalah persoalan nanti yang akan dipikirkan atau bahkan mungkin tidak terpikirkan sama sekali.

3. Petani Tidak Tetap

Bagian dari kelompok buruh tani adalah petani tidak tetap. Luas tanah pertanian yang mereka kuasai berkisar 1-2,5 *acre* namun demikian sebagian besar kurang dari 1,25 *acre*. Suatu luasan yang terbatas sehingga pendapatan yang mereka peroleh dari usahatani tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga, mereka bekerja sebagai buruh tani dan perdagangan kecil-kecilan. Petani jenis ini tidak memiliki akses terhadap modal sehingga mereka tidak dapat mengusahakan tanaman yang memerlukan modal besar seperti kentang dan kubis. Modal untuk melakukan usahatani mereka peroleh dari teman sedesa yang senasib dengannya. Sebagai gantinya, petani tidak tetap mengusahakan komoditas padi ladang, jagung, ketela rambat, bawang atau tembakau. Seperti juga dengan subkelompok buruh tani, petani tidak tetap sering menanam tanaman sampingan dengan cara bagi hasil setelah panen kentang dan kubis.

Peran petani tidak tetap dalam masyarakat Desa Cibodas adalah sebagai pekerja yang diupah secara harian oleh tuan tanah besar. Pengusahaan komoditas juga terbatas pada komoditas yang tidak membutuhkan modal besar. Pola bagi hasil juga sering dilakukan dengan tuan tanah besar, walaupun pendapatan yang diperoleh sangat terbatas. Usaha perdagangan yang dijalankan lebih luas dan teratur

dibandingkan dengan buruh tani. Terkadang mereka menjual hasil pertanian hingga ke Bandung dengan menggunakan angkutan umum, namun lebih sering dibawa sendiri dengan dipikul.

Walaupun beberapa petani tidak tetap mempunyai harga diri yang lebih tinggi dibandingkan dengan buruh tani, namun kebanyakan sikap mental dan kecerdasannya serupa dengan buruh tani. Adanya sumber pendapatan lain diluar upah sebagai pekerja membuat petani tidak tetap sedikit terpengaruh dengan perubahan musim dan pasar tenaga kerja dibandingkan dengan buruh tani. Kondisi rumah tinggal sedikit lebih kokoh dibandingkan buruh tani. Pembagian ruang menjadi beberapa bagian menurut fungsi sudah dilakukan.

Petani tidak tetap sebagaimana buruh tani juga tidak tersentuh oleh pemerintahan desa, kecuali ketika mereka melanggar hukum. Petani tidak tetap semakin termarginalkan seiring perkembangan jaman. Kebutuhan untuk berhutang di musim paceklik membuat mereka menggadaikan atau menjual tanah mereka. Tanah pertanian tersebut pada akhirnya tetap terkumpul pada sebagian kecil masyarakat Desa Cibodas. Akses orang diluar Desa Cibodas untuk mendapatkan tanah pertanian di Desa Cibodas hampir tidak ada. Hubungan kekeluargaan pada petani tidak tetap sebagaimana buruh tani, tidak mampu menolong mereka memperkuat kedudukan sosial dan ekonomi.

4. Petani Bebas

Petani bebas merupakan sebagian kecil masyarakat Desa Cibodas. Sebagaimana dengan kelompok buruh tani, petani bebas dibedakan menjadi sua subkelompok yaitu petani bebas kecil dan tuan tanah besar. Dasar pembagian kelompok petani bebas ini adalah luas kepemilikan tanah. Mereka yang memiliki tanah antara 2,5 hingga 12 *acre* digolongkan dalam petani bebas kecil. Sedangkan mereka yang memiliki tanah lebih dari 12 *acre* termasuk dalam tuan tanah besar.

5. Petani Bebas Kecil

Secara kasar jumlah keluarga yang termasuk dalam subkelompok petani bebas kecil mencapai 6-8% dari keluarga yang ada di Desa Cibodas. Secara ekonomi kelompok ini tidak melakukan pekerjaan untuk mencari upah, sebaliknya mereka

mempekerjakan buruh tani. Biasanya petani bebas kecil juga turut bekerja bersama-sama dengan buruh tani sekaligus mengawasi pekerjaan mereka. Selain mengerjakan tanah pertanian miliki mereka sendiri, terkadang mereka juga mengerjakan tanah pertanian milik tuan tanah besar dengan cara bagi hasil. Jenis tanah yang mereka kerjakan adalah tanah sawah, berbeda dengan buruh tani yang mengerjakan tanah tegalan.

Akses petani bebas kecil terhadap sarana produksi sangat terbatas. Mereka membeli dengan harga tinggi dari tuan tanah besar. Tuan tanah besar sendiri mendapatkan sarana produksi dari agen yang berada di Lembang atau Bandung. Petani tidak bebas jarang atau bahkan tidak pernah menggunakan bibit kentang impor, mereka mendapatkan bibit dari hasil panen kentang tuan tanah besar. Hubungan keluarga antara petani bebas kecil dan tuan tanah besar sedikit membantu dalam akses terhadap sarana produksi. Pengetahuan mereka berkembang dan cenderung berusaha meniru praktik pertanian yang diterapkan oleh tuan tanah besar, yang tentunya sesuai dengan batas kemampuan keuangan mereka.

Perdagangan yang mereka lakukan selalu berbasis pada komoditas pertanian, mereka menjual sendiri hasil panen. Suatu hal yang berbeda dengan kegiatan perdagangan buruh tani yang menjual untuk memperoleh komisi atau pembayaran setelah barang yang mereka jual laku.

Kedudukan sosial antara tuan tanah besar dan petani bebas kecil hanya terdapat sedikit perbedaan. Petani bebas kecil merupakan cerminan sejumlah kecil masyarakat Desa Cibodas yang berhasil membebaskan diri dan meraih kekuasaan ekonomi yang lebih besar. Terdapat pula beberapa orang yang berhasil meraih kekuasaan ekonomi tersebut melalui cara “menjajah” sesamanya.

Kepedulian petani bebas kecil terhadap pendidikan anak-anak lebih besar dibandingkan dengan buruh tani. Kondisi rumah tinggal mereka lebih tertutup rapat dan lebih besar ukurannya. Ibu biasanya tinggal di rumah untuk mengurus dapur dan anak-anak, beberapa diantaranya memiliki pembantu-pembantu untuk menolong tugas rumah tangga tersebut. Anak-anak petani bebeas kecil mendapatkan peran sebagai “penerima pengabdian”, suatu hal yang berbeda dengan anak-anak buruh tani yang harus merawat diri mereka sendiri.

Usaha mempersatukan kelompokburuh tani dan kelompok petani bebas dalam suatu kerangka organisasi bersama menimbulkan adanya ketegangan sosial. Ide penyatuan ini telah dilakukan dalam bentuk koperasi di Desa Cibodas. Kedua kelompok memiliki ketidaksetaraan dalam intelektualitas dan kebudayaan. Dalam organisasi kepemudaan, pemuda dari kelompok petani bebas yang lebih berperan dalam kepemimpinan, sedangkan pemuda dari kelompok buruh tani sebatas pada anggota yang pasif saja.

Anggota kelompok petani bebas kecil yang terkadang memiliki hubungan saudara jauh dengan tuan tanah besar mampu memainkan peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Mereka menempati posisi yang baik untuk mendapatkan pengakuan dan rasa hormat dari penduduk lain. Posisi yang strategis tersebut merupakan wujud perjuangan mereka dalam mempertahankan status sosial sehingga tidak turun ke lapisan buruh tani.

Ikatan keluarga memiliki peranan yang penting dalam kegiatan dan kesempatan ekonomi. Tanah biasanya dipindahtangankan kepada anak-anak sewaktu orang tua masih hidup. Bantuan modal untuk usahatani dapat dengan mudah diakses dari keluarga. Beberapa diantaranya memiliki hubungan dengan orang-orang penting di pemerintahan atau swasta yang berada di Lembang, Bandung atau bahkan Jakarta.

6. Tuan Tanah Besar

Secara kasar subkelompok tuan tanah besar hanya 1,5% dari keluarga di Desa Cibodas. Tanah pertanian yang mereka kuasai sebagian besar adalah tanah subur yang produktif. Kelompok ini terdiri dari sejumlah kecil keluarga yang terikat dengan perkawinan. Lima keluarga tuan tanah besar lainnya adalah bangsawan. Penguasaan modal yang besar serta hubungan yang harmonis dengan tengkulak menyebabkan posisi secara ekonomi tuan tanah besar sangat baik. Beberapa tuan tanah besar memiliki tanah pertanian di luar desa. Petani bebas sedikit banyak telah menggunakan teknik-teknik pertanian modern. Pandangan mereka telah terbentang luas melewati batas desa. Kehidupan kota besar seperti Bandung merupakan suatu yang biasa bagi mereka.

Tuan tanah besar memiliki hubungan pribadi dengan pemerintah. Berbagai informasi tentang desa sedikit banyak terhimpun dari kalangan tuan tanah besar. Informasi yang terkadang sangat jauh dari kenyataan yang sebenarnya. Pemimpin desa biasanya dari kelompok petani bebas ini demikian pula orang-orang yang bekerja keras untuk gerakan koperasi desa.

Secara ekonomi, dalam menjalankan usaha pertanian, tuan tanah besar menjalankan fungsi sebagai pengelola. Mereka jarang sekali mengerjakan pekerjaan kasar sendiri. Komoditas yang diusahakan adalah komoditas yang menjanjikan keuntungan besar walupun dengan modal yang besar. Beberapa tuan tanah besar berhasil merubah tegalan menjadi kebun buah-buahan yang terawat dengan baik. Setelah panen, tuan tanah besar menyerahkan pengelolaan tanah pertaniannya kepada buruh tani dengan cara *maro*. Tanah sawah yang mereka miliki disewakan atas dasar bagi hasil. Hasil sewa tersebut mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan makan sedangkan keuntungan dari usahatani kentang dan kubis mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan kemewahan, seperti membangun rumah atau membiayai kuliah anak-anak mereka di Bandung. Mereka juga menanamkan modal pada usaha dagang dan pengangkutan.

Aspek Status dan Peran	**Buruh Tani**		**Petani Bebas**	
	Buruh Tani Sebenarnya	**Petani Tidak Tetap**	**Petani Bebas Kecil**	**Tuan Tanah Besar**
Kegiatan Ekonomi	Dipekerjakan oleh petani bebas dengan gaji harian	Bertanam di lahan yang dimilikinya dengan hasil yang sangat kurang	Mengerjakan tanah sendiri dan terkadang mengerjakan sawah tuan anah besar dengan sistem bagi hasil	Menjalankan fungsi “manajer” pada tanah yang mereka miliki, tuan tanah besar tidak melakukan pekerjaan kasar
	Setelah panen, buruh tani diperbolehkan menanami lahan pertanian selama enam bulan	Dipekerjakan oleh petani bebas dengan gaji harian	Mempekerjakan buruh tani dengan cara diupah	Mempekerjakan buruh tani dengan cara diupah

	Melakukan perdagangan kecil-kecilan pada saat menganggur	Mengerjakan lahan milik petani bebas dengan sistem bagi hasil	Menyewakan tanah kepada petani tidak tetap dengan sistem bagi hasil	Menyewakan tanah kepada petani tidak tetap dengan sistem bagi hasil
	-	Melakukan perdagangan yang lebih luas dibandingkan buruh tani sebenarnya	Melakukan usaha perdagangan hasil pertanian	Usaha dagang hasil pertanian dan saprotan
Kedudukan Sosial	Menempati posisi paling bawah sehingga merasa “aman” karena tidak ada kekhawatiran jatuh dari posisinya		Menempati posisi atas sehingga timbul konsekuensi untuk menjaga keududukan tersebut atau bahkan meraih kedudukan yang lebih tinggi	
	Orang tua lebih banyak bekerja dalam ranah produktif sehingga sedikit sekali memberikan “warisan kebudayaan” kepada anak-anak mereka.		Ibu biasanya tinggal di rumah untuk mengasuh anak-anak. Proses “pewarisan kebudayaan” di dalam rumah berjalan dengan baik	
	Tidak merasa “memiliki” desa sehingga partisipasi pada pembangunan kurang		Desa adalah sarana untuk mengamankan kedudukannya	

Kebutuhan akan pinjaman bagi tuan tanah besar diperoleh dari pedagang di Lembang atau Bandung yang menyediakan pupuk dan obat-obatan pertanian. Para pedagang tidak membebankan bunga atas pinjaman yang dilakukan, mereka telah menetapkan harga jual yang lebih tinggi daripada harga pasaran. Selain itu, ketika panen sudah menjadi “kewajiban moral” bagi tuan tanah besar untuk menjual hasil panen kepada pedagang tersebut. Kompensasi yang terjadi adalah harga beli hasil panen tersebut dengan harga yang lebih murah. Sekilas kita akan menganggap bahwa syarat pinjaman tersebut tidak ideal, namun kita tidak dapat menyimpulkan bahwa syarat tersebut merugikan tuan tanah besar. Secara ekonomi dan sosial, status tuan tanah besar tidak tampak pada posisi yang dirugikan.

Ikatan keluarga antar tuan tanah besar di Desa Cibodas demikian kuatnya. Selalu terdapat perdamaian dan keserasian antara anggota berbagai keluarga tuan tanah besar. Kekuatan ekonomi dan sosial yang mereka miliki terletak pada kenyataan

bahwa secara bersama-sama mereka merupakan gabungan perusahaan besar yang mencakup tanah, uang, kecerdasan, pengalaman dan hubungan.

D. DESA CIBODAS SAAT INI

Perubahan sangat pesat telah dialami oleh Desa Cibodas seiring dengan semakin pesatnya pembangunan dan introduksi berbagai teknologi serta informasi. Perubahan fisik yang terjadi di Desa Cibodas adalah suatu hal yang wajar sebagaimana yang terjadi di desa-desa lainnya terutama di Jawa. Semakin terbukanya akses baik berupa transportasi dan komunikasi mau tidak mau akan membawa berbagai dampak bagi kehidupan sosial pedesaan.

Desa Cibodas kini dapat dengan mudah dicapai karena kini jalan desa telah diaspal, suatu yang tidak ditemukan ketika H ten Dam berkunjung di desa ini kurang lebih 50 tahun lalu. Rumah penduduk kini semua telah berdinding tembok dengan lantai keramik. Kemajuan Desa Cibodas sangat pesat, terutama sektor pertaniannya. Kini Desa Cibodas tidak lagi sebagai desa dengan sistem pertanian tradisional yang semi subsisten, namun sistem pertanian saat ini telah bersifat komersial atau dengan kata lain telah menerapkan prinsip agribisnis.

Tanaman yang diusahakan masih berkisar pada tanaman hortikultura terutama sayur mayur, namun dengan jenis tanaman yang lebih bervariasi dan teknologi budidaya yang jauh berbeda dari tahun 1950-an, ketika H ten Dam melakukan penelitain di desa ini. Desa ini memproduksi kentang, kubis, brokoli, cabai merah, daun bawang, seledri, dan berbagai jenis tomat. Ada juga paprika belanda yang gemuk dan besar seperti apel. Tumbuh juga berbagai sayuran yang bibitnya dari Jepang seperti *mizuna* (daun lobak), *syungiku* (kenikir), *cisito* (cabai), *piman* (paprika jepang yang berbentuk lonjong), *kyuri* (mentimun), *damame* (kedelai), *satsumaimo* (ubi jalar), *ingen* (buncis), *nasubi* (terung), *gobo* (semacam gingseng), *kaboca* (labu), *sironegi* (bawang daun), asparagus jepang, dan *horenso* (bayam). Desa Cibodas saat ini telah menjadi desa percontohan, bahkan sering disebut sebagai kampusnya para petani.

Kemajuan ini tidak dapat lepas program Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) yang ada sejak tahun 1990-an. Program ini didirikan dan dikelola Ishak, seorang petani sayur di Desa Cibodas yang berusia 40 tahun, setelah ia mendapat kesempatan magang mempelajari pertanian di Jepang. Dukungan dari

berbagai pemerintah, pengusaha dan LSM yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat pedesaan manjadikan program ini dapat berkembang dengan pesat dan merubah Desa Cibodas.

Sebagian besar petani telah mampu mengembangkan pertanian dengan pola modern mengikuti tuntutan teknologi budidaya pertanian. Selain itu, pasar komoditas pertanian di desa ini pun cukup berkembang. Hasil produksi sayur di desa ini dipasarkan ke Singapura, Taiwan, dan dalam waktu dekat akan diekspor ke Korea Selatan. Selain itu, ada petani yang menjualnya ke supermarket di Jakarta, Denpasar, Surabaya, dan Bandung. Sisanya untuk pasar-pasar induk di Jawa Barat dan Jakarta.

Dengan keberhasilan ini, rasanya sulit membayangkan bahwa desa yang dibuka oleh keluarga Eyang Sarja dan Pawira dari Cibeunying, Kota Bandung, tahun 1886 ini akan maju seperti sekarang. Sejak masa penjajahan, masyarakat di desa ini hidup dari pertanian sayur. Hanya saja, sayur yang ditanam waktu itu sebatas ubi jalar, jagung, cabai, kol, dan kentang.

Pada masa kemerdekaan hingga 1980-an, sebagian besar petani menjual produksinya ke pasar-pasar tradisional. Sayur yang akan dijual dimasukkan begitu saja ke dalam karung. Para petani hanya tahu menanam. Mereka lebih sering merugi karena mendapatkan harga sayur yang jatuh di musim panen. Oleh karena itu, sebagian penduduk kampung tidak bisa hidup sejahtera. Rumah mereka yang berdinding anyaman bambu tampak kumuh dan reot. Penyakit menular menjangkiti penduduk karena lingkungan yang tidak sehat. Kandang ternak menempel langsung pada rumah-rumah penduduk.

Jika malam tiba, penduduk terisolasi karena listrik belum masuk. Listrik baru masuk ke desa itu tahun 1985. Jika turun hujan, jalan tanah yang menurun dan menanjak menjadi licin hingga sulit dilalui kendaraan. Kini jalan sudah beraspal, rumah-rumah sudah memiliki jamban sendiri. Rata-rata petani di desa ini berpenghasilan dua juta rupiah per bulan.

Para petani di desa ini bukan petani biasa. Meski sebagian besar hanya tamat sekolah dasar, mereka cukup percaya diri untuk saling tukar ilmu dengan para pejabat dari berbagai dinas pertanian di Indonesia, mahasiswa, serta petani dari luar negeri, seperti Nigeria dan negara-negara lainnya di Asia. Setidaknya, desa ini menjadi

langganan praktik lapangan dan tempat penelitian bagi orang- orang yang terjun di bidang pertanian hortikultura. Desa Cibodas ibarat kampus bagi para petani. Setiap tahun sekitar 200 tamu datang ke desa ini. Para tamu biasanya menginap sampai tiga hari, bahkan ada yang tinggal menetap sampai enam bulan.

Untuk penginapan dan makan, para tamu tak perlu pusing. Sejumlah warga bersedia memberikan tumpangan untuk menetap dengan tempat tidur dan jadwal makan teratur. Biayanya hanya berkisar Rp. 90.000,00 per orang. Listrik dan air bisa dipakai dengan gratis. Belajar bertani di desa ini bisa juga gratis, disesuaikan dengan kemampuan mereka yang ingin belajar. Sebab, untuk perorangan ada beberapa petani yang siap menampung dan memberi latihan dengan cara magang di kebunnya.

E. STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT

Perubahan struktur sosial masyarakat Desa Cibodas tidak berlangsung secara serta merta. Seperti yang telah disampaikan di depan, tentang kondisi Desa Cibodas pada tahun 1950-an hingga 1990-an dengan segala keterbatasannya. Fenomena buruh tani dan petani bebas pada tahun 1950-an seperti yang diulas oleh H ten Dam seakan-akan melompat menuju “kenaikan derajat” pada saat ini. Tentu semuanya melalui proses atau masa transisi.

Semakin pesatnya perkembangan pembangunan industri di perkotaan pada era orde baru yang memicu adanya disparitas desa-kota. Kondisi ini menyebabkan adanya fenomena urbanisasi besar-besaran, terlebih dengan semakin terdesaknya kaum buruh tani di pedesaan Jawa. Keadaan yang sama juga terjadi di Desa Cibodas, dengan letak geografis yang dekat dengan Bandung dan Jakarta membuat laju urbanisasi sedemikian besarnya. Fenomena ini terus berlanjut hingga pada awal 1980-an terjadi fenomena yang cukup menarik, yaitu sulitnya mencari buruh tani untuk bekerja di lahan. Sebagian besar buruh tani yang ada di tahun-tahun itu adalah mereka yang telah berusia lanjut.

Seiring dengan perkembangan pertanian Desa Cibodas yang telah berubah menjadi “industri pertanian”, status buruh tani tidaklah seperti yang digambarkan oleh H ten Dam pada tahun 1950-an. Kesejahteraan buruh tani semakin meningkat, bahkan istilah buruh tani menjadi suatu yang dipaksakan apabila ingin diterapkan di Desa

Cibodas saat ini. Istilah yang paling tepat untuk menyebut kelompok ini adalah “pegawai atau karyawan perkebunan”.

Berdasarkan data tahun 2004, dari 8.904 penduduknya terdapat 2.464 yang telah memiliki mata pencarian. Sebanyak 1.507 orang dari jumlah penduduk yang telah bekerja adalah petani, terdiri dari 746 petani pemilik lahan dan 761 buruh tani. Kondisi ini hampir serupa dengan kadaan di tahun 1950-an, namun demikian struktur sosial yang terbentuk ternyata mempunyai perbedaan, terutama pada kesejahteraan, kegiatan ekonomi dan status sosial masing-masing kelompok sosial yang ada.

Banyak petani yang kini bernasib naas, hanya menjadi tukang tanam. Namun, di Desa Cibodas yang ada adalah petani-petani yang telah berhasil memperlihatkan diri sebagai petani modern yang sukses. Cirinya, kehidupan mereka tidak hanya berkutat di kebun. Mereka memiliki banyak waktu untuk membagi ilmu kepada masyarakat petani lain agar bisa menjadi lebih maju.

Semua dimensi ini tampak menjadi keseharian para petani di Desa Cibodas. Hampir seluruh petani di desanya memiliki pegawai di kebun. Jumlah pegawainya mencapai 4 hingga 50 orang. Mereka bekerja secara berkelompok untuk memenuhi permintaan pasar secara berkesinambungan. Kesinambungan usaha yang dibangun atas dasar kerja sama ini mengakibatkan mereka bisa mendapatkan penghasilan Rp. 2.000.000,00 per bulan.

Para petani juga bisa menabung untuk membangun rumah, juga menyekolahkan anak hingga ke perguruan tinggi. Rumah-rumah mereka umumnya bersih dan besar. Selain rumah untuk kepentingan keluarga, mereka juga bisa membangun rumah untuk kepentingan tamu. Petani di Desa Cibodas tidak menghabiskan waktu mereka di kebun untuk bekerja. Mereka sering pergi ke berbagai desa lain di Jawa Barat maupun di provinsi-provinsi lain untuk melatih petani. Sejak awal, para petani ini berkomitmen untuk berkonsentrasi membangun kemitraan dan melakukan pelatihan kepada para petani.

Hampir di seluruh perkebunan milik petani, para buruh tani dipersilakan meluangkan waktu untuk menggarap tanaman yang mereka kelola di halaman atau di lahan yang mereka sewa. Biasanya jika ada anggota kelompok yang sudah mampu mandiri, mereka dipersilakan keluar dan membentuk kelompok sendiri untuk melatih

petani lain yang belum bergabung. Saat ini di Desa Cibodas terdapat 16 kelompok tani. Setiap kelompok memiliki fokus usaha dan pelatihan sendiri. Kelompok Gapura Tani merupakan pengada bibit pertanian, Mekar Tani Jaya I mengurus pupuk organik, PD Grace membidangi sayur mayur eksklusif untuk supermarket dengan bibit impor berikut teknologinya. Ada juga Kelompok Tani Budi Rahayu yang ahli di bidang pertanian buncis. Kelompok Tani Wangi Harum membidangi bunga potong, dan Yans Fruit and Vagatables merupakan pencari pasar produk pertanian. Para petani di kelompok-kelompok tani bergabung dalam Paguyuban Pandu Tani.

Melalui kelompok-kelompok pula, para petani berhasil memikat generasi muda untuk bekerja di bidang pertanian. Kelompok Tani memberi peluang sangat besar bagi pemuda di desanya untuk bekerja di lahan pertanian, gudang pengepakan, atau kantor administrasi pemasaran dalam agribisnisnya. Pemuda pencandu narkoba dan penderita gangguan jiwa pun dilibatkannya. Hingga kini, setiap tahun sekitar 30 remaja berhasil dididik sebagai petani.

Para petani juga selalu menyisihkan sedikit lahan di kebun untuk percobaan dengan memberi perlakuan khusus pada tanaman agar mampu mencapai produktivitas dan kualitas terbaik bagi hasil pertaniannya. Selain itu, sebelum menanam suatu jenis tanaman, mereka melakukan analisis usaha. Dengan analisis usaha yang baik, mereka bisa melibatkan investor untuk bermain di dalam usaha pertanian mereka. Para petani pun sudah mampu membuat proposal. Salah satu hasilnya, para pensiunan dari sebuah perusahaan telekomunikasi besar di Indonesia siap berinvestasi.

Tak hanya itu, dengan analisis usaha, mereka juga bisa dengan mudah mendapat pinjaman dari bank. Bahkan, karena lancar dalam pembayaran, bank bersedia memberi pinjaman lagi dengan jumlah yang lebih besar untuk digunakan sebagai modal usaha. Dalam analisis usahatani beberapa petani sudah memanfaatkan jaringan internet untuk mengetahui perubahan harga, komoditas unggulan, perubahan cuaca, teknik dan pola bertani yang baru.

Sebagian besar lahan masih dimiliki oleh penduduk Desa Cibodas, kepemilikan oleh penduduk luar desa sangat kecil. Namun demikian antusiasme penduduk dari berbagai kota besar untuk berinvestasi di Desa Cibodas demikian besarnya.

PENUTUP

Struktur sosial masyarakat Desa Cibodas terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu kaum buruh tani dan petani bebas. Pengelompokan tersebut didasarkan pada penguasaan mereka terhadap faktor produksi tanah pertanian. Kedua kelompok besar ini dapat dibagi lagi dalam empat kelompok kecil yaitu buruh tani dalam artian sebenarnya, petani tidak tetap, petani bebas kecil dan tuan tanah besar. Buruh tani, yang merupakan mayoritas keluarga di Desa Cibodas menempati posisi yang paling bawah dalam pelapisan sosial, sedangkan tuan tanah besar menempati posisi tertinggi dalam piramida pelapisan sosial tersebut. Jumlah tuan tanah besar hanya sebagian kecil dari keluarga yang tinggal di Desa Cibodas.

Walaupun sistem stratifikasi pada masyarakat Desa Cibodas merupakan sistem stratifikasi terbuka, gerak sosial jarang dijumpai pada masyarakat Desa Cibodas. Kelompok petani bebas berusaha untuk selalu mempertahankan kedudukan mereka, sedangkan kaum buruh tani cenderung untuk bertahan dengan keterbatasan yang ada. Sikap “nrimo” menjadi kendala untuk melakukan upaya memperbaiki kesejahteraan mereka.

Gejala tersebut kini mengalami perubahan, seiring semakin pesatnya perkembangan Desa Cibodas oleh “industrialisasi pertanian”. Walaupun struktur sosial yang ada masih tampak adanya stratifikasi antara buruh tani dan tuan tanah, tetapi pola relasi antara dua kelompok sosial ini mengalami banyak kemajuan. Pola relasi yang saling menguntungkan melalui model kelembagaan petani membawa dampak pada semakin sejahteranya buruh tani di Desa Cibodas. Konsep buruh tani manjadi suatu yang dipaksakan, suatu istilah yang tepat adalah “pekerja atau karyawan perkebunan”.

Namun demikian seiring masuknya investasi berupa modal dan teknologi di Desa Cibodas membawa kekhawatiran ketika suatu saat pola kemitraan yang ada akan berubah menjadi kapitalisme. Sesuatu yang telah menimpa saudara-saudara mereka yang berada di sektor industri perkotaan atau perkebunan besar. Semoga pola kemitraan akan dapat memperkokoh struktur sosial masyarakat Desa Cibodas dan juga dapat ditiru oleh petani-petani lainnya, sehingga petani Indonesia akan semakin berdaya bukannya semakin tertindas oleh globalisasi dan kapitalisme. Amien.

BAB VII. PERUBAHAN SOSIAL DALAM PENGELOLAAN HUTAN

Pengetahuan mengenai struktur masyarakat saja kiranya belum cukup memadai untuk menggambarkan kehidupan bersama manusia secara nyata. struktur masyarakat barulah menggambarkan kehidupan bersama manusia dalam seginya yang static. Agar dapat mengetahui gambaran yang lebih lengkap dan realistic mengenai kehidupan bersama manusia ini, kita perlu melengkapi diri dengan pengetahuan-pengetahuan mengenai proses-proses sosial yang terjadi dan terdapat di dalam masyarakat. Pengetahuan mengenai proses-proses sosial ini akan memungkinkan seseorang untuk memahami segi-segi dinamika suatu masyarakat.

Proses sosial adalah setiap interaksi sosial yang berlangsung dalam suatu jangka waktu, sedemikian rupa hingga menunjukkan pola-pola pengulangan hubungan perilaku dalam kehidupan masyarakat. Secara garis besar, proses sosial bisa dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu proses sosial yang asosiatif dan proses sosial yang disosiatif.

A. Proses Sosial Yang Assosiatif

Proses sosial itu dapat disebut asosiatif apabila prose situ mengindikasikan adanya”gerak pendekatan atau penyatuan”. Berikut ini akan dibahas empat bentuk khusus proses sosial yang asosiatif, yakni:

1. Kooperasi
2. Akomodasi
3. Asimilasi; dan
4. Amalgasi

1. Kooperasi

Kooperasi berasal dari dua kata latin, *co* yang berarti bersama-sama, dan *operaini* yang berarti bekerja. Kooperasi, dengan demikian, berarti bekerja sama. Kooperasi merupakan perwujudan minat dan perhatian orang untuk bekerja bersama-sama dalam suatu kesepahaman sekalipun motifnya sering dan bisa tertuju kepada kepentingan diri sendiri.

Dalam kenyataanya, realisasi koperasi itu diusahakan melalui berbagai macam usaha. Setidak-tidaknya ada empat macam bentuk usaha kooperasi yang dapat disebutkan di sini, masing-masing adalah:

1. Tawar-menawar (*bargaining*), yang merupakan bagian dari proses pencapaian kesepakatan untuk pertukaran barang atau jasa;
2. Kooptasi (*cooptation*), yaitu usaha ke arah kerja sama yang dilakukan denga jalan menyepakati pimpinan yang akan ditunjuk untuk mengendalikan jalannya organisasi atau kelompok.
3. Koalisi (*coalition*), yaitu usaha dua organisasi atau lebih yang sekalipun mempunyai struktur berbeda-beda hendak mengajar tujuan yang sama dengan cara yang kooperatif;
4. Patungan (*joint-venture*), yaitu usaha besama untuk mengusahakan suatu kegiatan, demi keuntungan bersama yang akan dibagi nanti, secara proporsional dengan cara saling mengisi kekurangan masing-masing *partner*.

2. Akomodasi

Akomodasi adalah suatu proses kearah tercapainya persepakatan sementara yang dapat diterima kedua belah pihak yang tengah bersengketa.

Akomodasi jelas akan meredakan konflik dan menggantikan proses sosial yang disosiatif ini dengan suatu interaksi yang sedikit banyak bersifat damai. Akomodasi akan meredakan pertentangan, dan sikap yang lebih bersahabat mungkin saja bisa timbul dari interaksi yang bersifat damai ini. Proses akomodasi memang berpengaruh besar pada siakp dan perilaku orang.

Akomodasi muncul dalam bentuk yang bermacam-macam. Sebagian memang terjadi karena diusahakan secara sengaja melalui rencana dan perundingan; dan sebagian lagi terjadi sebagai hasil interaksi kelompok yang sama sekali tak terencana. Sementara itu, umur akomodasi juga bisa bermacam-macam. Ada akomodasi yang hanya mampu bertahan sehari dua hari saja; akan tetapi ada pula yang mampu bertahan samapai beberapa abad.

Akomodasi sebagai proses sosial dapat belangsung dalam beberapa bentuk. Masing-masing dapat disebutkan dan dijelaskan berturut-turut sebagai berikut:

1. *Pemaksaan (coercion),* ialah proses akomodasi yang berlangsung melalui cara pemaksaan secara sepihak dan yang dilakukan dengan mengancam saksi. Pemaksaan seperti ini tentu saja hanya mungkin terjadi apabila kedua belah pihak yang tengah berakomodasi itu memiliki kedudukan sosial dan kekuatan yang tidak seimbang. Sebagai contoh akomodasi yang berlangsung dalam bentuk coercion adalah perbudakan.
2. *Kompromi (compromise)*, ialah proses akomodasi yang berlangsung dalam bentuk usaha pendekatan oleh kedua belah pihak yang sadar menghendaki akomodasi, kedua belah pihak bersedia mengurangi tuntutan masing-masing sehingga dapat diperoleh kata sepakat mengenai titik tengah penyelesaian.
3. Penggunaan jasa perantara (mediation), ialah suatu usaha konpromi yang tidak dilakukan sendiri secara langsung, melainkan dilakukan dengan bantuan pihak ketiga, yang-dengan sikapnya yang tak memihak-mencoba mempertemukan dan mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa atas dasar itikad kompromi kedua belah pihak itu.
4. Penggunaan jasa penengah (*abritate*), ialah suatu usaha penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga. seperti halnya yang bersengketa. Hanya saja kalau perantara itu sekedar mempertemukan kehendak kompromitis kedua belah pihak, penengah ini menyelesaikan sengketa dengan membuat keputusan-keputusan penyelesaian atas dasar ketentuan-ketentuan yang ada. Sebagai contoh dapat ditunjukkan *abritate* perselisihan perburuhan.
5. Peradilan (*adjudication*), ialah suatu usaha penyelesaian sengketa yang dialkukan oleh pihak ketiga yang memang mempunyai wewenang sebagai penyelesai sengketa. Pengadil (hakim) tidaklah dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa seperti apa yang terjadi pada proses akomodasi lewat penengah. Akan tetapi, seperti halnya para penengah, para pengadil (*adjudicator*), khusunya hakim) itu selalu menggunakan aturan-aturan tertentu sebagai pangkal beranjak penyelesaian sengketa.
6. Pertenggangan (*tolerantion*), ialah suatu bentuk akomodasi yang berlangsung tanpa manifestasi persetujuan formal macam apa pun. Pertanggangan terjadi karena individu-individu bersedia menerima perbedaan-perbedaan yang ada sebagai suatu

kenyataan dan dengan kerelaan membiarkan perbedaan itu, serta menghindari diri dari perselisihan-perselisihan yang mungkin timbul.

7. *Stalemate*, adalah suatu bentuk akomodasi, di mana pihak-pihak yang bertentangan sama-sama memiliki kekuatan yang seimbang, hingga mereka tiba pada suatu posisi "maju tidak bisa, mundur pun tak bisa". *Stalemate,* adalah suatu situasi kemacetan yang mantap, sehingga beberapa pihak mengatakan bahwa *stalemate* bukanlah proses akomodasi melainkan *resultant* suatu proses akomodasi.

3. Asimilasi

Asimilasi merupakan proses yang lebih berlanjut apabila dibandingkan dengan proses akomodasi. Pada proses asimilasi terjadi proses peleburan kebudayaan, sehingga pihak-pihak atau warga-warga dari dua-tiga kelompok yang tengah berasimilasi akan merasakan adanya kebudayaan tunggal yang dirasakan sebagai milik bersama. Proses-proses asimilasi akan timbul apabila:

1. Ada perbedaan kebudayaan antara kelompok-kelompok manusia yang hidup pada suatu tempat yang sama.
2. Para warga dari masing-masing kelompok yang berbeda-beda itu dalam kenyataannya selalu bergaul secara intensif dalam jangka waktu yang cukup lama.
3. demi pergaulan mereka yang telah berlangsung secara intensif itu, masing-masing pihak menyesuaikan kebudayaan mereka masing-masing sehingga terjadilah proses saling penyesuaian kebudayaan di antara kelompok-kelompok.

Sementara itu, beberapa factor yang diketahui dapat mempermudah terjadinya asimilasi, antara lain:

1. Sikap dan kesediaan menggang. Apabila toleransi dapat dihidupkan di antara kelompok-kelompok manusia yang berbeda budaya itu, maka proses asimilasi akan mudah dilangsungkan tanpa banyak hambatan yang berarti.
2. Sikap menghadapi orang asing berikut kebudayaannya. Sikap demikian ini akan memudahkan pendekatan-pendekatan warga dari kelompok-kelompok yang saling berbeda itu.
3. Kesempatan di bidang ekonomi yang seimbang. Kesempatan di bidang ekonomi yang seimbang begini akan memberikan kemungkinan pada setiap pihak untuk mencapai kedudukan tertentu berkat kemampuannya. Hal yang demikian ini jelas

akan menetralisir perbedaan-perbedaan kesempatan yang terjadi akibat kebudayaan yang berlainan dan berbeda-beda, yang oleh karena itu akan memudahkan asimilasi.

4. Sikap terbuka golongan penguasa. sikap terbuka golongan penguasa akan meniadakan kemungkinan diskriminasi oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas dan tiadanya diskriminasi antar kelompok akan memudahkan asimilasi.
5. Kesamaan dalam berbagai unsure kebudayaan. Sekalipun kebudayaan masing-masing kelompok itu tidak sepenuhnya sama, namun sering kita saksikan bahwa dalam hal-hal atau unsure-unsur tertentu terdapat kesamaam. Kian banyak unsure-unsur kebudayaan kelompok-kelompok itu yang bersamaan akan kian mudahlah prasangka-prasangka antar kelompok itu dihilangkan dan oleh karena itu asimilasi pun akan lebih mudah diusahakan.
6. Perkawinan campuran. Misalnya, antara warga kelompok mayoritas dan warga kelompok minoritas atau antara anggota golongan penjajah dan anggota golongan terjajah-sering pula merupakan langkah penting di dalam usaha-usaha penyelenggraan asimilasi.
7. Musuh bersama dari luar. Ancaman musuh bersama dari luar sering pula diperkirakan akan memperkuat rasa persatuan di dalam masyarakat. Sadar akan adanya ancaman musuh bersama , golongan di dalam masyarakat sering melupakan perbedaan-perbedaannya dan karenanya lalu mudah berasimilasi.

Selain faktor-faktor yang mempercepat asimilasi, ada pula beberapa factor lain yang justru menghambat terjadinya asimilasi. Faktor-faktor tersebut, antara lain adalah:

1. Terisolasinya kebudayaan sesuai golongan tertentu did ala masyarakat;
2. Kurangngnya pengetahuan suatu golongan tertentu mengenai kebudayaan yang dipunyai oleh golongan lain di dalam masyarakat;
3. Perasaan takut kepada kekuatan kebudayaan kelompok lain yang dirasakan oleh warga suatu kelompok tertentu.
4. Perasaan superior yang bercokol di hati para warga golongan pendukung kebudayaan tertentu yang mengakibatkan sikap meremehkan oleh mereka yang berperasaan superior ini terhadap kebudayaan kelompok lain;

5. Perbedaan ciri badaniah antar kelompok, seperti misalnya warna kulit, yang menandakan bahwa perbedaan antar kelompok yang ada itu tak hanya bersifat budayawi, tetapi juga rasial;
6. Perasaan in-group yang kuat, artinyabahwa para warga kelompok yang ada itu merasa sangat terikat kepada kelompok dan kebudayaannya masing-masing;
7. Gangguan-gangguan diskriminatif yang dilancarkan oleh golongan yang berkuasa terhadap golongan minoritas;
8. Perbedaan kepentingan dan pertentangan-pertentangan pribadi antara para warga kelompok, yang akhirnya bisa membawa-bawa pertentangan antar-kelompok.

4. Amalgasi

Amalgasi merupakan proses sosial yang melebur dua kelompok budaya menjadi satu, yang pada akhirnya melahirkan sesuatu yang baru.

B. Proses-Proses Sosial yang Disosiatif

Proses-proses sosial yang disosiatif akan diuraikan secara berturut-turut, yakni:

1. Kompetisi
2. Konflik
3. Kontravensi

1. Kompetisi

Kompetisi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah persaingan. Kompetisi merupakan bentuk interaksi sosial disosiatif yang sederhana. Proses ini adalah proses sosial yang mengandung perjuangan untuk memperebutkan tujuan-tujuan tertentu yang sifatnya terbatas, yang semata-mata bermamfaat untuk mempertahankan suatu kelestarian hidup.

Pada pokoknya, apa yang disebut kompetisi ini dapat dibedakan ke dalam dua tipe umum. Pertama, kompetisi personal, yaitu kompetisi yang bersifat pribadi antara dua orang. Kedua, kompetisi impersonal, yaitu kompetisi tak pribadi yang berlangsung (bukan antara orang-orang yang mendukung kepentingan-kepentingan pribadi) antara dua kelompok.

Persaingan dapat terjadi dan berlangsung di berbagai bidang. Persaingan di bidang ekonomi adalah suatu contoh yang dari hari ke hari kita saksikan. Persaingan ekonomi terjadi karena terbatasnya persediaan apabila dibandingkan dengan jumlah konsumen yang menghendaki barang yang ditawarkan dari persediaan itu. Di lain pihak, persaingan ekonomi juga terjadi karena terbatasnya jumlah konsumen yang berdaya beli apabila dibandingkan dengan jumlah barang yang dapat dilemparkan ke pasar oleh produsen. Kompetisi antar produsen ayng disebutkan di dalam kalimat terakhir ini ternyata dapat berdaya guna untuk mengatur secara rasional efisiensi produksi dan distribusi suatu produk tertentu. Secara tak langsung, kompetisi ini pun menjadi suatu cara untuk menyeleksi produsen-produsen yang benar baik.

Persaingan untuk memperebutkan kedudukan atau peranan tertentu di dalam masyarakat adalah persaingan di bidang sosial. Persaingan demikian ini bersifat personal atau bisa pula bersifat imperasional. Persaingan demikian ini bisa pula terjadi karena perbedaan ras. Dalam persaingan yang bersifat pribadi, perbedaan ras akan mempertajam sekali persaingan yang terjadi.

Sekalipun terbilang ke dalam golongan proses sosial yang bersifat disosiatif, namun persaingan itu memiliki fungsi atau efek yang mungkin bersifat positif juga. Dalam batas-batas tertentu, persainagn dapat:

1. Menyalurkan keinginan-keinginan perorangan atau kelompok-kelompok untuk saling menyaingi;
2. Merealisasi keinginan-keinginan, kepentingan-kepentingan, atau nilai-nilai yang sedang menjadi pusat perhatian publik, kearah tujuan-tujuan yang positif;
3. Mendudukan seseorang pada kedudukan-kedudukan atau peranan-peranan sosial yang tepat; dan
4. Menyaring warga-warga masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing sehingga terdapat pembagian kerja yang efektif.

Dikatakn pula bahwa persaingan itu justru akan dapat pula mematangkan kepribadian seseorang. Persaingan akan dapat memperluas pandangan dan pengetahuan seseorang. Persaingan pun akan mendorong seseorang untuk bekerja keras sehingga mendapatkan kemajuan-kemajuan yang berguna. Menghadapi persaingan dengan dunia luar, solidaritas ke dalam orang-orang sekelompok pun sering

malahan meningkat. Sementara itu, persaingan di dalam kelompok pun tak perlu menggoncangkan kelompok yang bersangkutan, asal saja persaingan intern itu dilakukan secara jujur dan sportif.

Akibat negative yang timbul dari persaingan tentu saja ada. Persaingan bisa saja menimbulkan disorganisasi, atau lebih memperparah disorganisasi yang telah terjadi. Perubahan-perubahan yang terjadi dengan cepat di dalam masyarakat akan mengakibatkan disorganisasi dalam struktur sosial, karena perubahan-perubahan yang cepat itu tidak memberikan kesempatan kepada para warga masyarakat untuk menyesuaikan dirinya dengan situasi yang telah berubah, dan untuk membuat berbagai reorganisasi. Ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dan untuk membuat berbagai reorganisasi ini akan kian nyata apabila terjadi persaingan-persaingan intern di dalam kelompok masyarakat.

2. Konflik

Berbeda hal dengan kompetisi yang selalu berlangsung didalam suasana “damai”, konflik adalah suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekrasan. Dalam bentuknya yang ekstrem, konflik itu dilangsungkan tidak hanya sekadar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi (jadi bersifat defensive), akan tetapi juga bertujuan sampai ke taraf pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya.

Banyak faktor yang telah menyebabkan terjadinya konflik-konflik. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang –perorangan telah menyebabkan konflik-konflik antar-individu. dalam konflik-konflik seperti ini terjadilah bentrokan-bentrokan pendirian, dan masing-masing pihak pun berusaha membinasakan lawannya (tidak selalu harus diartikan sebagai pembinasaan fisik, tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk pemusnahan simbolik alias melenyapkan pikiran-pikiran lawan yang tak disetujuinya).

Salah satu akibat positif yang lain dari suatu konflik itu adalah bertambahnya salidaritas intern dan rasa in-group suatu kelompok. Apabila terjadi pertentangan antara kelompok-kelompok, solidaritas antar-anggota di dalam masing-masing kelompok itu akan meningkat sekali. Solidaritas di dalam suatu kelompok, yang pada situasi normal sulit dikembangkan, akan langsung meningkat pesat terjadinya konflik dangan pihak-pihak luar.

Sejalan dengan peristiwa di atas,konflik-konflik antar kelompok pun memudahkan perubahan dan perubahan kepribadian individu. Apabila terjadi pertentangan antara dua kelompok yang berlainan, individu-individu akan mudah mengubah kepribadiannya untuk mengidentifikasikan dirinya secara penuh dengan kelompoknya.

3. Kontravensi

Kontravensi berasal dari kata Latin, conta dan venire, yang berarti menghalangi atau menantang. Dalam kontravensi dikandung usaha untuk merintangi pihak lain mencapai tujuan. Yang diutamakan dalam kontravensi adalah menggagalkan tercapainya tujuan pihak lain. Hal ini didasari oleh rasa tidak senang karena keberhasilan pihak lain yang dirasakan merugikan, walaupun demikian tidak terdapat maksud untuk menghancurkan pihak lain.

1. *Kasar dan halus.* Cara kasar ditandai dengan ketidaksopanan, berupa gangguan, ejekan, fitnah, provokasi, intimidasi. Cara halus ditandai dengan menggunakan bahasa dan perilaku yang sopan, namun mengandung makna yang tajam.
2. *Terbuka dan tersembunyi*. Cara terbuak apabila langsung dari pihak mana dan siapa yang melakukan pertentangan itu, serta apa isinya. Sebaliknya cara tersembunyi sulit diketahui. Secara visual sarana kontravensi telah tersebar dan diketahui umum, namun pelakunya tidak dikenal dan hanya dapat diketahui dengan meraba-raba.
3. Resmi dan tidak resmi. Cara resmi adalah penentangan yang diterima dan ditegakkan dengan ketentuan hukum atau dengan ketentuan yang dilembagakan oleh kekuasaan Negara atau oleh kekuasaan agama. Sedangkan cara tidak resmi adalah pertentangan yang tidak dikukuhkan peraturan hukum dan tidak dilembagakan.

Sementara itu, beberapa akibat yang ditimbulkan dari adanya kontravensi adalah: (1) bagi pihak yang menjadi sasaran, tujuan yang hendak dicapai terpaksa digagalkan atau ditunda sampai hambatan mereda; (2) bagi pihak ketiga secara tidak langsung yang terlibat dalam ketegangan, khususnya pihak berwajib harus mengawasi agar kontravensi tidak berkembang menjadi konflik.

BAB IX. PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT SEKITAR HUTAN

1. Pengertian Perubahan Sosial

Perubahan sosial menyangkut dua dimensi, yaitu Dimensi Struktural dan dimensi cultural. Perubahan dimensi structural menyangkut hubungan antar individu dan pola hubungan termasuk di dalamnya mengenai status dan peranan, kekuasaan, otoritas, hubungan antar status,integrasi, dan sebagainya. Perubahan dimensi cultural menyangkut nilai-nilai dan norma-norma sosial. Perubahan sosial dapat dilihat dalam kurun waktu tertentu, namun perubahan itu ada yang berlangsung cepat dan ada pula yang berlangsung lambat dan lama.

Perubahan sosial dapat dilihat dari berbagai teori sosiologi, misalnya teori sosiologi. Menurut Vago (1989), pendekatan evolusioner melihat perubahan sosial merupakan suatu proses dari masyarakat tradisional menuju ke masyarakat sekuler modern. Perubahan yang sifatnya evolusi disebabkan oleh tambahan gradual dari ilmu baru. Teori pembangunan yang diutarakan oleh Rostow pun dianggap merupakan bagian dari perubahan sosial yang bersifat evolusioner.

Dalam bingkai teori konflik, perubahan sosial merupakan wujud dari kehidupan masyarakat yang merupakan suatu arena perjuangan atau pergumulan untuk mendapatkan sesuatu yang langka. Perubahan dipandang sebagai proses intrinsic dalam masyarakat. Differensial structural dirasakan sebagai sumber konflik dan perubahan sosial terjadi hanya dengan melalui terjadinya konflik. Dalam teori konflik yang diajukan Karl Marx dinyatakan bahwa konflik merupakan kondisi normal dalam kehidupan sosial yang sifatnya internal dan antara konflik dengan perubahan dianggap tidak dapat dipisahkan. Konflik mempunyai efek positif dan negative, bahkan konflik merupakan bagian dari proses sosialisasi, ia tak dapat dipungkiri sebab individu-individu memiliki kecenderungan mencintai dan membenci. Konflik tidak harus merusak atau disfungsional terhadap suatu system, tetapi bisa diarahkan menguntungkan suatu system, karena itu konflik dapat disebut sebagai sesuatu yang mengandung makna peningkatan perubahan sosial.

Teori structural fungsional menjelaskan bahwa masyarakat terbentuk atas substruktur-substruktur yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri,saling bergantung sehingga perubahan-perubahan yang terjadi dalam fungsi yang satu akan menyebabkan perubahan di fungsi yang lain. Lebih lanjut, teori structural fungsional menyatakan bahwa setiap substruktur yang telah mantap akan menjadi penopang aktivitas-aktivitas atau substruktur-substruktur lainnya dalam suatu system sosial.

Dalam teori psikologi sosial, perubahan sosial sangat dipengaruhi oleh motivasi pribadi anggota-anggota masyarakat. Sebagai contoh, kebangkitan dan kemajuan kapitalisme Eropa Barat dan As sangat berkorelasi positif dengan etika Protestan yang diyakini anggota masyarakat di sana (pendapat ini dibenarkan oleh Bellah dan Geertz). Seorang teoritisi lain yang tergolong memberikan pernyataan dalam bingkai teori psikologi sosial adalah Hagen's, menurut dia perubahan sosial dari tradisional ke modern tidak bisa terjadi tanpa perubahan dalam personalitas dan modern merupakan produk kepribadian yang berbeda. Teori perubahan sosial yang tergolong teori psikologi sosial yang diajukan oleh Clelland, yaitu perubahan sosial yang menyebabkan kemajuan masyarakat didasari oleh adanya kebutuhan atau dorongan untuk berprestasi (the need for achievement).

A. Defenisi Para Ahli Tentang Perubahan Sosial

1. Kingsley Davis. Perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya timbulnya orhanisasi buruh dalam masyarakat kapitalis menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dalam hubungan antara buruh dan majikan dalam perusahaan. Perubahan ini bisa menyebabkan perubahan dalam organisasi ekonomi-politik. Misalnya adanya partai buruh.
2. Mac. Iver. Perubahan sosial sebagai perubahan dalam hubungan sosial (social relations) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) dalam hubungan sosial.
3. Daniel Bell. Menyebut adanya masyarakat post industry dengan cirri berorientasi pada orang, yakni pelayanan jasa. Meningkatnya pekerjaan professional dan teknis, misalnya hokum, kedokteran, konselor, dan lain-lain.

4. Karl Marx. Perubahan sosial terjadi karena perkembangan teknologi atau kekuatan produktif, dan hubungan antara kelas-kelas sosial yang berubah.
5. Everest M. Rogers

   Ada tiga macam perubahan sosial:

   1. *Immanent change*, suatu bentuk perubahan sosial yang berasal dari dalam system itu sendiri dengan sedikit atau tanpa inisiatif dari luar.
   2. *Selective contract change*, suatu perubahan sosial yang terjadi apabila *outsider* secara tidak sengaja dan spontan membawa ide-ide baru kepada anggota dari suatu system sosial.
   3. *Direct contract change*, suatu perubahan terjadi bila ide-ide atau cara-cara baru dibawa secara sengaja oleh *outsider*

   E.M. Rogers mengatakan bahwa perkembangan ekonomi adalah suatu tipe perubahan sosial yang biasanya menyangkut kepada ketiga bentuk perubahan sosial di atas.

2. Bentuk-bentuk Perubahan Sosial

Bentuk-bentuk perubahan sosial dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu : (1) Kecepatan perubahan; (2) Tingkat Perubahan; (3) Perencanaan Perubahan.

Johnson (1995) mengatakan perubahan sosial ditandai:

1. Hilangnya kepercayaan terhadap institusi-institusi sosial yang mapan terutama lembaga-lembaga ekonomi dan politik.
2. Otoritas yang terdapat dalam institusi-institusi sosial utama dipertanyakan.
3. Menurunnya etika kerja tradisional .
4. Penolakan secara luas terhadap teknokrasi dan berbagai segi organisasi birokarasi.

a. Kecepatan Perubahan Sosial

Kecepatan perubahan sosial sebenarnya bersifat relative, seberapa lama waktu yang dikatakan cepat dan berapa lama pula yang disebut lambat. Umumnya perubahan sosial yang berlangsung cepat hanya berlangsung beberapa tahun, sedangkan perubahan sosial yang lambat berlangsung puluhan tahun dan bisa lebih dari satu generasi.

Perubahan sosial yang berlangsung lambat disebut evolusi. Evolusi terjadi dengan sendirinya dan tidak direncanakan. Perubahan ini merupakan usaha masyarakat menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan dan kondisi baru sejalan dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Secara alamiah, suatu masyarakat selalu berusaha menyelaraskan diri dengan keadaan sekitarnya. Jadi pada dasarnya, tidak ada masyarakat yang tidak melakukan perubahan sama sekali. Masyarakat Badui yang dikenal paling tertutup terhadap perubahan-perubahan yang terjadi diluar mereka,akhirnya juga mengadakan perubahan-perubahan dalam beberapa hal kehidupan.

Teori tentang evolusi secara gais besar terdiri dari dua aliran. Pertama adalah *Unilear theories of evolution* dan yang kedua *Universal theories of evolution*. Menurut teori yang pertama, perkembangan masyarakat mengikuti tahap-tahap tertentu dan tetap, yaitu dari masyarakat sederhana menuju masyarakat yang kompleks. Teori yang kedua menerangkan bahwa perkembangan masyarakat bergerak dari kelompok-kelompok yang homogeny menuju ke kelompok-kelompok yang heterogen. Jadi, perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahapan-tahapan yang tetap.

Banyak kasus pembangunan di Negara yang sedang berkembang mengikuti kaidah teori evolusi yang kedua. Negara berkembang seperti Indonesia memiliki beraneka ragam masyarakat, beberapa komunitas penduduk Indonesia tahapan-tahapan perkembangannya tidaklah selalu sama.

Perubahan sosial yang berlangsung cepat disebut revolusi. Revolusi selain mempunyai cirri waktu berlangsung yang cepat juga menyangkut sendi-sendi dasar kehidupan masyarakat, misalnya system kekeluargaan, system politik, system ekonomi, system mata pencahariandan lainnya. Beberapa kejadian revolusi dapat kita telaah kejadiannya antara lain: Revolusi Kemerdekaan , Revolusi Industri, Revolusi Negara-negara Eropa Timur dan Revolusi Hijau (green revolution).

Revolusi hijau merupakan perubahan besar-besaran dalm hal perubahan teknologi paertanian yang bertujuan meningkatkan produksi dan kualitas produksi baik teknologi biologis, kimia, mekanis, maupun sosial. Telah kita ketahui bibit-bibit unggul baru (varietas unggul baru). Lahirnya varietas-varietas unggul baru itu telah membawa dampak perubahan kelembagaan di pedesaan seperti perubahan pola hubungan

patron-klien, pola pengupahan, system penguasaan tanah, curahan jam kerja petani, pendapatan dan gaya hidupnya. Teknologi kimia seperti pupuk buatan dan pestisida mempunyai dampak terhadap lingkungan yang pada akhirnya merubah pola-pola kehidupan masyarakat. Mekanisasi pertanian secara langsung mengganti tenaga manusia dan hewan, sehingga dapat dijuga bahwa penerapannya di desa pertanian yang padat akan menyingkirkan beberapa tenaga kerja atau jam kerjanya.

Kombinasi proses revolusi hijau dan pertumbuhan penduduk menurut Geertz telah melahirkan suatu keadaan yang disebut pembagian kemiskinan. Karena bertambahnya jumlah penduduk, pemilikan tanah yang kecil-kecil dan pengangguran tak kentara yang merajalela membuat masyarakat desa saling membagi rejeki yang didapat dari pertaniannya yang memang sudah sempit.

b. Tingkat Pengaruh Perubahan

Perubahan sosial dari tingkat pengruhnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu: perubahan sosial yang tingkat pengaruhnya besar dan yang tingkat pengaruhnya kecil.

Perubahan sosial yang mempunyai pengaruh kecil adalah perubahan sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau tidak berarti bagi masyarakat. Contohnya, perubahan mode pakaian, mode rambut, arsitektur bangunan, dan sebagainya. Perubahan-perubahan seperti mode pakaian dan mode rambut terkadang cenderung bersiklus. Perubahan ini dikatakan berpenngaruh kecil pada masyarakat karena tidak menyangkut sendi-sendi dasar kehidupan manusia. Perubahan kecil ini tidak berdampak luas manusia secara umum.

Perubahan sosial yang tingkat pengaruhya besar pada sendi-sendi dasar kehidupan manusia secara umum antara lain : Industrialisasi pada masyarakat agraris ke industry membawa pengaruh besar pada beberapa system dan struktur sosial. Proses industrialisasi merubah pola hubungan kerja tradisional menjadi modern rasional. Perasaan gemeinschaft antar pekerja dalam kehidupan pertanian tradisional berubah menjadi gesselscahft, hubungan antara atasan bawahan yang semula bersifat kekeluargaan menjadi utilitarian komersil. Dalam masyarakat industry, hubungan-hubungan kekeluargaan dalam system kekerabatan seperti pola silaturrahmi, frekuensi bertatap muka dan latar belakang bertatap muka tak luput dari perubahan. Sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat agraris yang saling membutuhkan dengan pola

patron-klien antara status tinggi dan status rendah berubah menjadi hubungan utilitarian antara pemilik faktormproduksi dengan tenaga kerja yang tak punya factor produksi (bahkan tenaga kerja didudukkan sebagai factor produksi itu sendiri). Industrialisasi dalam beberapa hal mendepat tenaga kerja sehingga menciptakan pengangguran (unemployment) atau membuat pekerjaan seseorang kalah bersaing dengan produk barang/jasa yang diproduksi industry (underutilization).

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu contoh lain dari perubahan sosial yang tingkat pengaruhnya besar. Di pedesaan Jawa menurut Geertz, pertumbuhan penduduk dapat menyebabkan involusi pertanian dan kemiskinan. Tekanan jumlah penduduk yang semakin besar terhadap tanah pertanian yang cenderung menyempit membuat jumlah petani sempit dan tunakisma bertambah. Jumlah dan status pemilikan lahan ini selanjutnya dapat menjadi factor pendorong terjadinya migrasi penduduk ke luar daerahnya dan akan menyebabkan dampak lanjutan di tempat tujuan para migrant. Contohnya bagi mereka yang berurbanisasi akan menyebabkan masalah perumaha, kesehatan, pelayanan umum dan kejahatan di kota tujuan mereka.

c. Perubahan yang Direncanakan dan Tidak Direncanakan

Perubahan yang direncanakan dan merupakan perubahan yang telah dirancang terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di masyarakat (agent of change). Perubahan sosial yang direncanakan ini sering disebut perencanaan sosial (sosial planning) atau rekayasa (sosial engineering). “cetak biru” perubahan sosial di Indonesia secara umum mengacu pada Garis-garis besar Haluan Negara. Tujuan pembangunan Indonesia sebagaiperubahan sosial besar yang dilakukan bangsa ini bertujuan mencetakmanusia Indonesia seutuhnya. Kita dapat melihat ternyata pelaksanaan pembangunan lebih cenderung economic growth dari pada sisi kehidupan yang lain.

Perubahan sosial yang tidak direncanakan merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dengan sendirinya di masyarakat atau di luar scenario perencanaan sosial yang dibuat. Proses pembangunan yang mengacu pada economic growth dengan industrialisasi ternyata menghasilkan konglomerasi. Banyak beberapa ahli yang menyebut hal ini dengan pengakumulasian asset ekonomi pada beberapa golongan.

Proses pembangunan perkotaan dengan industrialisasi menarik penduduk desa berusia muda untuk memasuki perkotaan sebagai para migrant disamping didorong oleh terbatasnya kesempatan kerja yang ada di pedesaan. Program Inpres Desa Tertinggal di satu sisi direncanakan untukmengentaskana kemiskinan, disisi lain akan menimbulkan rasa ketergantungan pada orang-orang yang mendapat bantuan bila para pendamping IDT tidak dapat memotivasi mereka untuk berprilaku yang mengarah pada produktivitas dan efisiensi. Program keluarga berencana tidak dapat kita bantah telah sukses menekan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, namun di sisi lain dengan derasnya informasi pemakaian alat-alat kontrasepsi pada berbagai golongan masyarakat termasuk muda-mudi yang belum menikah menyebabkan penyalah gunaan oleh orang-orang yang tidak berhak. Proses-proses perubahan sosial merupakan topic yang menarik disimak di negara-negara yang sedang membangun seperti Negara kita ini.

3. Faktor-faktor yang Menyebabkan Perubahan Sosial

A. Sebab-Sebab Terjadinya Perubahan Sosial

Menurut Mooris Ginsberg (1984) sebab-sebab terjadinya perubahan sosial adalah sebagai berikut:

a. Keinginan individu dalam masyarakat untuk secara sadar mengadakan perubahan;
b. Sikap-sikap pribadi yang dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang berubah;
c. Perubahan-perubahan structural dalm bidang sosial, ekonomi dan politik;
d. Pengaruh eksternal;
e. Munculnya pribadi-pribadi dan kelompok yang menonjol dalam masyarakat (kelas menengah);
f. Munculnya peristiwa-peristiwa tertentu, misalnya kelas kekalahan dalam perang seperti kekalahan Jepang terhadap Sekutu dalam PD II menyebabkan terjadinya perubahan ekonomi dan politik di jepang;
g. Tercapainya consensus dalam masyarakat untuk meraih suatu tujuan bersama.

Pada dasarnya factor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial ada dua, yaitu: faktor internal (dari dalam masyarakat) dan Faktor Eksternal (dari luar masyarakat).

B. Faktor-faktor Internal

Faktor internal mencakup factor manifest (disengaja), factor internal laten (tidak disengaja dan merupakan potensi yang selalu ada dalam setiap masyarakat), dan factor perubahan kependudukan. Faktor internal manifest juga masih terbagi menjadi dua yaitu tingkat kolektif (dilakukan bersama oleh anggota-anggota masyarakat) dan tingkat individu (hanya dilakukan oleh individu-individu tertentu).

Beberapa factor internal manifest kolektif yang dapat menyebankan perubahan sosial antara lain:

- Penemuan Baru (Inovation and Invention)

Penemuan baru bisa berupa inovasi dan invensi. Inovasi merupakan penemuan baru yang diciptakan berdasarkan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya yang sudah ada. Inovasi merupakan rekayasa mendapatkan pengetahuan atau barang baru berdasarkan rakitan pengetahuan atau barang yang telah ada. Barang baru hasil inovasi sebelumnya belum pernah ada. Invensi merupakan penemuan barang yang sebenarnya telah ada tetapi belum diketahui manusia. Proses penciptaan inovasi, terutama dalamdunia keilmuan, jelas tidak dapat dipisahkan dari penemuan-penemuan sebelumnya yang dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itu inovasi dikatakan kolektif. Inovasi dalam bidang sosial bisa berupa konsep, teori hokum, metode dan sebagainya yang bersifat immaterial, tetapi dapat juga berupa benda-benda seperti mesin uap, traktor, varietas unggul, obat-obatan baru dan lain-lain. Inovasi materiil dan immaterial secara sengaja dicari oleh manusia, bahkan manusia menciptakan lembaga-lembaga khusus untuk menciptakan inovasi baru seperti balai penelitian dan perguruan tinggi.

Walalupun beberapa jenis inovasi yang diciptakan manusia berupa benda namun hal itu mempunyai dampak sosial. Di muka telah dijelaskan bagaimana suatu industry mempengaruhi hubungan kerja, pergaulan antar tetangga dan keluarga, gaya hidup, tingkat kelahiran dan lain-lain. Mekanisasi menyebabkan rasionalisasi pada petani dan pendepakan tenaga buruh. Varietas unggul padi baru menyebabkan beberapa kelembagaan mengalami perubahan.

- **Gerakan Sosial (sosial movement)**

Gerakan sosial adalah suatu usaha kolektif yang terus menerus untuk meningkatkan suatu perbaikan dalam suatu masyarakat atau kelompok di mana mereka berada. Karakteristik dasar yang terdapat dala gerakan sosial antara lain:

a) Keanggotaannya bersifat tidak tentu.
b) Kepemimpinannya ditentukan oleh reaksi yang informal dari para anggotanya.
c) Dalam beberapa hal tindakannya dilakukan secara terus menerus.
d) Ada sesuatu yang ingin dicapai.

Gerakan sosial timbul karena ada kondisi tertentu dalam masyarakat, antara lain:

a) Institusi yang ada dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hidup manusia gagal menjalakannya. Sistem norma dan sistem nilai dalam institusi tidak dapat diterapkan dalam kehidupan yang dialami saat itu. Dalam konteks negara, kita dapat mengamati bagaimana institusi-institusi system komunis yang berlaku di negara-negara Eropa Timur gagal mencapai masyarakat yang dicita-citakannya sehingga menimbulkan gerakan masyarakat yang menumbangkan rezim penguasa di sana.
b) Timbulnya keresahan sosial, yaitu keadaan hidup yang ditandai oleh meluasnya perasaan tidak pasti, tidak menentu, tidak aman, atau perasaan yang serupa lainnya.
c) Ada ketidak puasan pribadi yang menghasilkan frustasi. Ketidak puasan pribadi ini terus meluas di antara para anggota masyarakat. Munculnya ketidak sesuaian antara cita-cita dan kemampuannya.
d) Ada alternatif baru untuk menggantikan institusi sosial lama yang tidak memenuhi harapan anggota masyarakat. Perencanaan sosial (social planning atau sosial engineering).
e) Perencanaan sosial merupakan proses bersama yang bersifat rasional. Perencanaan sosial dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa kegiatan penting yaitu penelitian, pengusulan, diskusi dan pengambilan keputusan. Perencanaan sosial berguna untuk menetukan tindakan apa yang akan diambil sebagai alat mencapai tujuan yang diinginkan.

Perencanaan sosial diperlukan untuk menjamin terjadinya perubahan sosial yang membawa ke arah kemajuan (progress). Agar hal ini dapat dicapai amak diperlukan adanya pemikiran yang matang mengenai sumber daya apa saja yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan itu dan semua hambatan-hambatan yang dihadapi.

Beberapa factor yang merupakan penyebab terjadinya perubahan sosial internal manifest tingkat individu di jelaskan di bawah ini. Faktor ini mempunyai hubungan erat dengan konsep kharisma. Kharisma adalah mutu luar biasa yang ada pada diri seseorang yang merupakan sumber kekuasaan dan otoritas baginya. Orang mempunyai kharisma dimata orang lain bila menginginkan perubahan, besar kemungkinan akan diikuti. Perubahan sosial yang disebabkan oleh kesengajaan tingkat individu sangat ditentukan oleh bentuk-bentuk penyesuaian individu. Tentang bentuk-bentuk penyesuaian terhadap keadaan lingkungannya, Robert K Merton menjelaskan sebagai berikut:

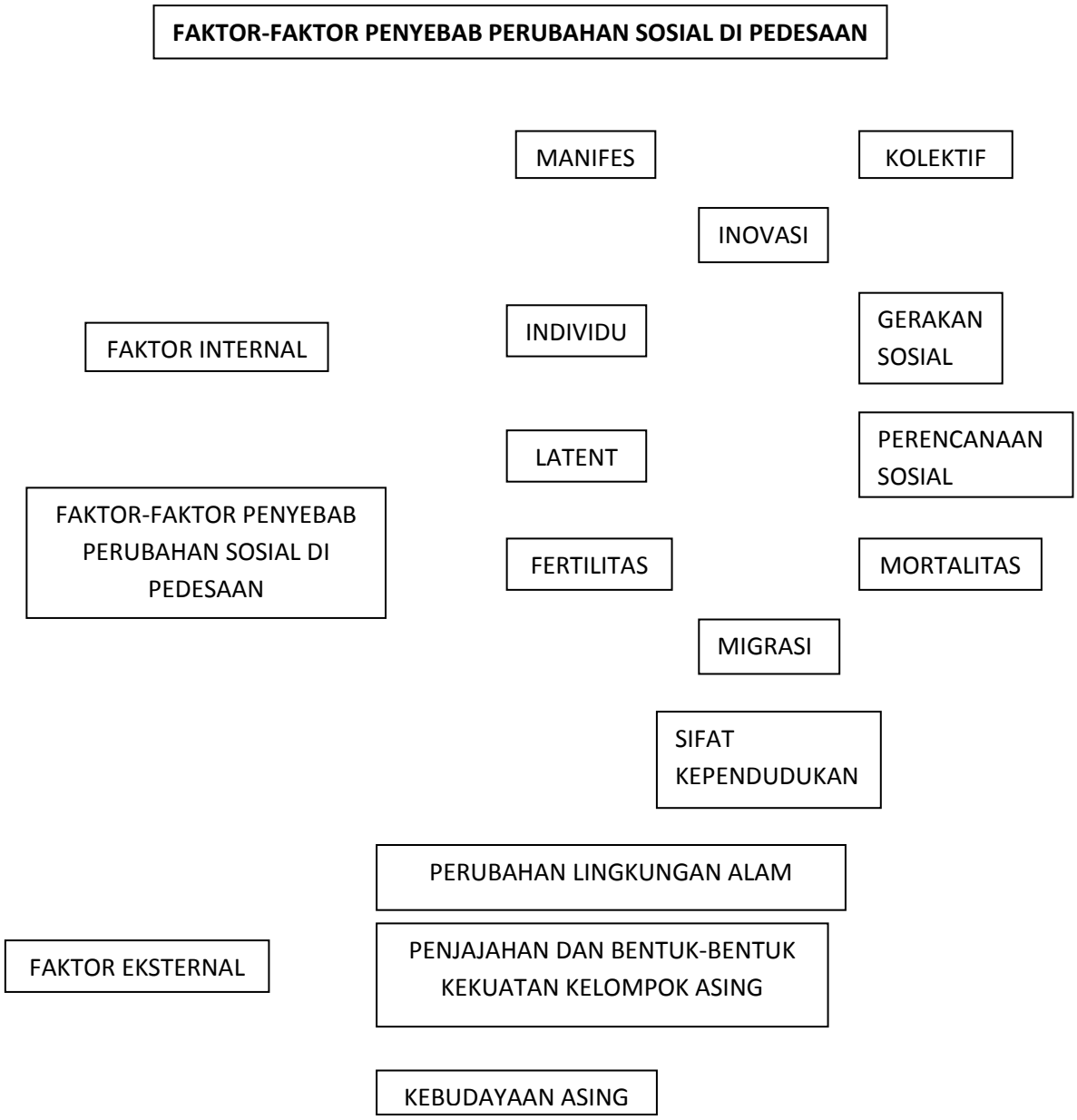

Tabel 2: Tipologi Bentuk Penyesuaian Individu

Bentuk Penyesuaian individu	Tujuan yang digariskan oleh kebudayaan	Sarana Institusional
1. Konformitas	+	+
2. Inovasi	+	-
3. Ritualisme	-	+
4. Retritisme	-	-
5. Pemberontakan	+ -	+-

Keterangan : + sesuai; - tidak sesuai

Tujuan yang digariskan oleh kebudayaan adalah nilai-nilai yang sudah terdapat dalam masyarakat dan nilai-nilai ini mempengaruhi perilaku manusia (internalized). Tujuan juga menyangkut cita-cita bersama masyarakat yang secara ideal berusaha diraih. Nilai-nilai ini hanya ada dalam benak pikiran masing-masing anggota masyarakat.

Sarana institusional adalah alat atau sarana yang disediakan kebudayaan yangd apat dipergunakan untuk mencapai tujuan di atas. Ada pula yang menyebut cara yang telah melembaga dalam mencapai tujuan di dalam kehidupan masyarakat.

Konformitas merupakan cara penyesuaian diri seorang individu terhadap tujuan maupun sarana yang telah digariskan oleh kebudayaan dalam masyarakat di mana ia tinggal. Dalam bab interaksi sosial juga telah dijelaskan bahwa manusia secara kodrati selalu ingin selaras dengan kehidupan sosial di sekitarnya. Konformitas merupakan upaya manusia untuk menyamankan diri dengan mengubah dirinya agar sesuai dengan tujuan kebudayaan dan sarana institusional yangada di masyarakat. Seorang pemuda yang berurbanisasi ke kota karena alas an pendidikan akan mengadakan konformitas.

Inovasi adalah penyesuaian diri mausia dengan tujuan yang digariskan oleh kebudayaan tetapi caranya ia tolak. Seorang petani maju mempunyai cita-cita yang sama dengan petani lainnya, yaitu: ingin keluarga sejahtera tanpakesulitan pemenuhan pokok, pendapatan yang bertambah baik, pendidikan anak yang lebih baik dan sebaginya yang pada prinsipnya sama dengan cita-cita petani desa di situ. Untuk mencapai tujuan, para petani lain selalu bertanam varietas local yang sudah turun temurun (sarana institusional). Menurut petani maju, sarana yang digunakan oleh petanipada umumnya (varietas local) tidak tepat untukmencapai tujuan, karena itu harus diganti denga varietas unggul. Dalam proses penyesuaian petani maju ini terlihat bahwa tujuan yang digariskan oleh masyarakat sekitar dia tidak menolaknya tetapi cara

meraih tujuan itu diperbaiki dengan inovasi baru yakni varietas unggul. Penolakan terhadap sarana institusional lama didasarkan atas pertimbangan bahwa cara yang sudah melembaga (institusionalized) tidak efektif dan efisien.

Ritualisme adalah penyesuaian diri yang dilakukan oleh seseorang karena tidak mau menerima tujuan yang sudah digariskan kebudayaan (tidak percaya) tetapi dia hanya menerima cara-cara yang institusional. Ritualisme juga berarti paham yang sangat mementingkan upacara dan sering memilih menyendiri di tempat tertentu.

Retritisme artinya penyesuaian diri seseorang terhadap lingkungannya di mana orang tersebut tidak menyetujui tujuan dan sarana yang telah ada di masyarakat. Seorang sufi merupakan contoh yang ekstrim pada proses retritisme. Dia memnolak tujuan kehidupan yang dianut anggota masyarakat pada umumnya berikut cara-cara mencapai tujuan itu. Karena ketidaksesuaian itu, dia memutuskan diri untuk mengundurkan diri dari kehidupan yang melingkupinya dan memilih menyendiri di tempat tertentu.

Pemberontakan artinya penyesuaian diri yang menolak nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat baik tujuan maupun sarananya. Untuk itu dia mengusulkan sesuatu yang baru sebagai pengganti tujuan dan sarana yang telah ada.

Faktor internal lain yang menjadi penyebab timbulnya perubahan sosial adalah factor internal latent atau konflik. Dalam suatu organisasi sosial kelompok atau masyarakat terdapat dua kepentingan yang saling berlawanan. Satu sama lain dan bersifat (potensial). Hal ini dapat kita sadari, karena dalam organisasi, kelompok atau masyarakat masing-masing individu mempunyai status yang berbeda-beda. Perbedaan kepentingan tersebut sewaktu-waktu dapat muncul kepermukaan , sehingga terjadi ketegangan-ketegangan (konflik) yang akan membawa perubahan sosial.

Ada yang berpendapat bahw akonflik timbul karena adanya ketidaksesuaian dalam hal: sasaran/tujuan (goal), nilai (value), pikiran (cognition), perasaan (affect) dan perilaku (behavior). Seperti dijelaskan dalam bab proses-proses sosial bahwa konflik tidaklah selalu menimbulkan dampak negative. Jika dikelola denga baik, konflik justru akan menjadi kekuatan yang dapat mengembangkan organisasi atau masyarakat.

Konflik sebenarnya mempunyai beberapa fungsi positif (tentunya pada tingkatan yang optimal) antara lain: memebuat organisasi lebih dinamis karena mendorong inovasi untuk berprilaku unggul, membuat perasaan kohesi intra kelompok menguat dan sebagai alat keseimbangan kekuasaan (power equalizer).

Faktor penyebab yang ketiga dari factor internal manifest, dan latent yaitu perubahan kependudukan menyangkut tiga hal pokok yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi (termasuk didalamnya inmigrasi, urbanisasi dan transmigrasi).

Tingkat fertilitas dan mortalitas penduduk sangat mempengaruhi perencanaan suatu masyarakat. Indonesia mengalami ledakan penduduk sejak tahun 50-an sampai 70-an. Akibat *baby boom* itu pemerintah harus menyediakan berbagai kepentingan umum yang cukup banyak seperti Puskesmas, Sekolah, Lapangan kerja dan lain-lain.

Negara mempunyai tingkat fertilitas rendah bahkan secara sengaja mendorong warga negaranya untuk mempunyai anak dengan berbagai program, misalnya dengan subsidi anak atau tunjangan anak yang tinggi, sebaliknya Negara yang mempunyai tingkat fertilitas tinggi akan berusaha mencegah naiknya jumlah kelahiran dengan mensubsidi program pencegahan kehamilan, misalnya dengan menggratiskan alat kontrasepsi.

Tingkat mortalitas yang tinggi di suatu masyarakat atau Negara secara langsung akan mengancam eksistensi masyarakat atau Negara yang bersangkutan sehingga diperlukan usaha mencegah kenaikan jumlah kematian, misalnya dengan memperbaharui program kesehatan dan jaminan keamanan. Tingkat kenaikan jumlah kelahiran yang tinggi dan penurunan tingkat kematian banyak terjadi di Negara yang sedang berkembang, sedangkan bila hanya tingkat kematian yang tinggi umumnya terjadi di negara-negara yang dilanda perang atau Negara yang kondisi kesehatannya buruk.

B. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan kekuatan-kekuatan di luar masyarakat yang dapat mendorong terjadinya perubahan sosial. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Perubahan Lingkungan Alam

Tidak dipungkiri bahwa perubahan-perubahan lingkungan alam menyebabkan perubahan sosial. Lambat atau cepat perubahan lingkungan fisik manusia mengubah perilaku manusia. Peristiwa-peristiwa gempa bumi di Lampung, tsunami di jawa timur dan bencana letusan Gunung Merapi di Jawa Tengah, telah mengubah pola perilaku dan mata pencaharian beberapa penduduk setempat, bahkan sebagian melakukan transmigrasi. Di daerah transmigrasi tentu mereka memulai dengan pola kehidupan yang baru.

2. Penjajahan atau Bentuk Kekuatan Kelompok dari Luar Masyarakat

Dari sejarah telah kita ketahui bahwa penjajahan Belanda mempunyai pengaruh yang cukup mendalam pada kehidupan rakyat Indonesia. Pelapisan sosial yang ada di Indonesia seperti yang kita lihat beberapa perkebunan peninggalan Belanda masih berbau kehidupan tempo dulu. Undang-undang yang berlaku di Negara kita ini pun sebagian merupakan peninggalan undang-undang Belanda.

Kekuatan kelompok atau Negara lain sekarang tidak lagi berujud penjajahan fisik seperti yang terjadi dahulu, tetapi lebih banyak disebabkan oleh factor penentu lain seperti ekonomi. masyarakat yang secara umum ekonominya tergantung pada masyarakat yang lain akan mudah mendapat tekanan dari masyarakat yang berekonomi lebih kuat.

3. Kekuatan Asing

Kebudayaan asing yang diterima dan diterapkan dalam suatu masyarakat dapat menimbulkan perubahan-perubahan sosial. Kebudayaan asing itu masuk ke suatu masyarakat melalui sarana-sarana komunikasi yang ada seperti radio, televisi, majalah dan lain-lain. Traktor, alat perontok, sepeda motor, televisi, obat-obatan, merupakan contoh kebudayaan fisik yang diadopsi masyarakat.

4. Modernisasi dan Pembangunan

Modernisasi maupun pembangunan merupakan perubahan sosial yang direncanakan namun sesungguhnya keduanya mempunyai pengertian yang berbeda. Modernisasi diartikan perubahan dari kehidupan bersama yang tradisional dalam arti teknologi (material dan organisasi sosial) kea rah kehidupan bersama yang modern. Menurut Nur Cholis Madjid (1968), modernisasi adalah proses perombakan pola pikir dan tata kerja lama yang tidak akhliyah dan menggantinya dengan pola pikir dan tata kerja baru yang akhliyah rasional.

Sifat-sifat masyarakat yang modern telah dijelaskan di bab system sosial, antara lain: Teknologinya selalu berkembang dan pembagian kerjanya bersifat kompleks, mempunyai sikap positif terhadap perubahan, nilai pengetahuan dan pendidikan tinggi, mempunyai pandangan yang kosmopolit dan mempunyai emphaty yang tinggi. Ciri-ciri masyarakat tradisional merupakan kebalikan dari sifat-sifat diatas.

Pengertian modernisasi ditangkap beraneka ragam pola pikir masyarakat. Ada yang menganggap modernisasi sama dengan westernisasi. Penganut pengertian ini beranggapan bahwa teknologi dan nilai-nilai barat diterima tanpa mempersoalkan kondisi masyarakat setempat (modernisasi merupakan ekspansi budaya). Kelompok yang kedua menganggap modernisasi sama dengan pembangunan. Modernisasi dan pembangunan di sini berorientasi pada penerapan teknologi yang diadopsi akan tersalur dan menetes ke lapisan masyarakat bawah. Penganut pegertian yang kedua ini cenderung menganggap modernisasi sebagai proses pemacuan pertumbuhan ekonomi. Kelompok yang ketiga melihat pembangunan sebagai proses modernisasi dan prose situ bertujuan mengubah susunan dan pola masyarakat. Modernisasi dengan pembangunan sebagai salah satu pendekatan berusaha membuat mobilitas sosial.

Teori modernisasi muncul pada tahun 1950-an. banyak ahli yang mengutarakan teori-teori modernisasi seperti Huntington, Mc Clelland dan Alex Inkeles. Di Negara-negara Barat proses modernisasi berlangsung mengikuti tahap-tahap seperti di bawah ini:

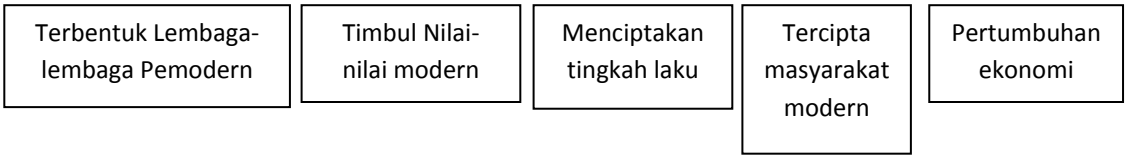

Gambar 6: Tahap-tahap Modernisasi Masyarakat

Di Indonesia nampaknya tahap – tahap ini tidak berlangsung demikian. Lembaga-lembaga pemodern memang ada tetapi tidak menimbulkan nilai-nilai modern seperti yang diharapkan sehingga tingkah laku modern yang rasional juga tidak merata di masyarakat. Justru yang sangat menarik dalam kasus modernisasi di Negara kita adalam lompotan langsung ke tahap pertumbuhan ekonomi. Nilai-nilai dan perilaku menyusul mengikuti pertumbuhan ekonomi, ini berbeda dengan proses modernisasi si Negara barat yang diawali dengan tahap-tahap sebelumnya seperti gambar diatas baru terjadi pertumbuhan ekonomi. Akibat proses ini muncul budaya yang oleh Loekman Soetrisno disebut *mediokritas*. Mediokritas merupakan budaya "tanggung" dimana secara fisik mengadopsi barang modern tetapi perilaku modern belum diterima. Contohnya kita dapat mampu membeli dan memakai jam tangan, sehingga kemana-mana memakainya. Ironisnya aeloji yang kita bawa ke sana ke mari itu tidak gunakan untuk berprilaku yang tepat waktu.

C. Agen-Agen Perubahan Sosial

Agen-agen sosial adalah ekonomi, lembaga pendidikan, penemuan ilmu dan teknologi, perkembangan media massa, kepemimpinan yang baru, system transportasi yang maju serta peperangan.

Bentuk-bentuk perubahan sosial terbagi lagi dalam bentuk perubahan sosial yang bergerak secara lambat (evolusi) dan perubahan sosial yang sangat cepat (revolusi).

Perubahan sosial yang evolutif berlangsung secara bertahap, terjadi dengan sendirinya bahkan tanpa rencana atau kehendak tertentu terlebih dahulu. Perubahan terjadi karena usaha-usaha masyarakat menyesuaikan dirinya dengan keperluan-keperluan, keadaan-keadaan dan kondisi-kondisi baru sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat yang ada.

Berbeda dengan itu, perubahan sosial yang revolusioner adalah perubahan sosial yang berlangsung cepat dan seketika dan menyangkut sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Perubahan revolusioner dapat direncanakan terlebih dahulu atau tanpa rencana sama sekali. Sementara, ukuran kecepatan perubahan sosial itu sifatnya relative,karena revolusi dapat memakan waktu yang cukup lama seperti revolusi industry di Inggris. Ia tetap disebut sebagai perubahan revolusioner karena terjadi perubahan produksi dari tanpa menggunakan mesin ke penggunaan mesin yang besar-besaran. Penggunaan mesin berdampak pada tingkat produktivitas yang tinggi dang mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat industry seperti hubungan kekeluargaan, hubungan antara buruh dan majikan, dan lain sebagainya.

Agar suatu revolusi dapat terjadi diperlukan beberapa syarat, yaitu:

1. Harus ada keinginan umum untuk mengadakan perubahan. Perasaan tidak puas dalam masyarakat terhadap keadaan yang ada dibarengi dengan keinginan untuk memperbaiki keadaan;
2. Adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang masyarakat yang dianggap mampu memimpin masyarakat tersebut;
3. Pemimpin menampung keinginan-keinginan masyarakat untuk kemudian merumuskan serta menegaskan rasa tidak puas tadi dalam suatu program dan arah gerakan;
4. Pemimpin harus dapat menunjukkan suatu tujuan pada suatu masyarakat, misalnya ideology;
5. Harus ada momentum, saat segala keadaan dan factor sudah tepat dan baik untuk memulai suatu gerakan.

D. Perubahan Sosial Kecil dan Besar

Besar kecilnya sebuah perubahan tergantung besar kecilnya pengaruh perubahan itu terhadap masyarakat. Semakin besar pengaruhnya terhadap masyarakat semakin besar perubahan sosial itu dan sebaliknya.

E. Perubahan yang Dikehendaki dan Tidak Dikehendaki

Perubahan yang dikehendaki (intended change) atau perubahan yang direncanakan (planned change) dan perubahan yang tidak dikehendaki (unintended

change) atau perubahan yang tidak direncanakan (unplanned change). Perubahan yang dikehendaki adalah perubahan yang sesuai dengan keinginan dari masyarakatnya. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang telah direncanakan oleh rakyatnya seperti dalam bentuk pelita (pembangunan lima tahun). Perubahan yang tidak dikehendaki adalah perubahan yang menimbulkan kesengsaraan dalam masyarakat,misalnya kriminalitas, kerusuhan sosial pergolakan politik; perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang tidak pernah direncanakan oleh masyarakat, misalnya krisis ekonomi 1977.

F. Agent of Change

Agent of change adalah seseorang atau sekelompok orang (yang menghendaki perubahan) yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih kemasyarakatan. Social engineering (rekayasa sosial) adalah cara-cara memengaruhi masyarakat dengan system yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu.

G. Faktor-faktor yang Menghalangi Terjadinya Perubahan Sosial

a. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Kehidupan suku terasing.
b. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat.
c. Sikap masyarakat yang sangat tradisional, mangagungkan tradisi.
d. Adanya kepentingan yang telah tertanam dengan kuat, atau *vested interests.*
e. Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan.
f. Prasangka terhadap hal-hal baru atau sikap yang tertutup.
g. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis.
h. Adat atau kebiasaan yang terlalu kuat.
i. nilai bahwa hidup ini buruk dan tidak mungkin diperbaiki.

H. Faktor-faktor yang Mendorong Jalannya Perubahan Sosial

a. Kontak dengan kebudayaan lain. Antara lain melaui difusi, yaitu proses penyebaran unsure-unsur kebudayaan dari individu lain dan dari masyarakat ke masyarakat lain.
b. Sistem pendidikan formal yangmaju. Pendidikan formal yang maju memungkinkan orang berpiir objektif dan rasional.

c. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untukmaju. Keinginan masyarakat untuk mendapat hadiah nobel merupakan salah satu pendorong kemajuan.

d. Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan menyimpang yang bukandelik. Yang bukan delik berarti yang tidak berkaitan dengan sanksi hokum.

e. Sistemlapisan masyarakat yang terbuka. Ini dibarengi dengan "*status anxiecty".* Status anxiecty adalah ketidakpuasan seseorang akan status sosial yang dimilikinya. Karena itu ia selalu berusaha untukmencapai kemajuan , tentu dalam lapisan masyarakat yang terbuka.

f. Penduduk yang heterogen. Penduduk yang heterogen mempermudah terjadinya pertentangan sosial dalam masyarakat. Pertentangan sosial mengakibatkan terjadinya perubahan sosial.

g. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu.

h. Orientasi ke masa depan.

i. Nilai bahwa manusia harus selalu berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya.

I. Proses-proses Perubahan Sosial dan Kebudayaan

a. Penyesuaian masyarakat terhadap perubahan mencakup penyesuaian lembag-lembaga kemasyarakatan dengan keadaan yang mengalami perubahan, penyesuaian dari individu yang ada dalam masyarakat dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah diubah atau diganti.

b. Melalui *channel of change*: suatu perubahan dikenal dan diterima, diakui serta dipergunakan oleh khalayak ramai. Ini disebut dengan proses institusionalisasi (pelembagaan). Umumnya *channel of change* (saluran-saluran perubahan) adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintah, ekonomi, pendidikan, agama, rekreasi, hukum, dan lain-lain.

c. Disorganisasi atau disintegrasi: yaitu suatu proses berpudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat karena perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan, reorganisasi atau reintegrasi: yaitu suatu proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru agar serasi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan. Ini biasanya dilaksanakan setelah nilai/norma dalam masyarakat yang melembaga.

J. Arah Perubahan (Direction of Change)

a. Arah perubahan kea rah suatu bentuk yang sama sekali baru. Ini yang disebut modernisasi.
b. Arah perubahan kea rah suatu bentuk yang sudah ada di masa lampau. Msalnya menemukan kembali kepribadian Indonesia.

K. Modernisasi

a. Pengertian: Soerjono Soekanto mengatakan modernisasi adalah suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional atau pramodern dalam arti teknologi serta organisasi sosial,ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri Negara barat yang stabil.
b. Syarat-syarat modernisasi:
   1. Cara berpikir ilmiah yang melembaga dalam kelas penguasa dan masyarakat;
   2. Sistem administrasi Negara (termasuk swasta) yang baik;
   3. Sistem pengumpulan data yang baik dan teratur dan terpusat pada suatu badan atau lembaga tertentu. Ini diikuti oleh adanya penelitian yang terus menerus;
   4. Penciptaan iklim yang *favorable* dari masyarakat melalui penggunaan alat-alat komunikasi massa;
   5. Tingkat organisasi yang tinggi;
   6. Sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial *(social planning).*

5. Teori Modernisasi yang Dipakai dalam Pembangunan Pertanian Indonesia

Kita bisa melihat pembangunan ekonomi Indonesia, betapa miripnya pola-pola pembangunan ekonomi di Negara ini model-model pertumbuhan yang ditawarkan oleh Rostow. Keadaan ini bisa kita mengerti karena para *policy maker* (baca para menteri cabinet pembangunan dalam lima tahun pelita pertama) yang menjalankan pembangunan nasional merupakan penganut-penganut Rostow sejak menimba ilmu di Amerika Serikat (Berkeley). Mereka yang lulusan Berkeley adalah Emil Salim, Widjoyo Nitisastro dan JB sumarlin.

Menurut Rostow (dalam Baldwin, Robert;1981) pertumbuhan ekonomi suatu Negara berkembang bertahap yaitu: Tahap masyarakat tradisional, tahap prasyarat tinggal landas, tahap tinggal landas (*take-off*), tahap menuju kedewasaan dan tahap

tingkat konsumsi tinggi. Menurut penulis, pembicaraan tahap tinggal landas ini ramai dibicarakan orang di Indonesia pada pertengahan tahun 80-an. Keadaan itu menandakan betapa miripnya proses pembangunan Negara ini dengan teori yang ditawarkan Rostow tersebut.

Pelita I sampai V, pembangunan Indonesia masih menggarap prasyarat tinggal landas. Untuk selanjutnya pembicaraan tentang kapan tinggal landasnya mulai sepi dari pembicaraan penguasa maupun masyarakat karena kesenjangan kesiapan menuju tinggal landas di masyarakat cukup lebar. Kritik-kritik pun mengalir terutama cendekiawan yang mendahulukan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Pembangunan Indonesia selama lima Pelita yang lalu menitik-beratkan pada sector pertanian. Langkah ini diambil sebagai upaya *safety first*. Model pengembangan sector pertanian (modernisasi pertanian) di Indonesia cenderung memakai pendekatan Lewis dan A.t. Mosher. Proses-proses penyampaian inovasi-inovasi baru cenderung berkiblat pada teori-teori difusi yang dikemukakan oleh Everest M Rgers.

Menurut Lewis, pertumbuhan ekonomi berlangsung melalui beberapa tahap, yang mentransformasikan masyarakat pertanian tradisional menjadi masyarakat pertanian yang komersial modern dan akhirnya menjadi masyarakat industry modern. Tahap-tahap yang dimaksud Lewis adalah:

a. Modernisasi teknologi di dalam suatu masyarakat akan membawa perubahan-perubahan dari teknik-teknik tradisional kepada aplikasi ilmu pengetahuan.
b. Pertanian komersial yang bercirikan pergeseran dari pertanian subsistem menuju pertanian untuk ekspor.
c. Proses industrialisasi yang menggambarkan transisi dari penggunaan kekuatan hewan dan manusia menuju penggunaan mesin, dan akhirnya;
d. Terjadi urbanisasi yang meliputi perubahan-perubahan dimensi ekologi dan pergerakan pertanian serta perkampungan ke arah pusat-pusat kota.

Pendapat Lewis itu membagi masyrakat ke dalam dua sector saja, yaitu sector tradisional dan sector modern. Dari sini terlihat bahwa Lewis merupakan tokoh modernis, terutama dalam hal perubahan struktur tenaga kerja.

Modernisasi teknologi pertanian, baik teknologi kimiawi, biologis, mekanis dan sosial telah berlangsung mulai tahun 60-an. Pengadopsian teknologi-teknologi itu

dipercepat dengan proses difusi melalui demonstrasi missal (DEMAS), bimbingan missal (BIMAS), intensifikasi missal (INMAS), intensifikasi khusus (INSUS) dan terakhir SUPRA INSUS.

Institusi-institusi itu bertindak sebagai alat penetrasi pemerintah untuk mengadakan modernisasi di bidang pertanian cukup berhasil namunkritikan-kritikan membangun tak dapat dihindarkan juga menimpa peran institusi-institusi tersebut. Hal paling banyak disorot adalah timpangnya perhatian institusi-institusi itu terhadap perkembangan pertanian non pangan. Selama ini sebagian program tercurah pada pertanian tanaman pangan saja.

Proses modernisasi pertanian dengan rasionalisasi teknik tradisional menjadi modern menyebabkan perubahan pola pertanian subsistem ke pertanian komersil. Karena itu, ada proses-proses ikutan yang terjadi di pedesaan di mana pertanian itu berlangsung. Misalnya terjadi erosi ikatan patron-klien seperti yang dilaporkan James C Scott (1993). Disamping itu terjadi perubahan-perubahan system pengupahan, system sakap, distribusi pendapatan dan lain-lain (effendi Pasandaran, dkk,1989).

Komersialisasi pertanian setelah pengenalan teknologi baru tidak bisa dilepaskan dari teori-teori difusi inovasi Everest M Rogers yang melanda Indonesia dengan bukunya Communication of Inovation. Dalam buku itu Rogers menggabungkan teori-teori kmunikasi dengan sosiologi. Tampaknya penerapan teori ini dapat dikatakan berhasil mengubah corak pertanian tradisional menjadi pertanian modern.

Di Indonesia dorongan modernisasi dari Rogers dikawinkan dengan teori progresif-nya Mosher. Dalam teorinya, Mosher mengemukakan beberapa syarat pokok (essentials) dan syarat pelancar(accelarators) agar terjadi modernisasi di sector pertanian. Kelima syarat pokok itu adalah pasar untuk hasil pertanian, teknologi yang senantiasa berubah, tersedianya sarana produksi secara local, perangsang produksi bagi petani dan pengangkutan. Sedangkan factor-faktor yang memperlancar proses modernisasi pertanian adalah pendidik untuk pembangunan, kredit produksi, kerja sama kelompok tani, memperbaiki dan memperluas tanah pertanian, serta perencanan nasional untuk pembangunan nasional.

Penerapan teori modernisasi pertanian dari Rogers di Indonesia nampaknya seperti fotokopi saja. dalam hal penyediaan pasar hasil pertanian, pemerintah Indonesia berusaha keras mengintrodusir Badan Usaha Unit Desa (BUUD) yang akhirnya menjadi KUD. Untuk pengadaan beras dalam negeri pemerintah menunjukkan BULOG/DOLOG bekerja sama dengan KUD membeli beras dari petani. Selain itu diciptakan lembaga-lembaga pemasaran seperti BPPC, Tataniaga Jeruk dan pengembangan ekspor hasil pertanian.

Syarat pokok kedua dalam modernisasi pertanian Mosher adalah teknologi yang selalu berubah. Secara besar-besaran bangsa ini telah memiliki balai-balai penelitian yang cukup berbobot. Balai Penelitian Tanaman Pangan, Balai Penelitian Hortikultura dan sebagainya adalah pengejawantahan dari penerapan teori Mosher.

Penyediaan sarana produksi secara local sebagai syarat pelancar yang ketiga dilakukan dengan mendirikan penyalur-penyalur sarana produksi itu baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Kita bisa melihat PT. Pertani yang menawarkan pestisida, PT. Pusri yang mendirikan cabang-cabang di sentra produksi pertanian dan KUD yang wajib mmmenjual segala keperluan petani dengan subsidi besar-besaran. Ini semua dilakukan agar petani dapat memperoleh sarana produksi di tempat dan saat yang tepat.

Agar petani bergairah melakukan proses produksi usaha tani maka syarat keempat dilakukan juga yakni dengan kebijakan perbandingan harga yang menguntungkan petani (insentif). Kebijaksanaan harga dasar (*floor price*) dilakukan tidak lain untuk memproteksi petani dari penurunan harga yang tajam di weaktu panen dan kenaikan harga yang membubung di saat paceklik.

Syarat pokok modernisasi pertanian yang kelima kini membuat sarana pengangkutan yang memadai agar produksi pertanian dapat diangkut ke sentra-sentra konsumen.salah satu factor kegagalan pengembangan daerah transmigrasi di luar jawa beberapa waktu yang lalu adalah sulitnya transformasi untuk mengangkut hasil pertanian yang diproduksi. Akhirnya harga komoditi tersebut jatuh dan petani meninggalkan daerah yang dipercayakan kepada mereka.

Syarat-syarat pelancar dilakukan pula oleh agen-agen pembangunan pertanian, misalnya pemberian Kredit Usaha Tani (KUT), lomba kelompok tani, ekstensifikasi dan konservasi. Walaupun terkesan bermuatan politis, tetapi perlombaan antar kelompok tani memberikan dampak yang positif dalam modernisasi pertanian.

Sebenarnya slogan “pertanian yang tangguh” merupakan tujuan modernisasi pertanian. Petani tangguh adalah petani yang dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan di luar dirinya dan produktif berusaha yang dicirikan dengan *better, farming, better business dan better living.*

Butir keempat teori Lewis yakni terjadinya industrialisasi. Kita dapat melihat bagaimana pemerintah mengupayakan industrialisasi ini dengan mengambil kebijakan *debirokratisasi dan deregulasi.* Undang-undang Modal asing telah dibuat pada tahun 1968 dan diperbuat oleh PP 20/1994. Paket-paket kebijakan itu bertujuan menarik investor asing menanamkan modal di Indonesia dan lambat laun diharapkan terjadi alih teknologi.

Hasil industrialisasi ini juga dapat kita simak dari pidato kenegaraan Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1994 di depan DPR RI yang secara tersirat mengakui adanya *transformasi structural,* di mana sector industry berkembang menjadi penggerak utama pembangunan. Selama PJP I sector industry tumbuh 12,4 % setiap tahun. Selama Pelita V sector industry tumbuh 10,2 %. Sektor pertanian tumbuh rata-rata 3,6 % selama PJP I. Dengan demikian struktur ekonomi Indonesia berubah dari struktur agraris ke struktur industry (Adig Suwandi, Surya 20 september 1994).

Karena industry umumnya terpusat di area-area tertentu maka proses urbanisasi tak dapat dihindarkan lagi. Proses ini terlihat dari pemekaran kota-kota besar seperti Jakarta dengan Jabotabek dan Surabaya denngan Gerbang Kertasusilannya. Urbanisasi tidak hanya perpindahan penduduk dari desa ke kota, tetapi juga menyangkut terbentuknya kota-kota baru karena pendirian industry tersebut. Untuk kasus ini bisa kita lihat terjadinya kota Batam, Tembagapura, Soroako, Bontang dan lain-lain.

Dari uraian di atas terlihat bahwa teori Rostow, Lewis, Mosher dan Rogers dijalankan oleh agen-agen pembangunan di Indonesia.

Masyarakat Samin di Tengah Arus Modernisasi : Transformasi Pertanian Pasca Reolusi Hijau

Pendahuluan

Latar Belakang

Pembangunan pertanian pada dasarnya adalah proses transformasi pertanian, yaitu suatu proses perubahan pada berbagai aspek di bidang pertanian. Perubahan tersebut tidak hanya berupa mekanisasi dan teknologi namun lebih jauh lagi pada kelembagaan ekonomi dan sosial pertanian. Sebagai negara agraris, sebagian besar penduduk pedesaan di Indonesia menggantungkan hidupnya dari bidang pertanian. Dengan demikian proses transformasi pertanian dapat dikatakan sebagai proses transformasi pedesaan. Proses ini menyentuh seluruh lapisan masyarakat di penjuru Indonesia.

Indonesia adalah sebuah negara majemuk. Kemajemukan ini ditandai oleh adanya suku-suku bangsa yang tentunya masing-masing mempunyai budaya yang berbeda. Suku bangsa ini seringkali dikatakan sebagai kelompok etnik. Barth (1969), menyatakan bahwa pada umumnya kelompok etnik dikenal sebagai populasi yang secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan.

Masyarakat Samin dengan berbagai tradisi dan budayanya serta memiliki ciri-ciri yang diungkapkan oleh Barth, bisa dikatakan salah satu kelompok etnik yang ada di Indonesia. Bahkan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah telah mengakui masyarakat Samin ini sebagai salah satu kelompok etnik yang ada di Jawa Tengah dari empat etnik yang ada. Komunitas Samin ialah sekelompok orang yang mengikuti ajaran Samin Surosentiko yang muncul pada masa kolonial Belanda. Pada masa lalu masyarakat Samin dapat diidentifikasikan sebagai masyarakat yang ingin membebaskan dirinya dari ikatan tradisi besar yang dikuasai oleh elit penguasa.

Masyarakat Samin sebagai salah satu kelompok etnik yang ada di Indonesia tentu memiliki nilai-nilai budaya yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Di usia yang sudah satu abad lebih ini masyarakat Samin sudah mengalami perubahan pada pranata sosial dan kebudayaan yang selama ini mereka anut. Tradisi Saminisme sekarang sudah berubah, artinya Saminisme sudah bukan lagi menjadi kebanggaan

dalam struktur sosial diamana mereka hidup. Apabila ditinjau dari sistem nilai, Saminisme sudah tidak lagi menjadi aturan dalam pluralitas nilai yang berada di tengah-tengah mereka.

Modernisasi dalam lingkup masyarakat tradisional akan menimbulkan implikasi terhadap masyarakat tersebut. Masyarakat tradisional bagaimanapun masih menjunjung tinggi nilai-nilai yang diwarisi secara turun temurun dari nenek moyangnya dulu. Karena itu kelompok masyarakat seperti ini telah memiliki pola budaya tertentu, sedangkan modernisasi tentu akan membawa pola budaya baru bagi masyarakat tersebut yang mungkin berbeda dengan norma serta nilai yang lama.

Perumusan Masalah

Proses transformasi pertanian yang gencar dilakukan oleh pemerintah sejak lama dengan konsep revolusi hijaunya mau tidak mau juga menyentuh masyarakat Samin. Pada dasarnya pengertian modernisasi mencakup suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional atau pra modern dalam arti teknologi serta organisasi sosial menuju kearah pola-pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri negara barat yang stabil. Modernisasi adalah suatu persoalan yang harus dihadapi oleh masyarakat. Setiap manusia dalam masyarakat sangat sulit untuk lepas dari pengaruh modernisasi yang melanda dunia saat ini. Demikian pula dengan masyarakat Samin dengan segala keunikan dan keterbatasannya. Masyarakat Samin yang kini terkepung oleh kemajuan budaya di sekitarnya sudah tidak mampu lagi untuk membendung masuknya kebudayaan baru tersebut. Nilai-nilai budaya masyarakat Samin semakin tersisih dan berganti dengan nilai budaya baru. Perubahan sosial budaya ini dibatasi pada aspek tata nilai, norma dan kelembagaan pada masyarakat Samin.

Perubahan budaya yang terjadi pada masyarakat Samin tentu disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor dari luar maupun dari dalam masyarakat sendiri. Pembangunan yang selama ini disalahkan sebagai penyebab perubahan budaya masyarakat tentu memiliki andil yang cukup besar dalam menyebabkan perubahan budaya masyarakat Samin. Pembangunan identik dengan modernisasi dengan segala dampaknya baik yang positif untuk kemajuan masyarakat maupun dampak negatif berupa hilangnya tatanan nilai dan norma budaya warisan leluhur.

Secara garis besar permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana transformasi pertanian yang terjadi pada masyarakat Samin?
2. Bagaimana dampak transformasi pertanian pada masyarakat Samin?

Tujuan

Tujuan tulisan ini adalah untuk :

1. Menjelaskan transformasi pertanian yang terjadi pada masyarakat Samin.
2. Menjelaskan dampak transformasi pertanian pada masyarakat Samin.

Kerangka Teoritis

Perspektif Tentang Perubahan

Perkembangan masyarakat seringkali dianalogikan seperti halnya proses evolusi. suatu proses perubahan yang berlangsung sangat lambat. Pemikiran ini sangat dipengaruhi oleh hasil-hasil penemuan ilmu biologi, yang memang telah berkembang dengan pesatnya. Peletak dasar pemikiran perubahan sosial sebagai suatu bentuk “evolusi” antara lain Herbert Spencer dan August Comte. Keduanya memiliki pandangan tentang perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat dalam bentuk perkembangan yang linear menuju ke arah yang positif. Perubahan sosial menurut pandangan mereka berjalan lambat namun menuju suatu bentuk “kesempurnaan” masyarakat (Etzioni, 1973).

Pemikiran Spencer sangat dipengaruhi oleh ahli biologi pencetus ide evolusi sebagai proses seleksi alam, Charles Darwin, dengan menunjukkan bahwa perubahan sosial juga adalah proses seleksi. Masyarakat berkembang dengan paradigma Darwinian: ada proses seleksi di dalam masyarakat kita atas individu-individunya. Spencer menganalogikan masyarakat sebagai layaknya perkembangan mahkluk hidup. Manusia dan masyarakat termasuk didalamnya kebudayaan mengalami perkembangan secara bertahap. Mula-mula berasal dari bentuk yang sederhana kemudian berkembang dalam bentuk yang lebih kompleks menuju tahap akhir yang sempurna.

Menurut Spencer, suatu organisme akan bertambah sempurna apabila bertambah kompleks dan terjadi diferensiasi antar organ-organnya. Kesempurnaan organisme dicirikan oleh kompleksitas, differensiasi dan integrasi. Perkembangan

masyarakat pada dasarnya berarti pertambahan diferensiasi dan integrasi, pembagian kerja dan perubahan dari keadaan homogen menjadi heterogen. Spencer berusaha meyakinkan bahwa masyarakat tanpa diferensiasi pada tahap pra industri secara intern justru tidak stabil yang disebabkan oleh pertentangan di antara mereka sendiri. Pada masyarakat industri yang telah terdiferensiasi dengan mantap akan terjadi suatu stabilitas menuju kehidupan yang damai. Masyarakat industri ditandai dengan meningkatnya perlindungan atas hak individu, berkurangnya kekuasaan pemerintah, berakhirnya peperangan antar negara, terhapusnya batas-batas negara dan terwujudnya masyarakat global.

Seperti halnya Spencer, pemikiran Comte sangat dipengaruhi oleh pemikiran ilmu alam. Pemikiran Comte yang dikenal dengan aliran positivisme, memandang bahwa masyarakat harus menjalani berbagai tahap evolusi yang pada masing-masing tahap tersebut dihubungkan dengan pola pemikiran tertentu. Selanjutnya Comte menjelaskan bahwa setiap kemunculan tahap baru akan diawali dengan pertentangan antara pemikiran tradisional dan pemikiran yang berdifat progresif. Sebagaimana Spencer yang menggunakan analogi perkembangan mahkluk hidup, Comte menyatakan bahwa dengan adanya pembagian kerja, masyarakat akan menjadi semakin kompleks, terdeferiansi dan terspesialisasi.

Membahas tentang perubahan sosial, Comte membaginya dalam dua konsep yaitu *social statics* (bangunan struktural) dan *social dynamics* (dinamika struktural). Bangunan struktural merupakan struktur yang berlaku pada suatu masa tertentu. Bahasan utamanya mengenai struktur sosial yang ada di masyarakat yang melandasi dan menunjang kestabilan masyarakat. Sedangkan dinamika struktural merupakan hal-hal yang berubah dari satu waktu ke waktu yang lain. Perubahan pada bangunan struktural maupun dinamika struktural merupakan bagian yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

Berbeda dengan Spencer dan Comte yang menggunakan konsepsi optimisme, Oswald Spengler cenderung ke arah pesimisme. Menurut Spengler, kehidupan manusia pada dasarnya merupakan suatu rangkaian yang tidak pernah berakhir dengan pasang surut. seperti halnya kehidupan organisme yang mempunyai suatu siklus mulai dari kelahiran, masa anak-anak, dewasa, masa tua dan kematian. Perkembangan pada masyarakat merupakan siklus yang terus akan berulang dan tidak berarti kumulatif.

Modernisasi, Berangkar dari Perspektif Idealis

Asumsi modernisasi yang disampaikan oleh Schoorl (1980), melihat modernisasi sebagai suatu proses transformasi, suatu perubahan masyarakat dalam segala aspek-aspeknya. Dibidang ekonomi, modernisasi berarti tumbuhnya kompleks industri dengan pertumbuhan ekonomi sebagai akses utama. Berhubung dengan perkembangan ekonomi, sebagian penduduk tempat tinggalnya tergeser ke lingkungan kota-kota. Masyarakat modern telah tumbuh tipe kepribadian tertentu yang dominan. Tipe kepribadian seperti itu menyebabkan orang dapat hidup di dalam dan memelihara masyarakat modern.

Sedangkan Dube (1988), berpendapat bahwa terdapat tiga asumsi dasar konsep modernisasi yaitu ketiadaan semangat pembangunan harus dilakukan melalui pemecahan masalah kemanusiaan dan pemenuhan standart kehidupan yang layak, modernisasi membutuhkan usaha keras dari individu dan kerjasama dalam kelompok, kemampuan kerjasama dalam kelompok sangat dibutuhkan untuk menjalankan organisasi modern yang sangat kompleks dan organisasi kompleks membutuhkan perubahan kepribadian (sikap mental) serta perubahan pada struktur sosial dan tata nilai. Tujuan akhir dari modernisasi adalah terwujudnya masyarakat modern yang dicirikan oleh kompleksitas organisasi serta perubahan fungsi dan struktur masyarakat. Secara lebih jelas Schoorl menyajikan proses petumbuhan struktur sosial yang dimulai dari proses perbesaran skala melalui integrasi. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan diferensiasi hingga pembentukan stratifikasi dan hirarki.

Motivasi teori modernisasi untuk merubah cara produksi masyarakat berkembang sesungguhnya adalah usaha merubah cara produksi pra-kapitalis ke kapitalis, sebagaimana negara-negara maju sudah menerapkannya untuk ditiru. Proses modernisasi mencakup proses yang sangat luas yang terkadang batasannya tidak dapat ditetapkan secara mutlak. Modernisasi mencakup suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional atau pra modern dalam arti teknologi serta organisasi sosial menuju ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri negara barat yang stabil (Soekanto, 1990). Karakteristik umum modernisasi yang menyangkut aspek-aspek sosio demografis masyarakat digambarkan dengan istilah gerak sosial. Modernisasi adalah suatu bentuk perubahan sosial yang biasanya

merupakan perubahan sosial yang terarah yang didasarkan pada perencanaan. Teori modernisasi secara umum dapat diungkapkan sebagai cara pandang yang menjadi modus utama analisisnya kepada faktor manusia dalam suatu masyarakat. Modernisasi kemudian menjadi semacam komoditi di kalangan masyarakat yang menempatkan faktor mentalitas menjadi penyebab perubahan (Salim, 2002).

Pada dasarnya, modernisasi didasarkan pada perubahan sosial dalam perspektif idealis. Salah satu pemikir dalam kubu idealis adalah Weber. Weber memiliki pendapat yang berbeda dengan Marx. Perkembangan industrial kapitalis tidak dapat dipahami hanya dengan membahas faktor penyebab yang bersifat material dan teknik. Namun demikian Weber juga tidak menyangkal pengaruh kedua faktor tersebut. Pemikiran Weber yang dapat berpengaruh pada teori perubahan sosial adalah dari bentuk rasionalisme yang dimiliki. Dalam kehidupan masyarakat barat model rasionalisme akan mewarnai semua aspek kehidupan (Harper, 1989).

Weber melihat bahwa pada wilayah Eropa yang mempunyai perkembangan industrial kapital pesat adalah wilayah yang mempunyai penganut protestan. Bagi Weber, ini bukan suatu kebetulan semata. Nilai-nilai protestan menghasilkan etik budaya yang menunjang perkembangan industrial kapitalis. Protestan Calvinis merupakan dasar pemikiran etika protestan yang menganjurkan manusia untuk bekerja keras, hidup hemat dan menabung. Pada kondisi material yang hampir sama, industrial kapital ternyata tidak berkembang di wilayah dengan mayoritas Katholik, yang tentu saja tidak mempunyai etika protestan (Harper, 1989).

Harper (1989), menjelaskan bahwa Lewy sependapat dengan Weber tentang peranan ideologi dalam perubahan sosial. Lewy mengambil contoh sejarah yang menggambarkan bahwa nilai-nilai ideologi mempengaruhi arah perubahan. Dia menyebutkan adanya pemberontakan Puritan di Inggris, kebangkitan kembali Islam di Sudan, pemberontakan taiping dan bokser di China. Seperti halnya Weber, Lewy tidak menyangkal bahwa kondisi material mempengaruhi perubahan sosial. Namun demikian kita tidak dapat hanya memahami perubahan sosial yang terjadi hanya dari faktor material saja.

Perubahan Sosial dan Perubahan Kebudayaan

William F. Ogburn dalam Moore (2002), berusaha memberikan suatu pengertian tentang perubahan sosial. Ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun immaterial. Penekannya adalah pada pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial. Perubahan sosial diartikan sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.

Definisi lain dari perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya. Tekanan pada definisi tersebut adalah pada lembaga masyarakat sebagai himpunan kelompok manusia dimana perubahan mempengaruhi struktur masyarakat lainnya (Soekanto, 1990). Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat seperti misalnya perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis dan kebudayaan. Sorokin (1957), berpendapat bahwa segenap usaha untuk mengemukakan suatu kecenderungan yang tertentu dan tetap dalam perubahan sosial tidak akan berhasil baik.

Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian, yang meliputi kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat dan lainnya. Akan tetapi perubahan tersebut tidak mempengaruhi organisasi sosial masyarakatnya. Ruang lingkup perubahan kebudayaan lebih luas dibandingkan perubahan sosial. Namun demikian dalam prakteknya di lapangan kedua jenis perubahan perubahan tersebut sangat sulit untuk dipisahkan (Soekanto, 1990).

Perubahan kebudayaan bertitik tolak dan timbul dari organisasi sosial. Pendapat tersebut dikembalikan pada pengertian masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat adalah sistem hubungan dalam arti hubungan antar organisasi dan bukan hubungan antar sel. Kebudayaan mencakup segenap cara berfikir dan bertingkah laku, yang timbul karena interaksi yang bersifat komunikatif seperti menyampaikan buah pikiran secara simbolik dan bukan warisan karena keturunan (Davis, 1960). Apabila diambil definisi kebudayaan menurut Taylor dalam Soekanto (1990), kebudayaan merupakan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat istiadat dan setiap kemampuan serta kebiasaan manusia sebagai warga masyarakat,

maka perubahan kebudayaan dalah segala perubahan yang mencakup unsur-unsur tersebut. Soemardjan (1982), mengemukakan bahwa perubahan sosial dan perubahan kebudayaan mempunyai aspek yang sama yaitu keduanya bersangkut paut dengan suatu cara penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan dalam cara suatu masyarakat memenuhi kebutuhannya.

Untuk mempelajari perubahan pada masyarakat, perlu diketahui sebab-sebab yang melatari terjadinya perubahan itu. Apabila diteliti lebih mendalam sebab terjadinya suatu perubahan masyarakat, mungkin karena adanya sesuatu yang dianggap sudah tidak lagi memuaskan. Menurut Soekanto (1990), penyebab perubahan sosial dalam suatu masyarakat dibedakan menjadi dua macam yaitu faktor dari dalam dan luar. Faktor penyebab yang berasal dari dalam masyarakat sendiri antara lain bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk, penemuan baru, pertentangan dalam masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Sedangkan faktor penyebab dari luar masyarakat adalah lingkungan fisik sekitar, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain.

Analisis

Dusun Jepang, Arena Pertarungan Lokalitas dan Modernisasi

Tulisan ini mengambil lokasi di Dusun Jepang, sebuah dusun yang ada di Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Dusun Jepang dikelilingi oleh hutan yang menjadikannya agak terisolasi dari daerah sekitarnya. Letak dusun yang berada di kawasan hutan menjadikan dusun ini sulit untuk dijangkau, terlebih lagi sarana angkutan umum tidak tersedia. Keadaan ini agak terbantu dengan telah diaspalnya jalan yang menghubungkan Dusun Jepang dengan ibu kota kecamatan yang berjarak sekitar 5 kilometer. Walaupun sarana angkutan umum tidak tersedia, jalan yang telah beraspal sangat membantu mobilitas penduduk Dusun Jepang, terlebih saat ini banyak diantara penduduk yang telah memiliki motor.

Untuk mencapai Dusun Jepang dapat dikatakan sangat mudah, bahkan bagi mereka yang sama sekali belum pernah berkunjung ke daerah ini. Letak Desa Margomulyo berada di tepi jalan kabupaten yang menghubungkan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Ngawi. Jalan inilah yang dilalui oleh angkutan umum seperti

colt dan bus yang menghubungkan Ngawi dan Bojonegoro. Satu alasan lagi, yang memudahkan kita mencapai lokasi ini adalah “ketenaran” masyarakat Samin dan tentu saja Mbah Hardjo Kardi, sesepuh masyarakat Samin.

Desa Margomulyo mempunyai luas wilayah sebesar 1.309.169 hektar yang terbagi menjadi delapan dusun. Sebagian besar wilayahnya merupakan areal hutan yang dikelola oleh Perhutani. Keseluruhan luas areal hutan mencapai 54,70 persen, sedangkan sisanya merupakan lahan pertanian produktif serta daerah pemukiman. Areal pertanian produktif terdiri atas lahan tegalan sebesar 23,60 persen, lahan sawah sebesar 13,20 persen dan lahan perkebunan sebesar 1,15 persen.

Areal hutan yang dikelola oleh Perhutani menyebabkan akses penduduk sangat terbatas untuk memanfaatkan hutan. Penduduk sebatas mendapatkan ranting-ranting jati yang digunakan untuk kayu bakar serta daun jati sebagai pembungkus. Penduduk Dusun Jepang hampir seluruhnya menggantungkan hidup dari pertanian. Kondisi tanah yang kurang subur serta luas kepemilikan yang sempit menjadikan kemiskinan masih menjadi permasalahan yang membelenggu sebagian besar penduduknya.

Penduduk Dusun Jepang berjumlah 736 jiwa yang terdiri dari 202 kepala keluarga. Sebagian besar penduduk tidak pernah mengenyam pendidikan terutama bagi mereka yang telah berusia diatas 40 tahun. Jumlah penduduk yang tidak mengenyam pendidikan sebesar 42,9 persen, sedangkan penduduk yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan hingga tingkat sekolah dasar mencapai 28,5 persen. Hanya sebagian kecil penduduk yang telah mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP dan SMA.

Secara kelembagaan, Dusun Jepang telah mempunyai beberapa jenis lembaga kemasyarakatan. Karang taruna mulai berdiri pada tahun 1999. Karang taruna ini bernama “Karya Bhakti”. Pembentukan karang taruna ini diprakarsai oleh kepala dusun setempat, dengan mengumpulkan pemuda-pemuda yang ada di Dusun Jepang. Perkembangan organisasi ini kurang begitu menggembirakan. Kegiatan karang taruna masih terbatas pada pertemuan rutin setiap bulan. Pada setiap pertemuan diadakan kegiatan menabung untuk menambah kas organisasi. Kegiatan produktif masih belum ada mengingat keterbatasan dana serta partisipasi pemuda dusun yang masih minim. Kebanyakan para pemuda lebih memilih untuk melakukan migrasi ke daerah lain, terutama ke kota besar untuk mencari pekerjaan.

Kelompok tani juga sudah lama berdiri di dusun ini. Ini tentunya tidak lepas dari kondisi politik bangsa Indonesia selama orde baru. Sejak tahun 1981 telah berdiri kelompok tani yang bernama “Panggih Mulyo”. Kelompok tani ini merupakan perwujudan formal dari paguyuban yang telah ada di dalam masyarakat Samin di Dusun Jepang. Selama era orde baru, setiap desa diwajibkan untuk membentuk kelompok tani dengan struktur organisasi yang seragam. Pemerintah pada masa itu tidak memberi kesempatan bagi kelembagaan masyarakat adat untuk berkembang maupun sekedar bertahan.

Kelompok tani “Panggih Mulyo” dipimpin langsung oleh Mbah Hardjo Kardi, sesepuh masyarakat setempat. Rasa percaya antara anggota dan pengurus menjadi modal sosial yang sangat besar dalam memajukan organisasi ini. Terlebih sifat masyarakat Samin yang mampu memegang amanah membuat banyak pihak luar yang turut berperan serta memberikan dana hibah kepada kelompok tani ini. Tidak mengherankan apabila banyak proyek pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Dusun Jepang ini. Sedikit demi sedikit kesejahteraan masyarakat Samin akan dapat meningkat.

Kelembagaan yang berkembang hingga saat ini adalah *sinoman*. Sinoman merupakan organisasi non formal yang menjadi wadah pemuda desa. Kegiatan sinoman terbatas pada aktivitas yang berkaitan dengan acara hajatan. Ketika salah satu warga mempunyai hajatan, sinoman yang bertanggung jawab untuk membantu pelaksanaan hajatan tersebut.

Masyarakat Samin, Masyarakat yang Tergusur

Masyarakat Samin masih banyak dijumpai dan mereka bertempat tinggal di desa-desa dalam wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Ngawi Propinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk wilayah Jawa Tengah tersebar di Kabupaten Blora, Pati dan Kudus. Masyarakat Samin sebenarnya adalah etnis Jawa namun karena mereka memiliki tata cara kehidupan bahkan tradisi yang berbeda dengan masyarakat Jawa maka masyarakat Samin dianggap sebagai etnis tersendiri.

Pencetus ajaran Saminisme adalah Samin Surosentiko yang lahir di Blora pada tahun 1859. Nama asli Samin Surosentiko adalah R Kohar yang merupakan anak dari R Surowidjoyo dan cucu dari RM Brotodiningrat yang merupakan Bupati Sumoroto yang

berkuasa pada tahun 1802-1826. R Surowidjoyo sejak kecil dididik di lingkungan keraton dengan segala kemewahan. Namun dalam hatinya timbul perlawanan karena mengetahui rakyatnya sengsara oleh penjajahan Belanda. Pada tahun 1840, R. Surowidjoyo meninggalkan keraton dan membentuk kelompok pemuda yang dinamakan *Tiyang Sami Amin*. Kelompok pemuda yang dipimpinnya ini melakukan berbagai perampokan terhadap antek-antek Belanda dan membagikan hasilnya kepada orang miskin.

Tahun 1859 lahirlah R Kohar yang kemudian melanjutkan perjuangan ayahnya dan memakai nama Samin Surosentiko atau Samin Anom. Berbagai ajaran yang menyimpang dari kehidupan wajar etnis Jawa dan pembangkangan terhadap segala kebijakan penjajah Belanda terus disebarluaskan kepada para pengikutnya. Pada tanggal 8 Nopember 1907, Samin Surosentiko ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Digul. Empat puluh hari sebelum penangkapan itu, Samin Surosentiko memproklamirkan dirinya sebagai Raja Tanah Jawa. Pada tahun 1914, Samin Surosentiko meninggal dalam pengasingannya.

Sepeninggal Samin Surosentiko, kepemimpinan Samin diwariskan kepada Suro Kidin dan Mbah Engkrek. Suro Kidin adalah menantu Samin Surosentiko, sedangkan Mbah Engkrek adalah salah seorang murid setia Samin Surosentiko. Pola kepemimpinan pada masa ini tidak lagi bersifat sentralistik namun lebih bergantung pada pemimpin lokal di masing-masing wilayah.

Generasi berikutnya adalah Surokarto Kamidin, anak dari Suro Kidin. Surokarto Kamidin merupakan pemimpin Samin generasi ke-3 dan menetap di Dusun Jepang. Surokarto Kamidin memegang kepemimpinan pada masa peralihan pendudukan Belanda dan Jepang hingga pada masa kemerdekaan. Pada tahun 1986, Surokarto Kamidin meninggal dunia dan kepemimpinan Samin di Dusun Jepang digantikan oleh anaknya, Hardjo Kardi hingga saat ini.

Transformasi Pertanian; Masuknya Teknologi

Kata transformasi diambil dari terjemahan kata *transformation* (Bahasa Inggris). Istilah *tranform* (Neufebet and Guralnik, 1988) dapat diartikan sebagai perubahan, dan *tranformation* dapat diartikan sebagai proses perubahan. Dalam arti yang lebih luas, transformasi mencakup bukan saja perubahan pada bentuk luar, namun juga pada

hakikat atau sifat dasar, fungsi, dan struktur atau karakteristik perekonomian suatu masyarakat. Transformasi pertanian atau agribisnis di pedesaan, dapat diartikan sebagai perubahan bentuk, ciri, struktur, dan kemampuan sistem pertanian yang dapat menggairahkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan menyehatkan perekonomian masyarakat pedesaan.

Pada masyarakat pedesaan yang tingkat perkembangan ekonominya belum maju dan didominasi oleh sektor pertanian, transformasi pertaniannya sekaligus dapat dipandang sebagai cerminan transformasi masyarakat desanya. Dalam pengertian yang lebih luas yang dikaitkan dengan perekayaan sosial-budaya pedesaan, transformasi masyarakat pedesaan dapat dipandang sebagai proses modernisasi atau pembangunan (Dumont dalam Pranadji, 1999). Dalam pembangunan, sektor pertanian atau kegiatan agribisnis dapat dipandang sebagai *leading sector*-nya. Pranadji (1995), menjelaskan tentang transformasi ekonomi pertanian yang berciri budaya tradisional/subsisten ke yang berciri budaya modern/komersial. Tansformasi pertanian di pedesaan merupakan respon dan antisipasi terhadap tuntutan kemajuan untuk hidup lebih baik, dan globalisasi pasar.

Transformasi pertanian yang terjadi di Dusun Jepang tidak dapat lepas dari peran pemerintah, terutama orde baru. Kebijakan pemerintah yang mengedepankan pada peningkatan produksi mengharuskan untuk menggunakan berbagai teknologi. Tidak mengherankan apabila pembangunan pertanian selama orde baru begitu gencarnya, bahkan hingga pelosok pedesaan. Pembentukan kelompok tani serta berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian terutama beras menjadi salah satu aspek yang juga menyentuh masyarakat Samin.

Dusun Jepang berada pada daerah lahan kering dengan topografi berbukit, sehingga produktivitas pertaniannya rendah. Komoditas yang diusahakan antara lain padi, jagung dan kedelai. Pertanian masih bersifat semi subsisten, sebagian besar hasil panen digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan hanya sebagian kecil yang dijual ke pasar. Data produksi tidak tercatat dengan baik, namun dari hasil wawancara dapat diketahui produksi tanaman padi mencapai 4 ton per hektar, sedangkan untuk kedelai sebesar 3 ton per hektar.

Teknologi pertanian yang digunakan juga telah maju, hal ini terbukti dengan telah tersedianya beberapa mesin pertanian modern. Kelompok tani “Panggih Mulyo” telah mempunyai mesin traktor sebanyak empat unit, pompa air sebanyak sembilan unit, mesin perontok padi sebanyak satu unit dan sebuah mesin penggilingan padi. Mesin-mesin modern ini sebagian besar merupakan hasil bantuan dari pemerintah melalui proyek-proyek pembangunan pertanian yang dilaksanakan di Dusun Jepang. Mekanisasi di bidang pertanian dimulai pada tahun 1997 atas bantuan pemerintah propinsi Jawa Timur. Saat itu masyarakat Samin mendapatkan bantuan berupa satu unit traktor dan dua unit mesin pompa air.

Selain mekanisasi, pertanian yang dilaksanakan oleh masyarakat Samin juga menggunakan bahan-bahan anorganik seperti pupuk dan pestisida. Namun penggunaannya masih dalam jumlah yang terbatas. Masyarakat Samin menyadari bahwa penggunaan bahan kimia secara berlebih dapat merusak lingkungan. Untuk mencukupi kebutuhan unsur hara bagi tanaman, masyarakat Samin menggunakan pupuk kandang sebagai bahan penyubur tanah. Penggunaan pupuk kandang telah berlangsung sejak lama dan diwariskan secara turun temurun, terlebih sudah menjadi kebiasaan di daerah pedesaan apabila petani memiliki hewan ternak. Hewan ternak ini selain digunakan sebagai hewan kerja juga dijadikan sebagai tabungan pada musim paceklik.

Proses pembuatan pupuk kandang mengalami pergeseran dari waktu ke waktu. Pada masa lalu pembuatannya dilakukan secara sederhana tanpa penambahan bahan lain, namun kini masyarakat Samin telah mengenal bahan organik yang mampu meningkatkan mutu pupuk kandang dan mempersingkat proses pembuatannya. Pengetahuan ini diperoleh dari tenaga penyuluh lapang yang bertugas di Desa Margomulyo.

Meningkatnya produksi pertanian membawa dampak pada surplus produksi, terutama padi. Sistem pertanian subsisten lambat laun berubah menjadi semi komersil, bahkan beberapa petani telah sepenuhnya komersil. Perubahan ini membawa dampak pada pola konsumsi masyarakat Samin, terlebih arus informasi dengan derasnya masuk melalui media massa terutama televisi. Tidak mengherankan apabila pola hidup konsumtif sudah menggejala pada sebagian masyarakat Samin. Tidak sulit untuk menjumpai rumah penduduk yang telah dilengkapi oleh bebagai perabotan elektronik.

Bertahannya Kelembagaan Tradisional

Modernisasi pertanian membawa dampak pada berkurangnya kebutuhan tenaga kerja. Tenaga kerja manusia dan hewan dapat digantikan oleh mesin-mesin modern seperti traktor, pompa air dan mesin perontok padi. Ramalan Marx tentang pembentukan moda produksi kapitalis pada masyarakat Samin ternyata tidak terbukti. Konsep kepemilikan alat produksi masih tetap mempertahankan tradisi yang telah ada. Kepemilikan alat produksi didasarkan oleh kepemilikan komunitas, sehingga tidak ada satu pihak pun yang akan menjadi penguasa alat produksi. Teori kelas Marx yang menyatakan adanya pembentukan kelas baru sebagai akibat adanya teknologi tidak terjadi pada masyarakat Samin.

Masyarakat Samin tidak mengenal konsep majikan dan buruh. Tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi pertanian dilaksanakan dengan cara-cara tradisional. Kelembagaan gotong royong berupa *sambatan* masih senantiasa terpelihara hingga saat ini. Kebutuhan tenaga kerja dalam bidang pertanian diperoleh dengan cara saling membantu antar rumah tangga petani secara bergiliran. Pola pengupahan dalam pertanian tidak dikenal dalam masyarakat Samin. Sebagai gantinya adalah pola saling meminjam tenaga kerja, sehingga pengeluaran berupa upah tenaga kerja digantikan juga dengan tenaga kerja. Sambatan juga dilakukan pada kegiatan selain pertanian, membangun rumah misalnya.

Sambatan ini berlangsung mulai pada masa tanam hingga panen. Khusus pada masa panen, tenaga kerja mendapatkan “upah” berupa sebagian dari hasil panen yaitu *bawon*. Model ini juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk asuransi sosial masyarakat Samin. Ketika salah satu rumah tangga petani mengalami kegagalan panen maka masih dapat mengandalkan hasil bawon dari rumah tangga yang lain sebagai hasil “upah” tenaga kerja yang diberikannya.

Sistem panen terbuka dengan menggunakan bawon merupakan sistem panen terbuka. Pelaksanaan sistem panen ini dilakukan oleh hampir seluruh penduduk tergantung pada jenis komoditas dan pekerjaan. Komoditas padi, kegiatan panen didominasi oleh perempuan dengan menggunakan ketam (*ani-ani*) sebagai alat untuk memotong batang atas padi. Sedangkan laki-laki berperan dalam merontokkan gabah. Sedangkan untuk komoditas lainnya, peran laki-laki lebih dominan.

Setelah masuknya mekanisasi pertanian, peran perempuan pada sistem panen terbuka menjadi semakin berkurang. Penggunaan ketam digantikan oleh sabit. Teknik pemotongan batang padi juga berubah. Orientasi revolusi hijau untuk meningkatkan efisiensi produksi menyebabkan berubahnya teknik panen. Penggunaan sabit memangkas waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemanenan, namun alat ini tidak ramah untuk perempuan. Peran perempuan pada sistem panen saat ini menjadi berkurang.

Penelitian tentang kelembagaan tradisional di pedesaan Jawa memberikan gambaran yang beragam. Ada sebagian yang masih bertahan dan sebagian lainnya telah hilang. Penelitian Roepke memberikan gambaran tentang bertahannya kelembagaan tradisional di tengah arus modernisasi. Namun demikian kelembagaan tradisional ini telah termodifikasi sedemikan rupa menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Suatu yang patut disayangkan pada tulisan ini kekurangjelian penulis dalam menggali modifikasi pola kelembagaan tradisional yang masih bertahan di masyarakat Samin tersebut.

Ketika berbicara tentang perubahan sosial, kita tidak saja membahas tentang perubahan yang terjadi. Namun lebih jauh kita juga dapat membahas mengenai ke-tidak berubah-an yang terjadi. Fenomena bertahannya kelembagaan tradisional seperti sambatan dan bawon menjadi bahan kajian yang cukup menarik. Modernisasi yang terlalu mengedepankan budaya barat sebagai patokan untuk membangun masyarakat, telah melupakan nilai-nilai kultural masyarakat dan mengaanggap kultur masyarakat sebagai penghambat pembangunan bahkan sebagai faktor yang menyebabkan keterbelakangan masyarakat Indonesia. Pada kenyataannya, masyarakat Indonesia semakin terbelakang bahkan semakin carut-marut akibat masuknya budaya-budaya asing yang menghancurkan *indegenous knowledge* masyarakat lokal. Pemerintah secara sepihak telah memutuskan bentuk pembangunan yang dilakukan di Indonesia tanpa melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan. Dalam hal ini, oleh pemerintah, masyarakat dijadikan obyek pembangunan bukan sebagai subyek pembangunan sehingga masyarakat tidak pernah dilibatkan secara langsung.

Masuknya beragam program pemerintah untuk mengubah kondisi masyarakat dari keadaan terbelakang menuju kepada sebuah kemajuan, menjadikan masyarakat

terpaksa meninggalkan nilai-nilai kulturalnya. Pemerintah selalu menganggap kondisi masyarakat adalah sebuah kondisi yang harus mendapat pembenahan. Pembenahan yang dilakukan pemerintah terkadang menjadi negatif setelah dilaksanakan pada masyarakat yang memiliki nilai kultural yang bertolak belakang dengan program pembangunan pemerintah. Dampak yang ada di masyarakat sebagai akibat dari pembangunan, yang tidak jarang berdampak negatif, dijelaskan oleh Dove (1985) sebagai sebuah biaya yang harus menjadi tanggungan masyarakat dari pelaksanaan pembangunan dan modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Transformasi Pertanian dan Gerak Penduduk; Agen Perubahan

Seperti diulas di depan, masuknya mekanisasi pertanian menyebabkan berkurangnya kebutuhan tenaga kerja per luasan lahan. Tenaga kerja manusia digantikan oleh tenaga kerja mesin atau teknologi lainnya yang lebih efisien. Fenomena ini menyebabkan semakin meningkatnya migrasi tenaga kerja pertanian ke sektor non pertanian, terutama ke kota-kota besar.

Generasi muda Samin yang telah mengenyam pendidikan seiring masuknya program pendidikan sudah tidak tertarik lagi pada sektor pertanian. Pola hidup konsumtif menyebabkan kebutuhan akan penghasilan yang besar semakin meningkat pula. Sektor pertanian dipandang sebagai sektor yang kurang menjanjikan. Tidak mengherankan apabila migrasi desa kota, bahkan migrasi internasional menjadi gejala yang umum pada generasi muda Samin. Kebanyakan mereka bekerja di kota-kota besar di sekitar Bojonegoro. Tidak jarang pula kini ditemui generasi muda Samin bekerja di sektor pemerintahan. Bahkan salah satu anak laki-laki dari Mbah Hardjo Kardi bekerja sebagai PNS di kantor kecamatan Margomulyo.

Peran migran dalam perubahan sosial pada masyarakat Samin sangat besar. Migran dapat berperan sebagai agen perubahan dengan membawa nilai-nilai baru yang mereka peroleh dari tempat mereka bekerja, terutama kota-kota besar. Selain peran agen perubahan tersebut, derasnya arus informasi dari luar melalui media televisi turut menyumbangkan perannya dalam perubahan sosial.

Transformasi Pertanian; Perspektif Idealis

Suatu yang menarik ketika masyarakat Samin di satu sisi menerima kehadiran teknologi di bidang pertanian, namun di sisi lainnya mereka masih tetap memegang teguh nilai-nilai tradisional yang mereka anut. Transformasi pertanian yang terjadi hanya sebatas pada cara produksi tanpa merubah struktur sosial masyarakat. Kelas-kelas sosial yang terbentuk dengan adanya tranformasi pertanian, yaitu kelas pemilik tanah dan buruh tani tidak terbentuk pada masyarakat Samin.

Pespektif idealis yang memandang proses perubahan disebabkan oleh perubahan budaya non material tampaknya lebih bisa diterima apabila digunakan untuk membedah kasus masyarakat Samin. Perubahan budaya non material yang paling tampak adalah sikap keterbukaan pada masyarakat Samin. Terlebih ketika pendidikan formal mulai masuk ke Dusun Jepang.

Nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat Samin pada masa lampau merupakan perwujudan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Samin tidak diwujudkan dalam bentuk perlawanan fisik, namun dalam bentuk pembangkangan. Masyarakat Samin menolak membayar pajak dan berlaku seenaknya ketika menghadapi Belanda. Pembangkangan ini bahkan dapat dikatakan sebagai bentuk perilaku yang *nyeleneh* atau *kurang waras*. Sebagai contoh apabila ditanya akan pergi kemana? Mereka menjawab ke depan. Dari mana? Dari belakang. Apa pekerjaanmu? *Laki* (bersetubuh). Jawaban yang diberikan sekilas memang sekenanya, namun apabila dikaji lebih jauh jawaban yang diberikan tetap memegang teguh prinsip kejujuran, sebuah nilai yang harus dipegang teguh oleh masyarakat Samin.

Keterbukaan masyarakat Samin mulai terjadi ketika pemerintah orde baru gencar melaksanakan program pembangunan di segala bidang. Modernisasi dipandang sebagai sebuah ide yang harus ditransformasikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Modernisasi beranggapan bahwa apabila ingin mencapai kemajuan maka nilai tradisional yang ada harus digantikan dengan nilai baru yang lebih modern. Ide dianggap sebagai sumber perubahan, namun demikian perspektif ini juga tidak menampik adanya teknologi. Modernisasi juga memperkenalkan adanya teknologi baru. Ideologi mampu menyebabkan perubahan paling tidak melalui tiga cara yang berbeda, yaitu :

1. Ideologi dapat melegitimasi keinginan untuk melakukan perubahan.
2. Ideologi mampu menjadi dasar solidaritas sosial yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan.
3. Ideologi dapat menyebabkan perubahan melalui menyoroti perbedaan dan permasalahan yang ada pada masyarakat.

Simpulan

Masyarakat Samin di Dusun Jepang telah mengalami banyak perubahan dan akan terus berlangsung seiring pembangunan “ala” modernisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sejauh ini perubahan yang terjadi berupa transformasi pertanian yang dicirikan oleh perubahan moda produksi dari yang semula subsisten menjadi komersialis. Transformasi pertanian yang terjadi ditandai pula dengan masuknya teknologi pertanian berupa mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian atau lebih tepatnya modernisasi pertanian merupakan salah satu kebijakan pembangunan pertanian pemerintah orde baru yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia.

Modernisasi pertanian membawa dampak pada perubahan pola konsumsi masyarakat Samin. Gaya hidup konsumtif sudah mulai menggejala sebagai akibat sistem pertanian yang komersil. Modernisasi pertanian juga membawa dampak pada menurunnya kebutuhan tenaga kerja pada sektor pertanian. Seiring dengan modernisasi pertanian tersebut semakin banyak warga masyarakat Samin yang melakukan migrasi ke sektor non pertanian terutama industri dan jasa di kota-kota besar di sekitar Dusun Jepang. Suatu temuan yang menarik adalah tidak berubahnya sistem kelembagaan *sambatan* dan *bawon*. Sampai saat ini masyarakat Samin tidak menerapkan sistem kerja upahan pada sektor pertaniannya.

BAB XI. BENTUK – BENTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Pendampingan Sosial

Pendampingan sosial dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti:

- Merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi.
- Memobilitas sumber daya setempat.
- Memecahkan masalah sosial.
- Menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan.
- Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat.

B. Bidang Tugas

Pendampingan sosial berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi yang dapat disingkat dalam akronim 4P, yakni: pemungkinan (enabling) atau fasilitasi, penguatan (empowering), perlindungan (protecting) dan pendukungan (supporting).

C. Pemungkinan atau Fasilitasi

Merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat. Beberapa tugas pekerja sosial yang berkaitan dengan fungsi ini antara lain menjadi model (contoh), melakukan mediasi dan negosiasi, membangun consensus bersama, serta melakukan manajemen sumber. Program penanganan masalah sosial pada umumnya diberikan kepada anggota masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber, baik karena sumber tersebut tidak ada di sekitar lingkungannya, maupu karena sumber-sumber tersebut sulit dijangkau karena lasan ekonomi maupun birokrasi. Pekerja sosial terpanggil untuk mampu memobilisasi dan mengkoordinasi sumber-sumber tersebut agar dapat dijangkau oleh klien.

Sumber adalah segala sesuatu yang dapat digunakan klien dan pekerja sosial dalam proses pemecahan masalah. Sumber dapat berupa sumber personal (pengetahuan, motivasi, pengalaman hidup, motivasi), sumber interpersonal (sitem

pendukung yang lahir baik dari jaringan pertolongan alamiah maupun interaksi formal dengan orang lain), dan sumber sosial (respon kelembagaan yang mendukung kesejahteraan klien maupun masyarakat pada umumnya). Pengertian manajemen di sisni mancakup pengkoordinasian, pensistematisasian, dan pengintegrasian-bukan pengawasan (controlling) dan penunjukkan (directing). Pengertian manajemen juga meliputi pembimbingan, kepemimpinan dan kolaborasi dengan pengguna atau penerima program PM. Dengan demikian, tugas utama pekerja sosial dalam manajemen sumber adalah menghubungkan klien dengan sumber-sumber sedemikian rupa sehingga dapat meninggalkan kepercayaan diri klien maupun kapasitas pemecahan masalahnya.

D. Penguatan

Fungsi ini berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat (capacity building). Pendamping berperan aktif sebagai agen yang member masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan fungsi penguatan.

E. Perlindungan

Fungsi ini berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampingannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja. Fungsi perlindungan juga menyangkut tugas pekerja sosial sebagai konsultan, orang yang bisa diajak berkonsultasi dalam proses pemecahan masalah. Konsultasi pemecahan masalah tidak hanya berupa pemberian dan penerimaan saran-saran melainkan merupakan proses yang ditujukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pilihan-pilihan dan mengindentifikasi prosedur-prosedur bagi tindakan-tindakan yang diperlukan.

F. Pendukung

Mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis yang dapat mendukung terjadinya perubahan positif pada masyarakat. Pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi manajer perubahan yang mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti malakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi dan mencari serta mengatur sumber dana.

BAB XII. BENTUK- BENTUK PERAN SOSIAL AGEN PEMBANGUNAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Mengacu pada Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994), ada beberapa peran pekerjaan sosial dalm pembimbingan sosial. Lima peran di bawah ini sangat relevan diketahui oleh para pekerja sosial yang akan melakukan pendampingan sosial.

A. Fasilitator

Dalam literature pekerjaan sosial, peranan "fasilitator" sering disebut sebagi "pemungkin" (enabler). Keduanya bahkan sering dipertukarkan satu sama lain. Seperti dinyatakan Parsons, Jorgensen danHernandez (1994:188), : *The traditional role of enabler in social work implies education, facilitation and promotion of interaction and action".* Selanjutnya Barker (1987) member defenisi pemungkin atau fasilitator sebagai tanggung jawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau tarnsisional. Strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut meliputi: pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian dan pendorongan kekuatan-kekuatan personal dan asset-asset sosial, pemilahan masalah emnjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan dan pemeliharaan sebuah focus pada tujuan dan cara-cara pencapainnya (Barker, 1987:49). Pengertian ini didasari oleh visi pekerjaan sosial bahwa "setiap perubahan terjadi pada dasarnya dikarenakan oleh adanya usaha-usaha klien sendiri dan peranan pekerja sosial adalah memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama (Parsons, Jorgensen dan Hernandez, 1994). Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994:190-203) memberikan kerangka acuan mengenai tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial.

- Mendefinisikan keanggotaan atau siapa yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan.
- Mendefinisikan tujuan keterlibatan.
- Mendorong komunikasi dan relasi, serta menghargai pengalaman dan perbedaan-perbedaan.

- Memfasilitasi kerikatan dan kualitas sinergi sebuah system menemukan kesamaan dan perbedaan.
- Memfasilitasi pendidikan: membangun pengetahuan dan keterampilan.
- Memberikan model atau contoh dan memfasilitasi pemecahan masalah bersama: mendorong kegiatan kolektif.
- Mengidentifikasikan masalah-masalah yang akan dipecahkan.
- Memfasilitasi penetapan tujuan.
- Mendorong pelaksanaan tugas.
- Memelihara relasi system.
- Memecahkan konflik.

B. Broker

Dalam konteks pendampingan sosial, peran pekerja sosial sebagai broker tidak jauh berbeda dengan peran broker di pasar modal. Seperti halnya di pasar modal, terdapat klien atau konsumen. Namun demikian, pekerja sosial melakukan transaksi dalam pasar lain, yakni jaringan pelayanan sosial. Pemahaman pekerja sosial yang menjadi broker megenai kualitas pelayanan sosial di sekitar lingkungannya menjadi sangat penting dalammemnuhi keinginan kliennya memperoleh “keuntungan” maksimal.

Dalam proses pendampingan sosial, ada tiga prinsip utama dalam melakukan peranan sebagai broker:

- Mampu mengidentifikasi dan melokalisir sumber-sumber kemasyarakatan yang tepat.
- Mampu menghubungkan konsumen atau klien dengan sumber secara konsisten.
- Mampu mengevaluasi efektivitas sumber dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan klien.

Prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan makna broker seperti telah dijelaskan di muka. Peranan sebagai broker mencakup “menghubungkan klien dengan barang-barang dan pelayanan dan mengontrol kualitas barang dan pelayanan tersebut. Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam pelaksanaan peran sebagai broke, yaitu: menghubungkan (linking, barang-barang dan pelayanan (goods and services) dan pengontrolan kualitas (quality control). Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994: 226-227) menerangkan ketiga konsep di atas satu per satu:

- *Linking* adalah proses menghubungkan orang dengan lembaga-lembaga atau pihak-pihak lainnya yang memiliki sumber-sumber yang diperlukan. Linking juga tidak sebatas hanya member petunjuk kepada orang mengenai umber-sumber yang ada. Lebih dari itu, ia juga meliputi memperkenalkan klien dan sumber referral, tindak lanjut, pendistribusian sumber, dan menjamin bahwa barang-barang dan jasa dapat diterima oleh klien.
- *Goods* adalah barang-barang yang nyata, seperti makanan, uang, pakaian, perumahan, obat-obatan. Sedangkan services mencakup keluaran pelayanan lembaga yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan hidup klien, semisal perawatan kesehatan, pendidikan, pelatihan, konseling, pengasuhan anak.
- *Quality Control* adalah proses pengawasan yang dapat menjamin bahwa produk-produk yang dihasilkan lembaga memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Proses ini memerlukan monitoring yang terus menerus terhadap lembaga dan semua jaringan pelayanan untuk menjamin bahwa pelayanan memiliki mutu yang dapat dipertanggungjawabkan setiap saat.

Dalam melaksanakan peran sebagai broker, ada dua pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki pekerja sosial:

- Pengetahuan dan keterampilan melakukan asesmen kebutuhan masyarakat (community needs assessment), yang meliputi: (a) jenis dan tipe kebutuhan, (b) distribusi kebutuhan, (c) kebutuhan akan pelayanan, (d) pola-pola penggunaan pelayanan, dan (e) hambatan-hambatan dalam mengjangkau pelayanan.
- Pengetahuan dan keterampilan membangun konsorsium dan jaringan antar organisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk: (a) memperjelas kebijakan-kebijakan setiaplembaga, (b) mendefinisikan peranan lembaga-lembaga, (c) mendefinisikan potensi dan hambatan setiap lembaga, (d) memilih metode guna menentukan partisipasi setiap lembaga dalam memecahkan masalah sosial masyarakat, (e) mengembangkan prosedur guna mengidentifikasi dan memenuhi kekurangan pelayanan sosial.

C. Mediator

Pekerja sosial melakukan peran mediator dalam berbagai kegiatan pertolongannya. Peran ini sangat penting dalam paradigm generalis. Peran mediator diperlukan terutama pada saat terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada konflik antara berbagai pihak. Lee dan Swenson (1986) memberikan contoh bahwa pekerja sosial dapat memerankan sebagai “fungsi kekuatan ketiga” untuk menjembatani antara anggota kelompok dan system lingkungan yang menghambatnya.

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan peran mediator meliputi kontrak perilaku, negoisasi, pendamai pihak ketiga, serta berbagai macam resolusi konflik. Dalam mediasi, upaya-upaya yang dilakukan pada hakekatnya diarahkan untuk mencapai “solusi menang-menang (win-win solution). Hal ini berbeda dengan peran sebagai pembela di mana bantuan pekerja sosial diarahkan untuk memenangkan kasus klien atau membantu klien memenangkan dirinya sendiri.

Compton dan Galaway (1989:511) memberikan beberapa teknik dan keterampilan yang dapat digunakan dalam melakukan peran mediator:

- Mencari persamaan nilai dari pihak-pihak yang terlibat konflik.
- Membantu setiap pihak agar mengakui legitimasi kepentingan pihak lain.
- Membantu pihak-pihak yang bertikai dalam mengidentifikasi kepentingan bersama.
- Hindari situasi yang mengarah pada munculnya kondisi menang dan kalah.
- berupaya untuk melokalisir konflik ke dalam isu, waktu dan tempat yang spesifik.
- Membagi konflik ke dalam beberapa isu
- membantu pihak-pihak yang bertikai untuk mengakui bahwa mereka lebih memiliki mamfaat jika melanjutkan sebuah hubungan ketimbang terlibat terus dalam konflik.
- Memfasilitasi komunikasi denga cara mendukung mereka agar mau berbicara satu sama lain.
- Gunakan prosedur-prosedur persuasi.

D. Pembela

Seringkali pekerja sosial harus berhadapan system politik dalam rangka menjamin kebutuhan dan sumber yang diperlukan oleh klien atau dalam melaksanakan tujuan-tujuan pendampingan sosial. Manakala pelayanan dan sumber-sumber sulit

dijangkau oleh klien, pekerja sosial harus memainkan peranan sebagai pembela (advokat). Peran pembelaan atau advokasi merupakan salah satu praktek pekerjaan sosial yang bersentuhan dengan kegiatan politik. Peran pembelaan dapat dibagi dua: advokasi kasus (case advocacy) dan advokasi kausal (cause advocacy) (Du Bois dan Miley, 1992; Parsons, Jorgensen dan Hernandez, 1994). apabila pekerja sosial melakukan pembelaan atas nama seorang klien secara individual, maka ia berperan sebagai pembela kasus. Pembelaan kausal terjadi manakala klien yang dibela pekerja sosial bukanlah individu melainkan sekelompok anggota masyarakat.

Rothblatt (1978) memberikan beberapa model yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan peran pembela dalam pendampingan sosial:

- keterbukaan: membiarkan berbagai pandangan untuk didengar.
- Perwakilan luas: mewakili semua pelaku yang memiliki kepentingan dalam pembukaan keputusan.
- Keadilan: memperjuangkan sebuah system kesetaraan atau kesamaan sehingga posisi-posisi yang berbeda dapat diketahui sebagai bahan perbandingan.
- Pengurangan permusuhan: mengembangkan sebuah keputusan yang mampu mengurangi permusuhan dan keterasingan.
- Informasi: menyajikan masing-masing pandangan secara bersama dengan dukungan dokumen analisis.
- Pendukungan mendukung partisipasi secara luas.
- kepekaan: mendorong para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap minat-minat dan posisi-posisi orang lain.

E. Pelindung

Tanggung jawab pekerja sosial terhadap masyarakat didukung oleh hokum. Hukum tersebut memberikan legitimasi kepada pekerja sosial untuk menjadi pelindung (protector) terhadap orang-orang yang lemah dan rentan. Dalam melakukan peran sebagai pelindung (guardian role), pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan korban, calon korban, dan populasi yang berisiko lainnya. Peranan sebagai pelindung mencakup penerapan berbagai kemampuan yang menyangkut: (a) kekuasaan, (b) pengaruh, (c) otoritas, dan (d) pengawasan sosial. Tugas-tugas peran pelindung meliputi:

- Menentukan siapa klien pekerja sosial yang paling utama.
- Menjamin bahwa tindakan dilakukan sesuai dengan proses perlindungan.
- Berkomunikasi dengan semua pihak yang terpengaruh oleh tindakan sesuai dengan tanggung jawab etis, legal dan rasional praktek pekerjaan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim A. http://www.kompas.com/kompas-cetak/0605/22/daerah/2675426.htm

Anonim B. http://www.kompas.com/kompas-cetak/0605/22/daerah/2675420.htm

Adi, Isbandi Rukminto, 2001. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Adi, Isbandi Rukminto, 2002. Pemikiran – Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Agusyanto, Ruddy, 2007. Jaringan Sosial dalam Organisasi. PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

Barth, Frederik. 1969. Kelompok Etnis dan Batasannya. UI Press. Jakarta.

Beteille, Andre. 1970. *Social Inequality*. Penguin Education. California.

Davis, Kingsley. 1960. Human Society. The Macmillan Company. New York.

Douglas, Jack D. 1981. *Introduction to Sociology ; Situations and Structures*. The Free Press. New York.

Dube, S.C. 1988. Modernization and Development: The Search for Alternative Paradigms. Zed Books Ltd, London.

Etzioni, A. & Halevy, Eva Etzioni- (eds). 1973. Social Changes: Sources, Patterns and Consequences. Basic Books, New York.

Harper, Charles L. 1989. Exploring Social Change. Prentice Hall. New Jersey.

Ibrahim, Jabal Tarik, 2003. Sosiologi Pedesaan. Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang.

Kornblum, William. 1988. *Sociology in Changing World*. Holt, Rinchart and Winston. New York.

Linton, Ralph. 1967. “Status and Role” dalam Lewis A. Coser dan Bernard Rosenberg. *Sociological Theory ; A Book of Reading*. The Macmillan. New York.

Merton, Robert K. 1964. *Social Theory and Social Structure*. The Free Press. New York.

Moore, Wilbert E. 2000. Social Change. The Macmillan Company. New York.

Narwoko, J. Dwi, 2006. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Penerbit Kencana, Jakarta.

Neufeldt,V. and D.B. Guralnik. 1988. Webster's New Woprld Dictionary of American English. Webter's New World. New York.

Philipus, Ng., dan Nurul Aini, 2006. Sosiologi dan Politik. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Pranadji, T. 1995. Wirausaha, kemitraan Dan Pengembangan Agribisnis Secara Berkelanjutan. Analisis CSIS, XIV (5): 332-343. Center of Strategic and International Studies. Jakarta.

, T. 1999. Perekayaan Sosio – Budaya Dalam Percepatan Tranformasi Masyarakat Pedesaan Secara Berkelanjutan. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.

Schoorl, J.W. 1980. Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang. PT. Gramedia, Jakarta.

Salim, Agus. 2002. Perubahan Sosial. Tiara Wacana. Yogyakarta.

Shahab, Kurnadi, 2007. Sosiologi Pedesaan. Penerbit Ar – Ruzz Media, Jogjakarta.

Soekanto, Soerjono. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers. Jakarta.

Soemardjan, Selo. 1986. Perubahan Sosial di Yogyakarta. UGM Press. Yogyakarta.

Sorokin, Pitirim A. 1957. Social and Cultural Dynamics. Sargent. Boston.

Suharto, Edi, 2006. Membangun Masyarakat Membedayakan Masyarakat. PT. Refika Aditama, Jakarta.